

TERIMA DUBES AUSTRALIA: BAMSOET DORONG PENINGKATAN KERJASAMA BILATERAL

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN

EDISI NO.11/TH.XV/NOVEMBER 2021

MENEGAKKAN KEDAULATAN RI DI PAPUA

ISSN 0854-6371



9 770854 637158

06 Refleksi
Salah Kelola SDA Masa
Lalu Tak Boleh Terulang

26 Nasional
Press Gathering 2021 Forum
Membangun Kebersamaan

39 Selingan
Sejarah Pekan Olahraga
Nasional Indonesia

52 Sosialisasi
Mari Jaga Empat Pilar,
Jangan Dirusak atau Diganti



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

WWW.MPR-RI.ID



EMPAT PILAR MPR RI

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
NKRI Sebagai Bentuk Negara
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

Daftar Isi

EDISI NO.11/TH.XV/NOVEMBER 2021



08 BERITA UTAMA

Menegakkan Kedaulatan RI di Papua

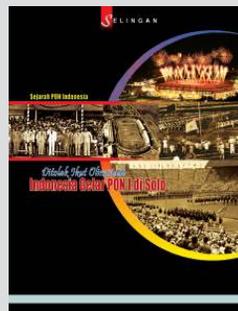
Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak bisa dipandang sebagai bentuk tindakan kriminal biasa. Aksi KKB secara nyata merupakan aksi separatis yang mengancam kedaulatan NKRI. Penyelesaian masalah kekerasan di Papua harus melalui jalan dialog dan rekonsiliasi.



26 Nasional Press Gathering MPR 2021 di Bandung: Forum Membangun Kebersamaan



50 Sosialisasi Basarah: Ajak Mahasiswa Teladani Api Perjuangan Syuhada Bangsa



39 SELINGAN Sejarah PON Indonesia



76 Profil Anggia Ermarini

Pengantar Redaksi	04
Perspektif	06
Diskusi Majelis	36
Aspirasi Masyarakat	47
Gema Pancasila	48
Varia MPR	68
Wawancara	70
Figur	72
Ragam	74
Rehal	81
Dari Rumah Kebangsaan	82



COVER

Edisi No.11/TH.XV/November 2021
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa



Budi Muliawan
Redaktur Pelaksana

Pengantar Redaksi

Menegakkan Kedaulatan NKRI di Papua

AKHIR-AKHIR ini aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, terutama di Kabupaten Intan Jaya, semakin brutal. Pada akhir September, misalnya, terjadi baku tembak antara TNI – Polri dengan KKB di Kabupaten Intan Jaya. KKB telah menyerang Polsek Sugapa dan Pos Koramil sehingga personel membalas tembakan dan terjadi kontak tembak. Dalam peristiwa itu jatuh korban dua bocah terkena tembakan, satu di antaranya meninggal dunia.

KKB selalu mengulangi aksinya melakukan teror, penculikan, dan pembunuhan. Data dari Satgas Nemangkawi, Satgas yang dibentuk untuk memerangi KKB menyebutkan, selama periode Januari sampai Juni 2021 telah terjadi sebanyak 23 kontak senjata, 20 kali gangguan keamanan, dan 12 kejahatan lainnya yang dilakukan KKB, di antaranya membakar rumah warga, gedung sekolah, fasilitas kesehatan, serta melakukan perampasan senjata.

Satgas Newangkawi juga mencatat selama periode Januari sampai Juni 2021 telah jatuh korban jiwa sebanyak 22 orang meninggal akibat ulah KKB. Dari jumlah korban jiwa itu, sebanyak 7 orang adalah anggota TNI, 2 orang anggota Polri, dan 13 orang warga sipil. Sementara korban luka-luka sebanyak 17 orang dengan rincian 6 orang anggota TNI, 3 orang anggota Polri, dan 8 orang warga sipil.

Pemerintah telah menetapkan KKB sebagai kelompok teroris. Kelompok ini sebenarnya tidak jauh berbeda dan merupakan kelanjutan dari gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Karena itu, kelompok ini juga disebut dengan KKB teroris separatis, karena melakukan berbagai aksi teror dan kekerasan masif sekaligus mengganggu jalannya pembangunan dan merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dari sudut pandang itu, aksi KKB tidak bisa ditolerir. Aksi mereka bukan sekadar tindak kriminal biasa, tetapi telah mengancam eksistensi NKRI. Aksi berulang KKB telah mengancam

kedaulatan hukum dan NKRI. Secara nyata aksi KKB mengganggu kedaulatan NKRI. TNI sudah seharusnya fokus mengatasi kelompok teroris separatis ini. Karena itu, TNI – Polri sangat berperan menyelamatkan warga sipil sekaligus mempertahankan kedaulatan NKRI di Papua.

Sebenarnya pemerintah telah memberikan perhatian yang sangat besar kepada Papua. Ini ditunjukkan dengan mengeluarkan UU Otonomi Khusus Papua pada tahun 2001. Melalui UU Otsus itu, Papua mendapat dana Otsus sebesar 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) di APBN. Selama 20 tahun UU Otsus, pemerintah telah mengucurkan dana Otsus Papua ditambah dana infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp 138,65 triliun. Inilah komitmen pemerintah untuk membangun Papua dan Papua Barat sebagai bagian utuh NKRI.

Pemerintah telah melakukan pendekatan pembangunan di Papua. Namun, kenyataannya, triliunan dana Otsus belum bisa memberi kesejahteraan kepada masyarakat Papua. Dana Otsus tidak menetes ke lapisan bawah masyarakat Papua. Buktinya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua dan Papua Barat pada 2019 masing-masing 60,84 dan 64,70. Angka ini lebih rendah dari IPM Indonesia sebesar 71,92. Angka kemiskinan di Papua masih terbesar dibanding provinsi lainnya, yaitu sekitar 21%. Di sisi lain, kekerasan dan pelanggaran HAM masih terjadi di Papua. Terakhir, marak kekerasan yang dilakukan KKB.

Konflik tak berujung di Papua bisa jadi disebabkan karena pendekatan menggunakan kekuatan senjata. Padahal, masalah politik tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan senjata. Karena itu penyelesaian masalah kekerasan di Papua harus melalui jalan dialog dan rekonsiliasi sebagaimana keberhasilan dialog dan rekonsiliasi dengan GAM di Provinsi Aceh. Perlu dibuka ruang dialog yang baik untuk semua *stakeholder* di Papua. Melalui dialog itu diharapkan tercapai kesepakatan bersama untuk perdamaian di Papua. □



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PENANGGUNG JAWAB

Ma'ruf Cahyono

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

DEWAN REDAKSI

Yana Indrawan, Dyastasita,

Heri Herawan, Maifrizal

REDAKTUR PELAKSANA

Budi Muliawan

KOORDINATOR REPORTASE

Ario Setiawan

REDAKTUR FOTO

Oni Arief Benyamin,

Slamet Eko Suprayitno

REPORTER

Bayu Nugroho, Yenita Revi,

Try Syilvani, Ikhwani Bimo F,

Amelia Rubinta

FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,

Restu, Suprianto, Faridz Rizky,

Wira, Subhan

PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayat

STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Amiruddin,

Anggun Permana,

Armansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

TIM AHLI

Syahriil Chili, Jonni Yasrul,

Ardi Winangun, Budi Suchyo,

Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI

Biro Hubungan Masyarakat dan

Sistem Informasi,

Sekretariat Jenderal MPR-RI

Gedung Nusantara III, Lt. 5

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,

Senayan, Jakarta 10270.

Telp. (021) 57895237, 57895238,

57895251 Fax.: (021) 57895237

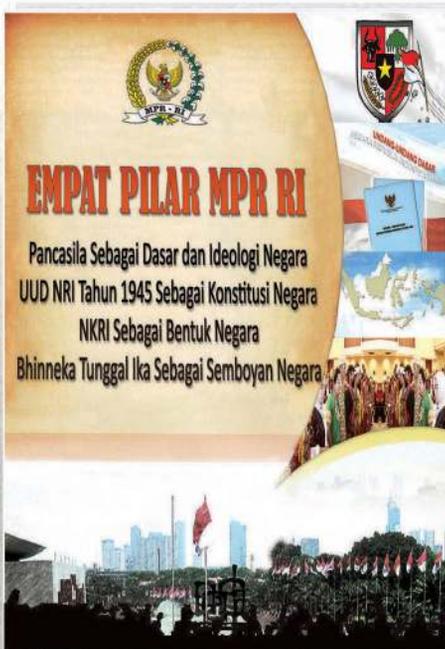
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



Peringatan

HARI PAHLAWAN

10 NOVEMBER 1945 - 10 NOVEMBER 2021



ILUSTRASI: SUSTHANTO

Salah Kelola SDA di Masa Lalu Tak Boleh Berulang

PERKEMBANGAN kebutuhan dan permintaan pasar dunia akan nikel serta bauksit otomatis menguatkan posisi tawar Indonesia. Menjadi sangat ideal jika nilai tambah nikel dan bauksit diproses di dalam negeri demi kesejahteraan seluruh rakyat. Dengan keberanian dan konsistensi mengolah sumber daya alam (SDA) menjadi produk bernilai tambah, kesalahan mengelola SDA sebagaimana terjadi di masa lalu tak lagi berulang di era sekarang.

Roda perubahan zaman yang berputar begitu cepat menghadirkan keberuntungan bagi Indonesia. Layak untuk mengatakan demikian karena nikel dan bauksit mendadak jadi komoditas mineral yang sangat strategis dan sangat dibutuhkan bagi dunia yang terus berubah. Seperti diketahui, komunitas global terus berupaya membangun kesepakatan menghentikan pemanfaatan energi fosil.

Dan, sebagai bagian dari upaya memulihkan keseimbangan alam semesta, telah muncul keinginan kuat untuk beralih menggunakan energi bersih, dalam arti energi yang eksekutif atau dampak buruknya relatif minim terhadap aspek kesehatan dan lingkungan hidup, serta aspek sosial dan kultural. Untuk tujuan itulah dunia sekarang sedang bersiap menjalani proses transisi dari penggunaan energi fosil ke energi terbarukan.

Untuk membuktikan bahwa persiapan proses transisi itu bukan sekadar omongan atau jargon, layak untuk melihat inisiatif atau rencana aksi yang sudah dimulai oleh beberapa negara. Sebutlah Amerika Serikat (AS) yang telah kembali pada perjanjian iklim PBB di Paris. Presiden AS Joe Biden sudah menyiapkan proposal atau rencana belanja sampai dua triliun dolar AS untuk memodernisasi semua jaringan infrastruktur di negeri itu.

Proposal itu memuat rencana membangun ketersediaan jaringan internet yang lebih luas, teknologi untuk mitigasi perubahan iklim, menyiapkan tenaga kerja untuk energi bersih, serta rencana membangun jaringan 500.000 stasiun pengisian mobil listrik paling lambat pada tahun 2030. AS berambisi mewujudkan listrik bersih, pembangkit energi bersih seperti tenaga angin dan surya, hingga

penyimpanan energi dengan baterai canggih.

Komitmen komunitas global menghadirkan energi bersih itulah yang membuat komoditas seperti nikel dan bauksit menjadi sangat strategis. Di perut bumi Indonesia, dua komoditas strategis ini tersedia dalam jumlah memadai sehingga membuat posisi tawar Indonesia menguat. Setelah diolah, biji nikel bisa menghadirkan sejumlah produk turunan yang nilai tambahnya berkali-kali lipat. Biji nikel kadar rendah dimanfaatkan untuk membuat baterai penggerak kendaraan listrik.

Cadangan nikel di perut bumi Indonesia mencapai 72 juta ton Ni



(nikel). Jumlah ini mencakup 52% dari total cadangan nikel dunia yang volumenya mencapai 139,42 juta ton Ni. Sudah muncul perkiraan bahwa kebutuhan nikel untuk baterai kendaraan listrik dan power bank skala besar atau Energy Storage System (ESS) pada 2025 mencapai 372 ribu ton, dan naik lagi menjadi 795 ribu ton pada 2030.

Sedangkan biji bauksit bisa diolah menjadi alumina untuk membuat logam aluminium yang pemanfaatannya sangat beragam, seperti komponen atau bahan baku bangunan dan konstruksi, ragam komponen mesin, transportasi, kelistrikan, kemasan dan barang tahan lama lainnya. Kementerian ESDM mencatat, jumlah sumber

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI



daya biji terukur bauksit di Indonesia mencapai 1,7 miliar ton, dan logam bauksit 640 juta ton. Cadangan terbukti untuk biji bauksit 821 juta ton, dan logam bauksit 299 juta ton.

Masuk akal jika Indonesia terdorong memiliki strategi dan pembaruan kebijakan untuk merespons kebutuhan dan besarnya permintaan pasar itu. Pembaruan strategi dan rumusan kebijakan itu harus berorientasi pada pemanfaatan SDA untuk kesejahteraan rakyat, dan menghadirkan nilai tambah yang prosesnya dilaksanakan di dalam negeri sendiri, bukan di negeri orang lain.

Jika ragam produk turunan dari nikel dan bauksit diproses di dalam negeri, multiplier effect atau dampak positifnya akan berlipat-lipat. Utamanya, akan terwujud pendalaman struktur industri di dalam negeri dengan menerapkan strategi hilirisasi; dari yang sebelumnya hanya menghasilkan bahan baku (industri hulu), naik kelas menjadi produsen pembuat barang jadi (industri hilir). Dampak lanjutannya, akan tercipta jutaan lapangan kerja baru. Pendapatan negara dan daerah akan meningkat signifikan dari ekspor produk turunan nikel dan bauksit itu.

Presiden Joko Widodo telah memutuskan penghentian ekspor bahan mentah untuk nikel sejak 1 Januari 2020. Kebijakan ini mendorong Uni Eropa (UE) mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pada 22 Februari 2021, untuk kedua kalinya UE meminta pembentukan panel sengketa pada pertemuan reguler Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body-WTO). Alih-alih mundur, Presiden justru menegaskan bahwa kebijakan serupa juga akan diterapkan

pada komoditas lainnya seperti bauksit hingga kelapa sawit.

Bisa dipahami jika banyak negara konsumen bahan mentah nikel dan bauksit marah karena pembaruan strategi dan kebijakan Indonesia pada dua komoditas dimaksud. Namun, demi kepentingan nasional dan masa depan bangsa, harus dimunculkan keberanian menunjukkan keteguhan sikap dan pendirian Indonesia untuk memulai hilirisasi industri mengolah komoditas SDA. Tak hanya keberanian, tetapi juga menjaga konsistensi. Artinya, begitu hilirisasi industri untuk mengolah SDA sudah dimulai, strategi ini tak boleh lagi berubah atau dihentikan.

Di masa lalu, Indonesia pernah keliru atau melakukan kesalahan dalam mengolah komoditas SDA, khususnya minyak mentah. Catatan ini penting untuk dipahami generasi terkini. Sejak dasawarsa 70-an, Indonesia menjadi anggota OPEC (Organization Petroleum Exporting Countries) karena berstatus sebagai negara penghasil minyak. Namun, Indonesia hanya menghasilkan dan ekspor minyak mentah.

Dalam rentang waktu puluhan tahun, Indonesia yang berstatus ekportir minyak itu justru memiliki ketergantungan sangat tinggi pada bahan bakar minyak (BBM) yang harus diimpor. Jadi, minyak mentah asal Indonesia diolah di negara lain, lalu diimpor lagi oleh Indonesia setelah menjadi BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kekeliruan atau kesalahan historis seperti ini tak boleh berulang. Maka, kebijakan mengolah dan menghasilkan ragam produk turunan nikel di dalam negeri sendiri harus direalisasikan dengan berani dan konsisten demi kesejahteraan rakyat. □

Menegakkan Kedaulatan Republik Indonesia di Papua



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak bisa dipandang sebagai bentuk tindakan kriminal biasa. Aksi KKB secara nyata merupakan aksi separatistis yang mengancam kedaulatan NKRI. Penyelesaian masalah kekerasan di Papua harus melalui jalan dialog dan rekonsiliasi.

PEKAN Olahraga Nasional (PON) Ke-XX di Papua yang diselenggarakan pada 2 Oktober hingga 15 Oktober 2021 berjalan dengan sukses. Padahal sebelum PON berlangsung muncul kekhawatiran akan terkendala, karena pesta olahraga nasional ini digelar di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia. Mengingat, acara pembukaan dan penutupan PON dan even pertandingan setiap cabang olahraga akan menghadirkan penonton dan menimbulkan kerumunan. Situasi ini bisa menjadi penyebab penyebaran atau kluster virus Covid-19.

Selain itu, situasi keamanan di Papua masih rawan karena adanya gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Di beberapa tempat tertentu, seperti Kabupaten Intan Jaya, sering terjadi serangan dan tembakan dilakukan kelompok yang dikategorikan sebagai teroris ini. Mereka menyerang aparat dan warga sipil, sehingga mengakibatkan jatuh korban.

Namun, ternyata PON ke-XX di Papua berjalan lancar dan aman. Dari segi kesehatan, PON di Papua tidak menjadi kluster penyebaran Covid-19. Memang tercatat sebanyak 136 orang yang terpapar positif Covid-19, tetapi semuanya sudah hampir sembuh. Pada hari-hari terakhir penyelenggaraan PON, angka konfirmasi positif

Covid-19 sudah menurun.

Dari segi keamanan, PON di Papua tidak mendapat gangguan dari KKB. Lebih dari 10 ribu personel dari TNI – Polri diterjunkan untuk mengamankan even olahraga nasional ini. Ketika PON berlangsung tidak ada gangguan sama sekali dari teroris KKB. Ini menjadi cermin bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan even nasional dan internasional.

“Ini menunjukkan kepada dunia bahwa di masa Covid-19, Indonesia mampu menyelenggarakan even besar dengan penonton dan berjalan lancar serta aman. Semua ini atas kerja keras rekan-rekan TNI – Polri, masyarakat, dan elemen terkait, sehingga PON berjalan dengan baik,” kata Kapolda Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam keterangannya pada Sabtu, 23 Oktober 2021.

Namun, selang beberapa hari setelah berakhirnya PON, aksi brutal KKB kembali terjadi di Papua. KKB beraksi di wilayah Kabupaten Intan Jaya. Beberapa kali terjadi baku tembak sengit antara TNI – Polri dengan KKB. Keterangan resmi dari Polda Papua menyebutkan, rentetan teror dari KKB Papua berawal saat kelompok bersenjata itu menembaki Polsek Sugapa dan Pos Koramil pada Selasa malam, 26 Oktober 2021. Serangan brutal itu menyebabkan dua anak di



Kabupaten Intan Jaya tertembak. “KKB menyerang pos sehingga personel membalas tembakan dan terjadi kontak tembak,” kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal.

Menurut Kamal, kedua anak itu sedang bersama orangtuanya beraktivitas di sekitar rumah. Kedua anak tersebut terkena serpihan tembakan. “Dua anak bersama orangtuanya sedang beraktivitas di sekitar rumah, sehingga menjadi sasaran KKB,” ungkap Kamal. Dari dua yang terkena tembakan itu, satu anak dinyatakan meninggal dunia.

Aparatur juga mendapat laporan KKB telah membakar bangunan rumah milik warga. Tercatat satu unit mobil tangki air, ambulan dan bangunan yang ada di Bandara Bilogai, Intan Jaya, dibakar KKB. Di lokasi pembakaran di Bandara Bilogai, personel gabungan TNI – Polri terlibat baku tembak dengan KKB. Dalam baku tembak itu tidak ada korban jiwa dari masyarakat maupun personel TNI – Polri. Aparatur TNI – Polri terus menyusuri keberadaan KKB.

Satgas Nemangkawi—Satgas yang dibentuk untuk memerangi KKB—mencatat selama periode Januari sampai Juni 2021, sebanyak 22 orang meninggal dunia akibat ulah KKB di Papua. Dari jumlah itu, sebanyak 7 orang adalah anggota TNI, 2 orang anggota

Polri, dan 13 warga sipil. Sementara korban luka-luka sebanyak 17 orang, dengan rincian 6 orang anggota TNI, 3 orang anggota Polri, dan 8 orang warga sipil.

Kasatgas Humas Ops Nemangkawi Kombes Pol. M. Iqbal Al Qudusy mengungkapkan, selama Januari – Juni 2021 telah terjadi sebanyak 23 kontak tembak, 20 gangguan penembakan, dan 12 kejahatan lainnya, termasuk pembakaran rumah warga, gedung sekolah, puskesmas, serta pembunuhan dan perampasan senjata yang dilakukan KKB di Papua.

Melihat aksi KKB di Papua, pemerintah telah mengategorikan kelompok itu sebagai organisasi teroris. Sebutan ini disematkan ke KKB karena masifnya pembunuhan dan kekerasan yang dilakukan KKB. “Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dalam konperensi pers beberapa waktu lalu.



M. Iqbal Al Qudusy



Sjarifuddin Hasan

Mahfud menjelaskan, penetapan KKB di Papua sebagai teroris sudah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Merujuk aturan tersebut, mereka yang dikategorikan teroris adalah semua orang yang terlibat dalam merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan tindakan terorisme. Sedangkan terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal.

Selain itu, aksi mereka menimbulkan kehancuran terhadap obyek vital strategis, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan. “Berdasarkan definisi yang tercantum dalam UU No. 5 Tahun 2018 maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris,” jelas Mahfud.

Wakil Ketua MPR Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., juga sepakat bahwa tindakan KKB tujuannya jelas hanya meneror, melakukan penculikan, pembunuhan dan makar. Aksi teror KKB kepada masyarakat sudah sangat meresahkan. Karena itu dia mendukung langkah TNI – Polri menumpas KKB di Papua ini. “KKB adalah musuh negara dan rakyat Indonesia sehingga sudah seharusnya ditumpas sampai ke akar-akarnya,” katanya dalam keterangan resmi pada akhir September 2021.

Ketua MPR Bambang Soesatyo lebih tegas lagi. Untuk mengatasi tindakan KKB di Papua,

dia meminta pemerintah menurunkan empat matra terbaik. “Turunkan kekuatan empat matra terbaik yang kita miliki, selain Brimob. Empat matra itu adalah Gultor Kopassus, Raiders, Bravo, dan Denjaka,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Sabtu, 18 September 2021.

Merongrong Kedaulatan

Syarief Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan, mendukung TNI – Polri melakukan tindakan yang lebih tegas. Sebab, bila teror itu dibiarkan maka korban dari warga sipil dan aparat akan terus berjatuh. Dia juga menyebut aksi KKB meresahkan warga sipil dan merongrong kedaulatan negara. Genealogi kelompok ini adalah teror dan mereka akan terus melakukan teror. Karena itu, TNI – Polri sangat berperan untuk menyelamatkan warga sipil dan mempertahankan kedaulatan NKRI.

Padaahal, menurut Syarief Hasan, pemerintah Indonesia telah melakukan banyak upaya untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat. Selama 20 tahun terakhir, pemerintah telah mengucurkan alokasi dana otonomi khusus (Otsus) dan dana tambahan infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp 138,65 triliun. Ini merupakan komitmen pemerintah dalam membangun Papua dan Papua Barat. Namun, kenyataannya teror tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan KKB hanya ingin mengacau dan mengganggu pembangunan di Papua.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai, aksi KKB yang terus berulang telah



Hidayat Nur Wahid

mengancam hukum dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Aksi berulang itu secara nyata mengancam kedaulatan hukum dan eksistensi NKRI. TNI seharusnya fokus mengatasi kelompok teroris separatis ini,” katanya.

Menurut Hidayat, aksi berulang KKB separatis tersebut menjadi cambuk bagi TNI bahwa musuh bersama yang membahayakan keutuhan NKRI adalah kelompok separatis OPM yang kini menjadi KKB. “Aksi berulang KKB separatis OPM ini seharusnya mengingatkan TNI bahwa musuh bersama yang membahayakan NKRI adalah mereka, yaitu kelompok teroris separatis OPM,” katanya.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat, H. Darizal Basir juga berpendapat sama. Dia menyatakan, aksi KKB di Papua sudah



Bambang Soesatyo Menerima Delegasi Rakyat Papua

mengancam kedaulatan negara. Aksi ini tidak bisa ditolerir. Sejumlah aksi KKB, antara lain membakar sekolah, membunuh guru, dan mengakibatkan gugurnya Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya.

Darizal menilai, aksi KKB bukan hanya tindak kriminal biasa. Tetapi sudah melakukan teror dan mengancam rasa aman dan ketertenteraman di masyarakat. Tidak itu saja. Aksi KKB juga mengancam kedaulatan NKRI. Karena itu, aksi KKB bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM) ini tidak bisa dipandang sebagai bentuk tindakan kriminal bersenjata biasa. "Tetapi secara nyata merupakan aksi separatis yang bertujuan mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tegas politisi yang juga purnawiratan TNI itu.

Darizal menjelaskan bahwa status Papua sudah terang benderang dan jelas serta mendapat pengakuan internasional sebagai bagian integral dari NKRI. "Karena itu setiap upaya yang dilakukan dengan tujuan pemisahan diri atau pemberontakan adalah tindakan makar yang mengancam kedaulatan NKRI," tegasnya lagi.

Dia mendukung langkah pemerintah yang menurunkan pasukan TNI ke Papua untuk menumpas gerakan separatis bersenjata tersebut. Pemerintah harus memastikan rakyat Indonesia di tanah Papua terlindungi dan mendapatkan rasa aman. "Maka segala upaya untuk menumpas gerakan teror harus didukung demi tegaknya NKRI dan ketenteraman hidup rakyat Papua," tutur anggota Komisi I DPR ini.



Darizal Basir

FOTO-FOTO: ISTIMEWA



Dave Akbarshah Fikarno

Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno, juga mendukung upaya menumpas gerakan teroris seperti KKB di Papua. Namun, Dave meminta pemerintah mengutamakan pendekatan humanis dalam menyelesaikan persoalan Papua. Pemerintah agar menggunakan pendekatan sosial, budaya, ekonomi, dan nasionalisme bahwa Papua adalah bagian dari NKRI.

"Perlu terus ditanamkan bahwa Papua adalah bagian Indonesia. Dan, Indonesia adalah Papua, keberagaman kita adalah pemersatu," kata Dave dalam diskusi bertajuk "Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua" di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis, 23 September 2021.

Lebih lanjut Dave mengungkapkan, pemerintah telah memberikan perhatian yang sangat besar kepada Papua, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga adanya UU Otsus Papua. Perhatian besar pemerintah ini karena melihat Papua sebagai bagian utuh NKRI.

"Orang banyak mengira bahwa keuangan negara itu besar dari Freeport dan dari berbagai macam aset di Papua. Pemerintah melihat Papua itu adalah kesatuan dari NKRI, bukan hanya sebagai sumber dana untuk APBN atau pun untuk mengeruk keuntungan pribadi. Itu pemikiran yang sesat dan salah," tukas Dave.

"Jadi jangan hanya berpikir bahwa Papua dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan semata, tidak. Papua adalah bagian dari NKRI dan tidak bisa dipisahkan," sambung anggota Komisi I DPR ini.

Tidak jauh berbeda, anggota MPR asal Papua, Yan Permenas Mandenas, mengatakan, penyelesaian masalah kekerasan di Papua harus melalui jalan dialog dan rekonsiliasi. Beberapa tokoh Papua juga berharap, dialog akan menuntaskan masalah Papua ini. Yan mencontohkan keberhasilan upaya dialog dan rekonsiliasi dengan GAM yang dilakukan pemerintah di Aceh.

"Kalau di Aceh berhasil, kenapa di Papua tidak dilakukan pola yang sama. Saya pikir, semua kekacauan ini akan tuntas jika pola itu dilakukan kembali. Saya yakin, mereka yang ada di hutan-hutan dan gunung-gunung akan turun meletakkan senjatanya, menyerahkan diri jika dibuka ruang dialog yang baik untuk semua," kata Yan.

Dengan dialog tersebut, lanjut Yan, perlu dicapai kesepakatan bersama, terutama pihak KKB harus menyetujui untuk tidak lagi melakukan aksi teror yang meresahkan masyarakat. "Semua harus memiliki keinginan kuat dengan hati terbuka untuk melakukan kesepakatan damai," imbuhnya.

Yan menambahkan bahwa pada dasarnya masyarakat Papua tidak menginginkan kekerasan ini terus berlanjut dan tidak berkesudahan. Dia mengkhawatirkan kekerasan ini akan berlanjut ke generasi-generasi selanjutnya. "Inilah pentingnya dialog. Karena dialog yang baik dan mengakomodir semua pihak akan mengubah pola pikir pelaku kekerasan. Jika pola pikir sudah berubah, maka selanjutnya karakter dan perilaku akan mudah sekali dibentuk," katanya. □

DER/BSC



Yan Permenas Mandenas

Antara Otonomi Khusus dan Kekerasan di Papua

Puluhan triliun dana Otsus Papua sudah dikururkan. Tetapi mengapa masih terjadi kekerasan dan pelanggaran di Papua?



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PADA Kamis, 15 Juli 2021, Rapat Paripurna DPR yang dihadiri 492 anggota mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua menjadi UU. Setelah disahkan, UU itu diundangkan pada 19 Juli 2021 dengan nama UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua. Dengan UU ini, pemerintah kembali memperpanjang Otsus Papua dan Papua Barat mulai 2022 hingga 2041.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) revisi UU Otsus Papua, Komarudin Watubun, memaparkan sejumlah pasal perubahan yang tertuang dalam UU ini. Perubahan itu antara lain kewajiban pengusaha di Papua agar mengutamakan orang asli Papua dalam merekrut tenaga kerja. Aturan ini ditujukan untuk meningkatkan perekonomian orang asli Papua. Aturan lain, yakni mengalokasikan dana 10% dari dana bagi hasil untuk

pemberdayaan masyarakat adat. Juga kenaikan besaran dana Otsus Papua dari 2% menjadi 2,25% dari total Dana Alokasi Umum (DAU) dalam APBN.

Dengan perpanjangan itu, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran untuk Otsus Papua dan Papua Barat sebesar Rp 8,5 triliun dalam RAPBN 2022. Dana tersebut lebih besar 12,6% dibandingkan APBN 2021 sebesar Rp 7,6 triliun. Besaran dana Otsus naik menjadi sebesar 2,25% dari pagu Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp 378 triliun. Sebelumnya, besaran dana Otsus sebesar 2% dari pagu DAU.

Sekadar informasi, Otsus Papua merupakan kewenangan khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi hasil pemekaran provinsi Papua. Melalui Otsus, Pemerintah Daerah Provinsi Papua mendapat mandat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Jika merujuk pada UU No. 21 Tahun 2001, Otsus bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan keadilan penerimaan hasil sumber daya alam, penegakan hak asasi manusia serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Otsus Papua berlaku selama 20 tahun dan berakhir pada 2021. Pemerintah memperpanjang Otsus Papua dengan revisi UU seperti disebutkan di awal tulisan.

Kebijakan dana Otsus Papua mulai berlaku sejak 2001 sebagai bentuk kesepakatan integrasi politik dalam kesatuan Indonesia. Pemberian dana Otsus sebesar 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk empat hal, yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur. Dari bidang-bidang itu, dana paling besar untuk kesehatan sebanyak 20%, pendidikan 15%,

dan masing-masing 5% untuk ekonomi dan infrastruktur. Kementerian Keuangan mencatat aliran dana otonomi khusus atau Otsus dan dana tambahan infrastruktur (DTI) dari 2002 hingga 2021 untuk Papua dan Papua Barat telah mencapai Rp 138,65 triliun.

Namun, jumlah triliun dana Otsus Papua rupanya tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi warga asli Papua. Kesejahteraan rakyat tidak berbanding lurus dengan besarnya dana Otsus. Selama 20 tahun sejak UU Otsus Papua diberlakukan tidak banyak membawa perubahan besar. Contohnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua dan Papua Barat pada 2019, masing-masing hanya 60,84 dan 64,70. Angka itu lebih rendah dari IPM Indonesia yang mencapai 71,92. Sampai sekarang angka kemiskinan di Papua masih terbesar, yakni sekitar 21%. Ekonomi orang Papua juga sangat buruk. Layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masih minim.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengakui, ada dugaan korupsi dana Otsus yang dilakukan elit di Papua. "Dana untuk Papua besar sekali, tetapi dikorupsi elitnya di sana. Rakyat tidak mendapat apa-apa," kata Mahfud dalam keterangan yang diunggah di akun YouTube resmi Polhukam RI, pada pertengahan Desember 2020 silam. Mahfud mengakui tengah mencari formula terbaik agar dana Otsus bisa benar-benar menetes hingga ke lapisan terbawah masyarakat Papua.

Di sisi lain, banyak kalangan yang meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit dana Otsus Papua. Kepala daerah sebagai kuasa anggaran harus bertanggungjawab atas indikasi penyalahgunaan dana tersebut. Evaluasi terhadap Otsus Papua perlu dilakukan secara komprehensif.

Praktik Otsus di lapangan tak semanis dalam UU. LSM dan Ormas yang selama ini peduli dengan Papua menilai kesenjangan masih tinggi, serta kerap terjadi pelanggaran HAM. Persoalannya bukan besar sedikitnya dana Otsus. Tetapi begitu banyak polemik persoalan di Papua yang harus diselesaikan secara tuntas. Otsus bukanlah solusi untuk menyelesaikan konflik dan segala bentuk pelanggaran HAM di Papua.

Konflik antara militer dengan sekelompok



Komarudin Watubun

warga yang dicap sebagai teroris sudah terjadi lebih dari 50 tahun di Papua. Berbagai pendekatan sudah diupayakan untuk meredam gejolak di Papua. Kebanyakan menggunakan pendekatan keamanan. Periode kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, K.H Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono pernah mencoba pendekatan damai. Namun, perdamaian tidak terwujud di tanah Papua. Begitu juga dengan periode Presiden Joko Widodo. Selain menggunakan pendekatan pembangunan, juga masih mengandalkan pendekatan militer.

Papua selalu bergejolak karena adanya kebutuhan dasar warga asli Papua yang tidak terpenuhi, baik sandang, pangan, maupun papan. Juga pendidikan dan kesehatan. LIPI menyebut ada beberapa akar



Mahfud MD

masalah konflik kekerasan di Papua. Pertama, diskriminasi terhadap warga asli Papua. Kedua, proyek pembangunan mercusuar gagal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Papua, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat.

Selain persoalan integrasi Papua ke Indonesia, ada persoalan lain, yakni problem investasi di tanah Papua yang tidak dirasakan warga. Keberadaan perusahaan tambang Freeport hingga perusahaan perkebunan sawit menimbulkan konflik lantaran menutup peran warga sekitar. Warga asli Papua hanya menjadi penonton. Warga asli Papua merasa tanahnya seolah dijajah.

Persoalan lainnya adalah bisnis, politik dan keamanan di Papua. Proyek yang dikerjakan pemerintah lebih banyak melibatkan orang luar Papua. Belum lagi bisnis ilegal di sana. Komnas HAM menemukan bisnis ilegal dimiliki petinggi di Jakarta. Kekayaan alam, seperti emas, batubara, hingga hutan dan laut dikeruk. Ini membuat warga Papua marah.

Kondisi ini dimanfaatkan oleh Gerakan Papua Merdeka atau gerakan separatis dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Mereka menembaki pekerja infrastruktur, tenaga medis, dan guru, agar pembangunan tidak berjalan. Kelompok ini mengganggu masyarakat dan program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Kelompok bersenjata ini mendoktrin masyarakat Papua.

Maka, militer hadir di tanah Papua untuk menjaga keamanan dan ketertiban dari ancaman kelompok separatis teroris maupun OPM. Kehadiran Polri di Papua mendukung Operasi Nemangkawi. Sasarannya adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dianggap membuat resah masyarakat.

Pendekatan keamanan memang perlu untuk wilayah zona merah demi melindungi marwah pemerintah dan agar kelompok separatis tidak leluasa melakukan aksi teror. Jika keamanan lengah, kelompok bersenjata ini sengaja melukai warga sipil dan militer.

Namun, sisi lainnya, konflik tak berujung di Papua lantaran pendekatan yang dipakai adalah kekuatan senjata. Permasalahan politik pasti tidak pernah selesai dengan senjata. Masalah politik diselesaikan dengan langkah politik. Senjata tidak bisa menyelesaikan masalah. □

BSC



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI

Perlu Penyelesaian Masalah Papua Secara Kemanusiaan

KELOMPOK Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua masih melakukan aksi teror. Pada Selasa, 26 Oktober 2021, terjadi kontak senjata antara TNI – Polri dengan KKB di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Dalam insiden ini dua warga sipil yang masih balita tertembak, satu di antaranya meninggal dunia. Insiden tersebut terjadi karena KKB selalu menggunakan warga sipil sebagai tameng.

“Kedua anak tersebut mengalami luka terkena serpihan tembak. Satu meninggal dunia dan satu terkena tembakan di punggung belakang,” kata Kabid Humas Polda Papua Kombes AM Kamal dalam keterangannya, Kamis, 28 Oktober 2021. Dalam sepekan terakhir, Kabupaten Intan Jaya memanas. Kontak senjata antara TNI – Polri dengan KKB sering terjadi. Selain kontak senjata, KKB juga membakar ambulans, tangki air, dan rumah warga di Bandara Bilogai Sugapa, Distrik Sugapa.

Konflik bersenjata antara TNI – Polri dengan gerakan separatis di Papua sudah berlangsung sejak lama. Bahkan peme-

rintah pernah menetapkan Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) untuk menghadapi gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sekarang, TNI - Polri menghadapi KKB yang sebenarnya masih berkaitan dengan gerakan OPM. Itu sebabnya pemerintah menetapkan KKB sebagai teroris separatis.

Bagaimana penyelesaian gangguan keamanan yang tidak berkesudahan di Papua, Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Fadel Muhammad. Berikut petikan wawancara dengan Wakil Ketua MPR dari Kelompok DPD ini.

Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua pada 2 Oktober – 15 Oktober 2021 berjalan lancar dan aman. PON berlangsung tanpa gangguan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Namun, setelah PON usai, terjadi kontak senjata antara TNI – Polri dengan KKB di Kabupaten Intan Jaya. KKB juga masih melakukan teror yang mengancam aparat dan masyarakat

sipil. Bagaimana Bapak melihat situasi ini (masih terjadinya gangguan keamanan) di Papua?

Begini ya, menurut saya, penyelenggaraan PON itu bagus untuk meningkatkan prestasi olahraga di tanah air. Apalagi PON kemarin (PON XX pada 2 Oktober – 15 Oktober 2021) diselenggarakan di Papua. Kita mengetahui bahwa aksi kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) masih ada. Karena itu, penyelenggaraan PON di Papua itu merupakan langkah berani dari Presiden Joko Widodo. Saya melihat penyelenggaraan PON di Papua ini merupakan strategi yang bagus.

Kenapa? Karena dengan penyelenggaraan PON di Papua itu maka kita menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih baik-baik saja. Persatuan dan kesatuan Indonesia pun baik-baik saja. Ini terbukti dengan penyelenggaraan kegiatan PON yang melibatkan atlet dari seluruh wilayah Indonesia. Ternyata, PON berhasil terlaksana sukses tanpa ada gangguan keamanan sedikit pun dari KKB.

Selama ini aksi kekerasan bersenjata di Papua itu memang masalah. Aksi kekerasan yang dilakukan KKB menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak. Ini tentu membuat kita marah. Pemerintah memang harus melakukan tindakan tegas. Tindakan tegas itu untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa menerima aksi separatis.

Namun, saya rasa harus ada solusi lain untuk menuntaskan masalah (kekerasan di Papua) itu, yakni dengan melakukan cara kemanusiaan. Rangkullah mereka (kelompok separatistis itu). Perlakukan mereka seperti anak sendiri. Saya rasa lambat laun mereka akan menyerah sendiri. Intinya pemerintah perlu merangkul kelompok-kelompok tersebut.

Pemerintah telah menetapkan KKB di Papua sebagai kelompok teroris. Menurut Bapak, apakah KKB itu memang

pemerintah perlu menegakkan kedaulatan di Papua?

Tentu saja keberadaan kelompok ini (KKB) di Papua mengganggu kedaulatan Indonesia. Apalagi mereka melakukan kekerasan bersenjata dan mengibarkan bendera sendiri di wilayah Republik Indonesia. Hal itu sangat mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia. Tujuan kelompok separatistis itu adalah untuk mengubah negara atau merongrong negara kita. Tentu kita punya aturan perundang-undangan untuk menentukan sikap kita terhadap kelompok ini.

Papua seringkali bergejolak. Konflik bersenjata antara TNI dengan kelompok separatistis di Papua sudah berlangsung puluhan tahun. Padahal pemerintah sudah melakukan pendekatan pembangunan di Papua dengan UU Otonomi

yang selalu terjadi di Papua?

Pemerintah harus menerapkan hukum di sana. Jika mereka melakukan kekerasan ya harus dihukum. Tindakan hukum itu harus dibarengi dengan tindakan kemanusiaan. Rangkullah kelompok-kelompok itu lalu ajak bicara dan dialog. Laksanakan juga pemahaman nilai-nilai luhur yang ada dalam Empat Pilar MPR. Karena di dalamnya (Empat Pilar MPR) dengan tegas disebutkan soal keadilan sosial. Keadilan bukan hanya Papua saja, tetapi daerah lain juga perlu mendapat perhatian dari sisi keadilan dalam segala bidang.

Terkait dengan kedaulatan Indonesia di Papua, menurut Bapak, bagaimana kita menjaga kedaulatan Indonesia di Papua?

Seperti sudah saya katakan tadi, menjaga kedaulatan Indonesia di Papua adalah



terkait dengan gerakan separatistis di Papua atau hanya sekadar melakukan teror dan gangguan keamanan saja?

Kalau memang kelompok tersebut sudah melawan negara dan ingin memisahkan diri dari NKRI maka artinya menjadi kelompok separatistis. Tapi, saya melihat mereka awalnya adalah sekelompok masyarakat yang merasa tidak puas dengan negara ini. Karena itu, pemerintah harus mencari akar masalahnya, kemudian mencari solusi yang terbaik. Menurut saya, caranya dengan merangkul mereka dan memberi pengertian kepada mereka.

Jika dikatakan sebagai kelompok separatistis yang ingin memisahkan diri dari NKRI, dengan demikian keberadaan kelompok ini sudah mengganggu kedaulatan RI di Papua? Karena itu

Khusus Papua. Bahkan, dana yang dikucurkan pemerintah untuk Otsus Papua sudah triliunan rupiah. Mengapa masih terjadi tindak konflik senjata dan tindak kekerasan di Papua?

Sebenarnya persoalan yang terjadi di Papua hanya karena adanya aksi segelintir pihak atau kelompok saja, bukan semua rakyat Papua. Mereka sebenarnya merasa tidak puas terhadap pemerintah Indonesia, namun disalurkan dengan cara yang salah, yaitu melalui kekuatan senjata. Rakyat Papua sendiri sebenarnya banyak yang tidak mengerti. Kebanyakan rakyat Papua hanya didoktrin, dipengaruhi, dan diperalat oleh pihak-pihak yang berkepentingan di tanah Papua yang kaya raya itu.

Lalu, menurut Bapak, bagaimana jalan keluar untuk mengatasi gejala

dengan melaksanakan keadilan secara tepat dan berimbang. Terapkan keadilan di seluruh Papua dan seluruh wilayah Indonesia. Jalankan peraturan perundang-undangan secara tegas dan tepat.

Apa yang bisa dilakukan lembaga MPR berkaitan dengan masalah yang terjadi di Papua?

Kami di MPR mendorong segala upaya penyelesaian masalah yang menghasilkan solusi yang terbaik untuk semua, baik untuk pemerintah, untuk rakyat Papua, dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kewenangan dan tugas MPR maka Empat Pilar MPR perlu diterapkan dan diimplementasikan dengan benar di Papua. Jangan ada lagi yang merasa tidak mendapat keadilan dan merasa tidak puas sebagai warga negara. □

Terima Dubes Australia untuk Indonesia

Bamsoet **Dorong** Peningkatan Kerjasama Bilateral



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Selain kerjasama di bidang politik dan pertahanan, Indonesia dan Australia juga memiliki kerjasama di bidang ekonomi, yang diimplementasikan melalui IA CEPA (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership*).

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menekankan, kerjasama Australia-UK-US (AUKUS) yang diumumkan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 15 September 2021, jangan sampai meningkatkan ketegangan di kawasan Indo Pasifik khususnya maupun dunia pada umumnya. AUKUS yang fokus pada peningkatan kapasitas Angkatan Laut Australia (RAN) selama 18 bulan di bidang pembuatan kapal selam bertenaga nuklir serta ‘*additional undersea capabilities*’, jangan sampai mendorong berkembangnya perlombaan senjata dan meningkatkan tren ‘pamer’ kekuatan militer antar berbagai negara dunia.

“Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams, menjelaskan, *propeller* kapal selam yang ditingkatkan Australia melalui AUKUS menggunakan kekuatan nuklir, bukan kapal selam yang akan membawa senjata nuklir. AUKUS bukanlah sebuah perjanjian (*treaty*) atau pakta (*pact*), tetapi pengelolaan keamanan (*security arrangement*). Sehingga, AUKUS bukanlah untuk membangun kemampuan nuklir sipil. Australia tetap mendukung perjanjian non-proliferasi nuklir, serta tetap berkomitmen menjaga perdamaian kawasan. Sebagai tetangga terdekat, kita sangat mengapresiasi komitmen tersebut, dan berharap bisa diimplementasikan dengan baik,” ujar Bamsoet usai menerima Duta Besar Penny Williams, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Senin (11/10/21).

Ketua DPR RI ke-20 dan Mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum & Keamanan DPR RI ini menjelaskan, Australia juga mendukung kedaulatan Indonesia, termasuk terhadap keberadaan Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mengingat hubungan kedua negara senantiasa dilandasi asas saling menghormati dan saling mendukung kedaulatan, kesatuan, kemerdekaan, dan integritas wilayah, sebagaimana tertuang dalam *Agreement between Australia and the Republic of Indonesia on the Framework for Security Cooperation/Lombok Treaty* yang ditandatangani pada 13 November 2006.

“Selain kerjasama di bidang politik dan pertahanan, kita juga memiliki kerjasama di bidang ekonomi, yang diimplementasikan melalui IA CEPA (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership*). Kerjasama ini diberlakukan pada 5 Juli 2020, untuk memperluas pasar produk Indonesia, kerja sama investasi dan penempatan tenaga kerja terampil Indonesia,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Keamanan, dan Pertahanan KADIN Indonesia ini juga menekankan pentingnya peningkatan ekspor sawit Indonesia ke Australia. Sekaligus menyoroti masih adanya beberapa hambatan perdagangan produk Indonesia ke Australia. Antara lain, hambatan non tarif, seperti tingginya standar karantina, tuduhan *dumping* untuk komoditas kertas dan baja, *failed products* yang dikenakan terhadap beberapa produk ekspor Indonesia ke



Australia, dan persyaratan *packaging* serta *labeling* lainnya. “Melalui IA-CEPA, kita harap berbagai hambatan tersebut bisa diatasi. Sekaligus meningkatkan investasi Australia di Indonesia,” harap Bamsuet.

Australia merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia. Di tahun 2018, jumlah

investasinya mencapai US\$ 597,43 juta yang tersebar di 1.066 proyek. Di tahun 2019 mencapai US\$ 348,27 juta yang tersebar di 1.378 proyek. Sementara di tahun 2020, investasinya tercatat mencapai US\$ 348,55 juta yang tersebar di 1.665 proyek. Sedangkan di Q1-Q2 2021, nilai investasinya tercatat

sudah mencapai US\$ 100,66 juta yang tersebar di 803 proyek. “Kita harap kedepannya jumlah tersebut bisa semakin ditingkatkan,” tandas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menyambut baik kehadiran kampus Monash University Indonesia di Green Office Park 9, Bumi Serpong Damai (BSD) City, Tangerang Selatan. Sebagai bentuk kerjasama peningkatan pendidikan antara Australia dengan Indonesia, yang dapat berkontribusi bagi peningkatan pembangunan sosial dan teknologi.

“Monash University Indonesia yang fokus pada empat jurusan di program pascasarjana, yakni Sains Data (*Data Science*), Kebijakan Publik (*Public Policy*), Desain Perkotaan (*Urban Design*) dan Inovasi Bisnis (*Business Innovation*), juga harus bisa bekerjasama dengan kampus negeri di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga ada kolaborasi antara kampus negeri dengan kampus asing, dalam meningkatkan mutu pendidikan dan hasil peserta didik Indonesia,” pungkas Bamsuet. □

FGD Tentang PPHN MPR RI

PPHN Bisa Dihadirkan Melalui Konsensus Politik

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara justru semakin melengkapi sempurnanya bangunan ketatanegaraan Indonesia, yaitu Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai haluan konstitusional negara, dan PPHN sebagai kebijakan dasar pembangunan negara.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

GURU Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Pertanian Bogor, Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, SE, MS, DEA, menilai, rencana hadirnya Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang hanya berbasis kepada visi presiden terpilih. Karenanya, rencana adanya PPHN yang sudah merupakan konsensus Parpol-Parpol dalam beberapa tahun terakhir sangat perlu didukung.

“Jika menghadirkan PPHN melalui amandemen dirasakan bisa menimbulkan kegaduhan politik, MPR RI sebenarnya bisa menghadirkan PPHN tanpa amandemen. Tapi melalui konsensus politik. Kita pernah punya pengalaman saat reformasi, konsensus politik menetapkan tidak boleh mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar, sehingga sampai amandemen keempat konstitusi, perubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar tak pernah dilakukan. Bagaimana teknisnya, mungkin para ahli

hukum tata negara bisa mengkajinya lebih jauh,” jelas Didin dalam *Focus Group Discussion (FGD)* MPR RI tentang PPHN, di *Press Room* MPR RI, Senin (11/10/21).

Turut hadir sebagai narasumber, antara lain Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Pendiri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Abdul Latief, Ketua Aliansi Kebangsaan dan Ketua Umum FKPPi Pontjo

Sutowo, serta Dr. Prasetyono Widjojo sebagai moderator diskusi.

Didin menerangkan, negara seperti Amerika Serikat dan juga beberapa negara Eropa tidak memiliki perencanaan jangka panjang dalam pembangunannya karena mereka bermazhab *market oriented*. Namun harus diingat, Amerika kini sudah akan disalip oleh Tiongkok, Korea Selatan, dan juga



Jepang, yang merupakan negara-negara yang memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang.

“Pada tahun 1950-an, Jepang bahkan sudah memiliki perencanaan pembangunan hingga 50 tahun ke depan. Begitupun dengan Tiongkok. Karenanya, keberadaan PPHN merupakan kemajuan dibandingkan dengan berdasarkan RPJMN yang hanya berbasis kepada visi Presiden terpilih. Sekaligus menjadi advokasi substansial tentang butuhnya haluan jangka panjang pembangunan sebagai konsekuensi dari Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat 1 yang berbunyi: Perekonomian ‘disusun’. Jadi

“Keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara ini justru semakin melengkapi sempurnanya bangunan ketatanegaraan Indonesia, yaitu Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai haluan konstitusional negara, dan PPHN sebagai kebijakan dasar pembangunan negara,” papar Bamsuet.

Ketua DPR RI ke-20 dan Mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum & Keamanan DPR RI ini menegaskan, pentingnya kehadiran haluan negara, berangkat dari sebuah kebutuhan akan hadirnya prinsip-prinsip yang bersifat direktif, yang akan menjabarkan prinsip-prinsip normatif dalam konstitusi

pemerintahan. Karena implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) didasarkan kepada visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum, maka masing-masing dapat memiliki visi dan misi yang berbeda dalam setiap periode pemerintahan,” urai Bamsuet.

Abdul Latief menjelaskan, urgensi PPHN bukanlah masalah setuju atau tidak setuju. Melainkan sudah menjadi keharusan. Karena keberadaan haluan negara, saat dirinya menjabat Menteri Tenaga Kerja (1993-1998), bisa melahirkan kebijakan upah minimum regional, tunjangan hari raya (THR),



bukan diserahkan semata kepada pasar bebas,” jelas Didin.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan, kehadiran PPHN tidak dimaksudkan untuk memperlemah konsensus dalam penguatan sistem presidensial. PPHN justru akan tetap disesuaikan dan memperkuat sistem presidensial dimana presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, serta presiden dan wakil presiden memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak dapat dijatuhkan hanya karena alasan politik.

Substansi PPHN hanya mengatur hal-hal yang bersifat filosofis dan turunan pertama dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dengan demikian, hadirnya PPHN sama sekali tidak akan mengurangi ruang dan kewenangan pemerintah untuk menyusun Cetak Biru pembangunan.

menjadi kebijakan dasar politik negara, sebagai panduan atau pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan nasional.

Setelah MPR tidak lagi memiliki wewenang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), kata Bamsuet lebih lanjut, fungsi GBHN digantikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

“Namun dalam implementasinya, berbagai peraturan perundang-undangan tersebut masih menyisakan beragam persoalan. Selain kecenderungan eksekutif sentris, dengan model sistem perencanaan pembangunan nasional yang demikian, memungkinkan RPJPN dilaksanakan secara tidak konsisten dalam setiap periode

hingga melahirkan Jamsostek. Bahkan, karena menyadari pentingnya haluan negara, ia sampai rela mengundurkan diri sebagai Wakil Badan Pekerja MPR RI, yang pada saat reformasi melakukan amandemen konstitusi untuk mencabut kewenangan MPR RI dalam merumuskan dan menetapkan haluan negara.

“Dari kecil kita sudah diajarkan orang tua tentang pentingnya memiliki perencanaan hidup. Begitupun dengan bangsa dan negara, sudah menjadi keharusan untuk memiliki perencanaan. Pada saat Bung Karno dikenal dengan Pembangunan Semesta Berencana. Presiden Soeharto meneruskan menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pada saat reformasi, perencanaan yang melibatkan partisipasi publik tersebut hilang. Tidak heran jika sampai saat ini kita seperti terlihat linglung,” pungkas Abdul Latief. □

Diskusi Publik Fraksi NasDem MPR

Amandemen UUD Mesti Melewati Kajian dan Uji Publik Secara Mendalam

Amandemen UUD harus berasal dari aspirasi dan berdampak baik untuk rakyat. Jangan sampai jadi permainan politik.



WAKIL Ketua MPR Dr. Lestari Moerdijat, SS., MM., mengatakan bahwa saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada gencarnya wacana amandemen kelima UUD NRI Tahun 1945. Banyak elemen masyarakat melalui berbagai media mendiskusikan dan membahas isu ini secara serius hingga banyak muncul perbedaan pendapat.

Lestari menegaskan, semestinya isu amandemen itu tidak sampai menimbulkan perbedaan pendapat yang tajam. Sebab, dalam negara demokrasi seperti Indonesia, perubahan sistem ketatanegaraan adalah suatu proses yang alamiah dan biasa saja. Yang perlu diperhatikan adalah perubahan tidak menjadi bola liar atau menjadi komoditas politik. Perubahan yang dilakukan harus berdampak baik untuk seluruh rakyat Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang biasa disapa Rerie ini saat hadir dalam acara Diskusi Publik tentang 'Urgensi Amandemen ke-lima UUD NRI Tahun 1945, Kepentingan Bangsa atau...?' diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Fraksi NasDem MPR, di *Ballroom* Novotel, Tangerang, Rabu (13/10/2021).

Turut hadir dalam acara yang digelar

secara fisik dan daring itu, Ketua Fraksi Partai NasDem MPR Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Sekretaris Fraksi H. Syarif Abdullah Alkadrie, SH., MH., anggota MPR Fraksi NasDem Drs. Fadholi M.I.Kom, serta para narasumber pakar antara lain, pelaku sejarah amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 Jakob Tobing, Ahli Tata Negara Pengajar STHI Jentera Bivitri Susanti, Ph.D., pakar Hukum Tata Negara Universitas Pasundan Dr. Atang Irawan, SH, M.Hum., dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, M.A., Ph.D.

Sebenarnya, lanjut Rerie, wacana amandemen UUD tersebut bukan wacana yang baru muncul. Namun sudah menjadi isu yang sudah lama dibahas oleh MPR periode lalu, kemudian diserahkan kepada MPR periode sekarang untuk dikaji lebih jauh. "Saya yakin, munculnya isu amandemen UUD yang dimulai dari MPR periode lalu itu berdasar kepada aspirasi rakyat dengan tujuan agar negara ini jauh lebih baik," ujarnya.

Namun, tambahnya, sebelum melakukan amandemen kembali perlu dipertimbangkan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil-





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

hasil amandemen yang sudah dilakukan sebelumnya. "Ini penting saya tekankan betul apakah kita sudah lakukan evaluasi. Sebab, dari evaluasi itu akan menentukan langkah-langkah yang harus disusun, jika amandemen ke-5 dilakukan," imbuhnya.

Pada intinya, Rerie mengingatkan bahwa

konstitusi yang menjadi tujuan amandemen adalah salah satu elemen utama berjalannya negara dan menjadi panduan rakyat dalam kehidupan bernegara, harus dilakukan secara penuh kehati-hatian. Hasilnya harus sesuai dengan keinginan rakyat.

"Menyikapi amandemen UUD, saya sendiri

dan Fraksi NasDem MPR berpendapat: pertama, wacana amandemen UUD mesti dilakukan kajian akademis secara mendalam dan menyeluruh terlebih dahulu. Kedua, buka akses seluas-seluasnya kepada rakyat agar rakyat bisa memberikan masukan dan pendapatnya untuk kemudian diolah di MPR," tegasnya.

Untuk mewujudkan hal itu, lanjut Rerie, Fraksi NasDem MPR melakukan berbagai upaya, antara lain melakukan uji publik melalui metode survei yang dilakukan oleh lembaga survei dan menggelar FGD dengan menggandeng para pakar, akademisi dan tokoh nasional.

"Hasilnya nanti sesegera mungkin akan kami sampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada partai agar ketum partai mengeluarkan keputusan mengenai amandemen ini. Keputusan itu akan menjadi dasar bagi kami selaku Pimpinan MPR dari Partai NasDem untuk mengambil sikap resmi," tandasnya. □

DER



PAW Anggota MPR RI

Bamsoet Ajak Anggota MPR Sosialisasikan Pentingnya PPHN

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menegaskan, pandangan yang menjadikan pemilihan langsung sebagai alasan hilangnya GBHN merupakan pemikiran yang simplistik, atau cenderung menyederhanakan persoalan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan reformasi konstitusi pada tahun 1999 sampai tahun 2002 menjadikan MPR tidak lagi memiliki wewenang untuk memilih presiden dan wakil presiden, karena presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Dengan demikian, presiden tidak lagi menerima mandat dari MPR, melainkan langsung dari rakyat. Pemilihan secara langsung tersebut yang oleh sebagian kalangan dijadikan alasan kuat untuk menghapus wewenang MPR dalam menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Argumentasi yang dibangun, melalui pemilihan langsung, calon presiden menawarkan visi, misi, serta program pemerintahannya kepada rakyat. Jika calon yang bersangkutan menang dalam pemilihan umum, maka visi, misi, serta program pemerintahannya akan menjadi acuan dalam menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun masa jabatan. Dengan demikian, maka tidak diperlukan lagi fungsi MPR untuk menetapkan GBHN, karena Presiden terpilih

telah memiliki visi, misi, dan program program pemerintahannya.

“Pandangan yang menjadikan pemilihan langsung sebagai alasan hilangnya GBHN merupakan pemikiran yang simplistik, atau cenderung menyederhanakan persoalan. Pemilihan langsung hanyalah bentuk sistem pemilihan presiden yang sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari wujud kedaulatan rakyat. Pemilik kedaulatan memiliki hak pula untuk merumuskan arah pem-

angunan nasionalnya,” ujar Bamsoet dalam pelantikan anggota MPR RI Ikbal Djabid dari Kelompok DPD daerah pemilihan Maluku Utara dan Nanang Sulaiman dari Kelompok DPD daerah pemilihan Kalimantan Timur, di Kompleks MPR, Jumat (22/10/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, di sinilah pentingnya MPR, karena hanya MPR lembaga representasi yang paling lengkap, yaitu terdiri atas representasi politik rakyat (DPR) dan representasi teritorial (DPD).





Dengan demikian menjadi jelas bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung sama sekali tidak terkait dengan pranata haluan negara yang secara ideal semestinya dibuat, ditetapkan, dan dilaksanakan oleh rakyat melalui lembaga perwakilannya.

“Sebagai tindak lanjut rekomendasi MPR masa jabatan 2009–2014 dan MPR masa jabatan 2014–2019, dan sebagai bentuk tanggung jawab MPR masa jabatan 2019–2024, saat ini MPR melalui Badan Pengkajian MPR sedang melaksanakan kajian terhadap

substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Saya mengajak kepada seluruh Anggota MPR, khususnya kepada Anggota MPR yang baru saja mengucapkan sumpah, untuk ikut berpartisipasi dalam kajian terhadap substansi dan bentuk hukum PPHN tersebut. Pikiran-pikiran yang bernas dari saudara dapat disampaikan kepada perwakilan kelompok DPD yang menjadi Anggota Badan Pengkajian MPR,” jelas Bamsuet.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini

menerangkan, selain aktif dalam pembahasan PPHN, seluruh Anggota MPR memiliki kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi Empat Pilar MPR kepada seluruh lapisan masyarakat. Dia berharap sosialisasi Empat Pilar MPR ini dilakukan secara sungguh-sungguh untuk membumikan nilai-nilai Empat Pilar MPR di tengah-tengah masyarakat, guna mewujudkan suatu karakter masyarakat dan sistem sosial yang berakar pada nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri, yang bersifat khas, unik, modern, dan unggul.

“Jati diri bangsa tersebut merupakan sintesis yang positif antara nilai-nilai luhur bangsa, seperti nilai religius, kebersamaan dan persatuan, toleransi, serta nilai modern yang universal yang mencakup etos kerja dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, jujur, dan profesional. Setiap anggota MPR RI harus bisa berkreasi mengembangkan metode sosialisasi, agar nilai-nilai Empat Pilar MPR bukan sekedar bahan untuk dihafal atau dimengerti saja, melainkan juga perlu diterima dan dihayati, dipraktikkan sebagai kebiasaan, bahkan dijadikan sifat yang menetap pada diri orang Indonesia,” pungkas Bamsuet. □



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dialog Kebangsaan Universitas Paramadina

Pemikiran Cak Nur Relevan untuk Kuatkan Moderasi Beragama

Wakil Ketua MPR, Dr. Ahmad Basarah, berharap, teologi inklusif yang disemai almarhum Prof. Dr. Nurcholish Madjid selama bertahun-tahun lewat Yayasan Paramadina yang dipimpinnya tak boleh berhenti.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

BERBICARA di depan mahasiswa Universitas Paramadina, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengungkapkan bahwa pemikiran almarhum Prof. Dr. Nurcholish Madjid telah memberikan sumbangsih besar dalam menguatkan moderasi beragama di Indonesia. Dia berpendapat, pemikiran guru bangsa yang akrab disapa Cak Nur itu masih relevan untuk disemai sampai kini.

“Cak Nur adalah salah seorang guru bangsa. Beliau bukan hanya guru untuk kalangan Islam, tapi juga buat bangsa. Saya adalah aktivis mahasiswa dari kelompok nasionalis, tapi saya dan kawan-kawan Kelompok Cipayang lainnya (HMI, PMKRI, GMNI, PMII dan PMII) berguru pada almarhum Cak Nur semasa hidupnya,” tegas Ahmad Basarah dalam Dialog Kebangsaan yang digelar oleh Universitas Paramadina bekerja sama dengan BPIP di Jakarta, Senin (18/10/2021).

Dalam dialog yang diselenggarakan secara virtual itu, Ahmad Basarah memberi apresiasi yang tinggi pada Universitas Paramadina yang terus konsisten menyemai pemikiran Cak Nur. “Rektor dan seluruh civitas akademika Universitas Paramadina tentu punya kewajiban moral untuk membentuk generasi muda yang moderat, yang cocok dengan keindonesiaan kita. Calon pemimpin masa depan harus terus menjaga moderasi agama dan moderasi kesukuan,” tandas Ahmad Basarah dalam Webinar berjudul “Pancasila dan Penyemaian Spirit Moderasi Beragama di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa di Indonesia” itu.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menambahkan, teologi inklusif yang disemai Cak Nur selama bertahun-tahun lewat Yayasan Paramadina yang dipimpinnya tak boleh berhenti. Ahmad Basarah menilai, lulusan Pondok Modern Gontor itu adalah tokoh pembaruan pemikiran Islam di Indo-

nesia yang populer dengan konsep ‘Universalisme Islam’.

“Konsep Universalisme Islam yang selalu disuarakan Cak Nur itu sangat mengakomodasi kebhinnekaan bangsa Indonesia. Di dalam konsep ini termuat seruan agar semua umat beragama, terutama umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia, bersikap toleran, menjunjung perdamaian, menghargai keberagaman, serta mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Inilah moderasi beragama itu,” tegas Ahmad Basarah di hadapan hampir 800 peserta Webinar.

Dalam Bahasa Arab, jelas pendiri sekaligus Sekretaris Dewan Penasihat Baitul Muslimin Indonesia ini, moderasi dikenal dengan kata “*wasath*” atau “*wassathiyyah*” yang berarti tengah-tengah, adil, dan berimbang. Dari sinilah moderasi beragama lalu dipahami sebagai cara beragama seseorang, yang selalu memilih jalan tengah,

tidak ekstrem, baik kanan maupun kiri, atau tidak berlebihan saat menjalani ajaran agamanya.

Dalam titik tertentu, lanjut Ahmad Basarah, moderasi pemikiran Cak Nur bisa dikatakan sejalan dengan moderasi pemikiran Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, serta para pendiri bangsa lainnya. Saat merumuskan Pancasila, tegas penulis buku "Bung Karno, Islam dan Pancasila" itu, para pendiri bangsa dari golongan Islam menunjukkan jiwa besar ketika mereka bersedia mengubah sila pertama dari semula berbunyi "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan

sekarang," tegas Ahmad Basarah.

Di bagian akhir, Ahmad Basarah berharap, pemikiran besar Cak Nur tentang kesadaran kebhinekaan Indonesia bisa dilanjutkan oleh pemuda dan mahasiswa saat ini, termasuk mahasiswa dan civitas akademika Universitas Paramadina. Jika dulu para pemuda Indonesia, termasuk mereka yang ikut dalam Sumpah Pemuda, berjuang melawan penjajah, Ahmad Basarah menilai tugas pemuda di era sekarang adalah mengisi dan mempertahankan apa yang sudah diperjuangkan pendiri bangsa dari ancaman disintegrasi dan deideologisasi Pancasila.

Pandangan Ketua DPP PDI Perjuangan



Yang Maha Esa."

"Jika frasa tujuh kata tersebut tetap dipertahankan, mereka yang bukan beragama Islam mempertanyakan, kenapa kami non muslim tidak mendapat tempat dalam dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang menjadi konstitusi kemerdekaan bangsa Indonesia? Mengapa kami tidak diberi tempat yang sama untuk beribadah sesuai keyakinan kami? Maka, ketika para ulama yang ikut merumuskan Pancasila berlapang dada menghapus tujuh kata yang dipersalkan itu demi menjaga keutuhan dan persatuan NKRI yang baru satu hari diproklamkan, di situlah sikap moderat mereka dalam beragama sangat terlihat. Sikap moderat para alim ulama pendiri bangsa itu harus ditiru oleh generasi

sejalan dengan pandangan Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik J. Rachbini. Menurut dia, sejak mendirikan Universitas Paramadina bersama kawan-kawannya yang aktif di Yayasan Paramadina, Cak Nur sudah menanamkan tiga pilar, yakni: keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan sebagai fondasi spiritual Universitas Paramadina.

"Sekarang ada 4.000 mahasiswa belajar di Universitas Paramadina. Kepada mereka sejak pertama kuliah sampai selesai selalu diperdengarkan keislaman yang sejuk, moderat, juga menghormati teman-teman mereka yang berbeda agama. Selama belajar di Paramadina, mereka harus mempraktikkan moderasi beragama yang semua itu sesuai dengan ideologi Pancasila," jelas Didik. □



Press Gathering **MPR 2021** di Bandung



Ma'ruf Cahyono



Sjarifuddin Hasan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

BIRO Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI bekerjasama sama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen, 22 – 24 Oktober 2021, menyelenggarakan kegiatan Press Gathering di Bandung, Jawa Barat. Ini adalah Press Gathering ke-dua untuk tahun 2021, diikuti oleh 90 orang wartawan dari berbagai media: online, cetak, televisi, dan radio yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP). Wakil Ketua MPR RI, Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., menyampaikan *keynote speech* sekaligus membuka secara resmi Press Gathering dalam suatu upacara di *Convention Center The Trans Luxury Hotel*, Jl. Gatot Subroto, Kota Bandung.

Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR, Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH., dalam laporannya menyatakan, press gathering adalah agenda rutin MPR, dan dilakukan tidak hanya oleh Setjen MPR, tapi DPR juga melakukan hal yang sama, begitu juga DPD. Ma'ruf berharap, kegiatan ini menjadi forum yang betul-betul gathering, menjadi forum untuk

membangun kebersamaan, meskipun dalam kebersamaan tentu ada hal-hal yang perlu dipahami bersama.

Acara press gathering ini dihadiri pula Wakil Ketua MPR, H. Arsul Sani, SH., MSi.; Anggota MPR Fraksi PKS, Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, M.Psi.T.; Anggota MPR Fraksi Demokrat, Siti Mufattahah, Psi, MBA.; Anggota MPR Fraksi PKB, H. Yanuar Prihatin, M.Si.; dan

Anggota MPR Fraksi PKB, Farida Hidayati, S.H., M.Kn.. Juga hadir Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR, Siti Fauziah, SE., MM.; Plt. Kepala Biro Pemberitaan Setjen DPR RI, Djoko Anggoro; Kepala Biro Protokol Humas dan Media Setjen DPD, Mahyu Darma; dan Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Marlen Erikson Sitompul.

Setelah acara pembukaan Press Gather-





ing dilanjutkan diskusi Empat Pilar dengan tema: 'Haluan Negara Sebagai Kaidah Penuntun Pembangunan Nasional.' Tampil sebagai narasumber adalah Wakil Ketua MPR Syarif Hasan, Wakil Ketua MPR Arsul Sani, Anggota MPR Fraksi PKB Yanuar Prihatin, dan Anggota MPR Fraksi PKS Hj. Ledia Hanifa Amalia.

Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH.

Sesjen MPR RI

Press Gathering Forum Membangun Kebersamaan

Sekretaris Jenderal MPR, Dr. Ma'ruf Cahyono, SH, MH, mengharapkan Press Gathering Pimpinan MPR dan Koordinariat Wartawan Parlemen menjadi forum untuk membangun kebersamaan. Dengan kebersamaan maka bisa tercapai pemahaman yang sama.

"Press Gathering ini agar menjadi forum yang benar-benar gathering. Jadi, forum untuk membangun kebersamaan.

Dengan kebersamaan maka ada hal-hal yang bisa dipahami bersama," kata Ma'ruf Cahyono di hadapa para wartawan yang tergabung dalam Koordinariat Wartawan Parlemen, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/10/2021).

Dalam laporannya, Ma'ruf Cahyono menjelaskan bahwa press gathering adalah kegiatan rutin yang dilakukan MPR.

Tidak hanya MPR, press gathering juga menjadi kegiatan rutin di DPR dan DPD. Ma'ruf menyebutkan, Press Gathering Pimpinan MPR dan Koordinariat Wartawan Parlemen ini diikuti sebanyak 90 insan media dari media cetak, online, dan elektronik. "Selama 25 tahun saya mengabdikan di MPR, saya merasakan insan-insan media ini sudah seperti saudara-saudara





saya,” tuturnya.

Terkait dengan hal-hal yang perlu pemahaman yang sama, Ma’ruf Cahyono menambahkan kegiatan press gathering ini diisi dengan diskusi bertema “Haluan Negara Sebagai Kaidah Penuntun Pembangunan Nasional”. “Tema diskusi cukup menarik. Ini adalah diskusi kebangsaan. Wartawan Parlemen di Senayan sudah terbiasa dengan diskusi kebangsaan. Mereka adalah insan-insan kebangsaan semua,” katanya.

Oleh karena itu, Ma’ruf Cahyono mengharapkan Pimpinan MPR dan anggota MPR bisa berdiskusi dan berinteraksi dengan wartawan parlemen terkait tema diskusi kebangsaan. Dia juga mengharapkan peran serta dari insan media untuk memberikan pandangannya terkait dengan tema diskusi kebangsaan. Sebab, insan media memiliki daya kritis dan bisa melihat berbagai aspek terkait tema diskusi ini.

“Dari diskusi kebangsaan ini maka kita akan semakin kaya dengan perspektif tentang tema ini. Kita harapkan peran serta dari insan media dengan pandangan-pandangannya. Karena mereka biasanya kritis dan bisa melihat berbagai aspek terkait tema ini,” kata Ma’ruf.

Ma’ruf mengharapkan, Pimpinan MPR dan Anggota MPR serta insan media dapat

memanfaatkan forum ini. Diskusi kebangsaan dalam press gathering ini, lanjut Ma’ruf, sesuai dengan tugas MPR sebagai lembaga yang menyerap aspirasi masyarakat. Wacana dan dinamika yang berkembang dalam diskusi ini merupakan bagian dari aspirasi masyarakat. “Ini bukanlah kesepakatan politik. Tetapi ini adalah bahan diskusi sehingga pembahasan bisa dilakukan dengan bebas,” ujarnya. □

BSC

Dr. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA.

Wakil Ketua MPR RI

Diskursus Masih Berkisar Payung Hukum

Wakil Ketua MPR RI Dr. H.Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., menilai, peran wartawan sangat esensial dan sangat utama dalam menjembatani pandangan yang disampaikan oleh stakeholder kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan sekaligus kira-kira alternatif atau pandangan-



Sjarifuddin Hasan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

pandangan yang sedang dilakukan pendalaman oleh MPR untuk disampaikan kembali kepada masyarakat.

Syarief Hasan, begitu politisi Partai Demokrat ini biasa disapa, menyampaikan hal itu hadapan 90 wartawan dari berbagai media yang sedang mengikuti acara Press Gathering yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Bandung, Sabtu (23/10/2021). Selaku pimpinan MPR, Syarief Hasan dalam kesempatan itu menyampaikan *keynote speech* dan sekaligus membuka acara Press Gathering tersebut.

Lebih lanjut, Syarief Hasan mengemukakan, fungsi dan tugas yang dibebankan kepada wartawan akan mengalami pembiasaan manakala pesan yang disampaikan tidak sampai secara utuh. “Jika komunikasi tidak utuh atau pun sedikit saja mengalami pembiasaan maka tentu pesan tersebut tidak akan sampai secara utuh,” ujarnya.

Begitu juga dengan saran-saran atau pandangan-pandangan yang disampaikan oleh para stakeholder kepada MPR, bila tidak disampaikan secara utuh oleh wartawan maka juga akan terjadi pembiasaan. “Jadi, saya ingin menyampaikan kembali bahwa begitu pentingnya fungsi dan tugas seorang wartawan,” papar Syarief Hasan, yang dalam acara press gathering ini juga tampil sebagai narasumber diskusi bertema: “Haluan Negara sebagai Kaidah Penuntun Pembangunan Nasional.”

Berbicara haluan negara dan berbicara

tentang pembangunan nasional adalah dua hal penting sangat berkaitan. Indonesia memang membutuhkan satu konsep bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Untuk membangun Indonesia ke depan hal yang patut menjadi komitmen kita bersama adalah kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. “Kepentingan partai harus menjadi nomor kesekian, kepentingan golongan juga nomor kesekian, apalagi nama kepentingan individu,” katanya.

“Artinya apa, pemimpin yang diberikan amanah oleh rakyat harus menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan segala-galanya. Tanpa komitmen itu saya pikir agak sulit juga kita

membuat suatu perencanaan, apalagi kalau perencanaan itu tidak mengikat, ini yang menjadi masalah,” kata Syarief Hasan.

Bahwa haluan negara yang dibutuhkan oleh negara kita itu, menurut Syarief Hasan, tentunya akan lebih banyak positifnya. “Saya fikir hampir dapat dipastikan semua kita setuju dengan adanya haluan negara bagi bangsa kita. Karena setiap warga negara menginginkan negara saya ini 10 tahun akan datang akan seperti apa, 25 tahun ke depan akan seperti apa, atau 100 tahun kedepan seperti apa,” katanya.

Hanya saja, lanjut Syarief Hasan, yang menjadi diskursus di negara kita sekarang ini adalah untuk memayungi daripada haluan



negara itu ditempatkan di mana. “Itu yang menjadi inti persoalan sekarang,” tandasnya. Ada dua pandangan tentang hal ini, yaitu pertama cukup dengan undang-undang, dan kedua payung hukumnya Ketetapan MPR.

Ada pandangan yang mengatakan, berdasarkan pengalaman yang pernah kita lakukan dan masih berlangsung sampai sekarang adalah pembangunan nasional yang dilakukan cukup dengan undang-undang. Tapi, kalau payung hukum haluan negara dimasukkan ke dalam konstitusi maka akan banyak terjadi pergeseran ketatanegaraan. “Itu menjadi semakin menarik, karena sistem ketatanegaraan kita sudah final bahwa presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat,” jelas Syarif Hasan.

Jadi, menurut Syarif Hasan, yang menjadi diskursus di negara kita sekarang ini adalah payung hukum daripada haluan negara itu ditempatkan dimana. □

SCH

Arsul Sani, SH., MH.

Wakil Ketua MPR RI

Pro Kontra PPHN Perlu Dibuat Matrik

Di akhir tahun 2021, MPR menggelar Press Gathering. Kegiatan yang diikuti oleh para wartawan yang terhimpun dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen itu digelar di Kota Bandung, Jawa Barat, 22 hingga 24 Oktober 2021. Salah rangkaian acara Press Gathering kali ini adalah Diskusi Empat Pilar dengan tema: Haluan Negara Sebagai Kaidah Penuntun Pembangunan Nasional.

Arsul Sani, sebagai salah seorang narasumber menyatakan, selama satu tahun lebih MPR telah mewacanakan mengenai Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN). Dengan berbagai metode, MPR menyosialisasikan wacana PPHN ke seluruh lapisan masyarakat. “Setelah menggelinding dilontarkan oleh MPR, kita mendapat berbagai respon dari masyarakat. “Dari akademisi, penggiat konstitusi, LSM, aktivis demokrasi, dan elemen masyarakat yang lainnya,” ungkapnya.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dari berbagai macam respon, menurut pria asal Jawa Tengah itu, ada yang positif, ada pula yang negatif, ada yang pro, ada pula yang kontra. Dari berbagai macam respon, Arsul Sani mengusulkan agar alasan-alasan yang dikemukakan oleh masyarakat, baik yang positif maupun negatif, dibuat matrik. “Matrik pro dan kontra,” ujar politisi senior PPP itu.

Dalam matrik tersebut, menurut Arsul Sani, kita bisa melihat bila ada yang mendukung, alasannya apa. Begitu juga yang menolak, argumentasinya kenapa. “Ini perlu agar diskursus di ruang publik menjadi jelas,” paparnya. Bila matrik terlihat maka MPR tidak perlu lagi bolak-balik menjelaskan PPHN itu

perlu.

Selanjutnya dia mengungkapkan, kalau dilihat dari kekuatan politik, semua kekuatan politik yang ada di MPR sepakat PPHN itu perlu. Tapi, yang belum bulat atau sepakat, menurut Arsul Sani, adalah wadahnya apa. “Meski sudah sepakat haluan negara itu baru dokumennya bernama PPHN, tetapi isinya apa belum ada kesepakatan atau kebulatan,” ungkapnya.

Dia mengibaratkan, PPHN itu dengan sepeda motor namun kekuatan mesin, warna, bahan bakar, dan spesifikasi lainnya apa, itu belum ada yang tahu. Ke depan, tahun 2022, Arsul Sani berharap MPR mempunyai kewajiban untuk mengurai



Arsul Sani



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

berapa kekuatan mesin, warna, bahan bakar, dan spesifikasi lainnya dari sepeda motor itu. “Sehingga perdebatan yang terjadi tidak lagi berputar pro dan kontra soal PPHN,” paparnya.

Masyarakat yang keberatan terhadap adanya PPHN, menurut Arsul Sani, karena ada pikiran memerlukan amandemen UUD. “Nah, bila ada amandemen masyarakat curiga nanti akan ada agenda lain yang disepakati”, ungkapnya. Agenda lain itu misalnya seperti keinginan kembali ke UUD Tahun 1945 atau memperpanjang periode masa jabatan Presiden.

Menanggapi hal yang demikian, Arsul Sani menjelaskan bahwa amandemen UUD berbeda dengan perubahan undang-undang (UU). “Perubahan UU bisa saja tak

perlu naskah akademik,” tuturnya. Namun, kalau amandemen UUD itu memerlukan ketentuan yang harus dipenuhi seperti syarat jumlah pengusul dan apa yang hendak diamandemen atau diubah harus disertai dengan alasan. “Alasan itu harus diajukan lebih dahulu,” ujarnya. “Apa-apa yang ingin diubah harus menjadi diskursus publik,” tambahnya.

Dari syarat dan ketentuan bagaimana amandemen itu bisa terjadi maka, menurut Arsul Sani, mengubah UUD tak bisa dilakukan sembarangan. “Bila diubah secara sembarangan, hal demikian merupakan tindakan inskonstitusional,” tegasnya.

Lebih lanjut Arsul Sani mengatakan, bila kita kemudian mau amandemen terbatas hanya mengubah Pasal 3 UUD NRI Tahun

1945, untuk menambahkan kewenangan MPR menetapkan PPHN itu, lalu mengapa kalau kewenangan itu tidak punya dampak apa-apa dalam sistem presidensial kita. Saat ini Presiden bisa diimpeach kalau melanggar UUD dan melakukan perbuatan tercela. “Dalam soal PPHN seharusnya juga demikian,” ujarnya. “Kalau pasal itu nggak ditambahkan lalu buat apa amandemen,” tambahnya. Dikatakan, apa manfaatnya bila membuat sebuah dokumen yang tidak ada konsekuensi konstitusionalnya.

Arsul Sani menegaskan, PPHN adalah haluan negara bukan haluan pemerintah, sehingga dari pengertian ini apa yang ada di haluan negara tak hanya dijalankan oleh Presiden tetapi juga oleh lembaga negara lainnya. □

AWG



Yanuar Prihatin

Anggota MPR F-PKB

Minta Agar GBHN dan RPJPN Dijadikan Referensi

Anggota MPR Fraksi PKB, Yanuar Prihatin, mengungkapkan bahwa wacana munculnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang saat ini masih hangat menjadi perbincangan publik, mesti disikapi dengan penuh kehati-hatian. Yanuar merasa, selama ini pembahasan soal PPHN seperti menghadapi tembok yang tebal, kuat, dan sangat tinggi.

“Yang saya lihat, pembahasan soal PPHN banyak menemui kebuntuan, karena hanya



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

mengupas kulit luarnya. Semestinya, harus didalam ruang lingkupnya, pengaturannya seperti apa, dan substansinya bagaimana. Artinya, sangat tidak mudah mengelola wacana besar yang akan memengaruhi sistem ketatanegaraan Indonesia ini," katanya.

Ada beberapa aspek, lanjut Yanuar, yang perlu diperhatikan dalam pembahasan PPHN, yakni aspek makro politik dan aspek stabilitas nasional. Ini harus dijaga betul, sebab ketika

bola PPHN menggelinding, yang menggiring dan menendang bola bisa saja bukan hanya pemain. Tapi, dalam keadaan tertentu dan ada kesempatan, dikhawatirkan penonton dan wasit juga akan ikut menendang bola.

Hal tersebut disampaikan, dalam diskusi bertema 'Haluan Negara Sebagai Kaidah Penuntun Pembangunan Nasional', di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (23/10/2021). "Saya sendiri tidak tahu bagaimana cara kita menerobos itu kebuntuan

ini. Tapi, ada satu hal yang bisa membangkitkan optimisme kita terkait PPHN ini, yakni secara historis bangsa ini pernah memiliki dan merasakannya di masa orde baru, yaitu GBHN yang kemudian diubah di era reformasi menjadi RPJPN dan RPJMN. Saya kira itu bisa dijadikan referensi," ujarnya.

Ledia Hanifa Amaliah, S.Si, MPsi. T.

Anggota MPR F-PKS

Dalam kesempatan yang sama, Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan bahwa pembahasan soal PPHN ini sudah lama bergulir. Hal ini berangkat dari perlunya negara ini memiliki arah yang jelas dalam rencana pembangunan nasionalnya.

"Jika pada saat ini bangsa ini mengangkat dan mengkaji soal perlunya muncul PPHN maka pertanyaannya adalah model PPHN yang seperti apa. Sebab, sebenarnya negara ini sudah memiliki perencanaan pembangunan nasionalnya, yakni GBHN pada masa Orde Baru dan pada era reformasi dengan RPJPN," katanya.

RPJPN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 2005 sampai dengan 2025, dibentuk melalui UU No.17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Jadi, saat ini masih berlaku.

Jika memang PPHN dihadirkan maka apa yang tertulis di sana mesti jelas, apa yang mau diarahkan dan apa yang mau dicapai. Seperti, kemana tujuan pendidikan kita, sistem kesehatan kita, dan lainnya, karena itu adalah garis besar di dalam Pembukaan UUD negara kita dan tujuan bernegara kita, fokusnya ada di situ, sehingga ini menjadi bagian yang sangat penting.

Jadi, menurut Ledia, betul negara kita perlu punya arah. Melalui PPHN, bangsa ini jadi punya perencanaan yang harus dilaksanakan. "Selain itu, perlu didiskusikan dan dikaji lebih mendalam lagi, apa yang nanti jadi payung hukumnya beserta turunannya," pungkasnya. □

DER



Netizen Gathering

Siti Fauziah Perkenalkan Buku Digital MPR

MPR mulai melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan format digital. Dengan demikian, pesan-pesan dari MPR bisa masuk ke kalangan milenial.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KEPALA Biro Humas dan Sistem Informasi MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM., memperkenalkan platform Buku Digital MPR yang bisa didownload dari Google Play Store. Platform ini berisi semua informasi tentang MPR seperti berita kegiatan Pimpinan dan Anggota MPR, majalah *Majelis*, jurnal, procliding, hasil kajian, dan hasil serap aspirasi masyarakat.

“Jangan lupa untuk men-download aplikasi atau platform Buku Digital MPR ini di Google Play Store Google,” pinta Siti Fauziah kepada peserta Netizen Gathering yang diselenggarakan MPR dengan tema “Semangat Juang NKRI,

Penguatan Pilar Kebangsaan di Era Digital”, di Cianjur, Jawa Barat, Selasa (26/10/2021). Kegiatan ini menghadirkan narasumber Sekretaris Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz.

Siti Fauziah mengungkapkan, platform Buku Digital MPR baru saja diapprove oleh Google. “Biro Humas sedang membuat Buku Digital MPR. Tadi pagi sudah mendapat konfirmasi dari Google. Buku Digital MPR sudah di-approve Google sehingga sudah bisa didownload. Platformnya masih di Android. Jadi bisa didownload di Google Play Store,” jelasnya.

Buku Digital ini berisi informasi atau berita kegiatan Pimpinan dan Anggota MPR, majalah terbitan MPR, jurnal, procliding, hasil kajian, dan hasil penyerapan aspirasi masyarakat. Platform Buku Digital MPR ini sedang disempurnakan sehingga bisa dibaca secara offline. “Jadi tidak harus online, karena Buku Digital MPR bisa dibaca secara offline. Dan, bisa diberikan komentar, kritik, dan masukan,” paparnya.

Ke depan, lanjut Siti Fauziah, MPR sedang menyiapkan publikasi MPR yang dilakukan dengan One Stop Service. “Semuanya ada dalam satu platform. Semua informasi MPR, baik berita, majalah, sampai TV ada dalam satu platform dan bisa dilihat dari handphone,” katanya.

Siti Fauziah menambahkan, MPR sedang memulai era digitalisasi dalam sosialisasi Empat Pilar MPR. Siti Fauziah mencontohkan MPR menayangkan layanan iklan masyarakat di Commuter Line. Begitu juga ada iklan layanan masyarakat dan pesan-pesan MPR ketika akan membuka akses Kereta Api Indonesia (KAI). “Jadi, MPR juga tidak mau monoton dalam sosialisasi Empat Pilar MPR tetapi juga dilakukan secara digital,” ujarnya.

Menurut Siti Fauziah, masyarakat saat ini sudah memasuki era digitalisasi sesuai perkembangan zaman. Era digitalisasi tidak bisa dielakkan. Media cetak seperti koran dan majalah sudah dalam bentuk digital (e-paper). Apalagi kalangan milenial sudah akrab dengan gadget dan digital.

“Kita di MPR juga sudah melakukan digitalisasi. Sosialisasi Empat Pilar MPR dilakukan dengan format digital. Kita ingin merangkul anak-anak milenial untuk sosialisasi Empat Pilar MPR. Dengan demikian, pesan-pesan dari MPR bisa masuk ke kalangan milenial,” harapnya.

Siti Fauziah juga meminta peserta Netizen Gathering untuk membuka website mpr.go.id. Website ini berisi informasi kegiatan, hasil kajian, majalah dan jurnal. “Silakan untuk membuka website mpr.go.id,” pintanya. □



Siapa Yang **Berhak** Menjadi Plt?

Pilkada serentak akan berlangsung pada 2024. Jabatan kepala daerah, mulai dari kabupaten, kota, dan provinsi, yang masa jabatannya berakhir sebelum 2024 akan menjadi lowong. Untuk mengisi kekosongan tersebut ada wacana untuk menempatkan personil dari TNI atau Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pejabat (Pj) kepala daerah. Berbagai pertanyaan tentang wacana itu pun mengemuka. Apakah langkah itu tidak membuat hilangnya profesionalisme TNI dan Polri? Apakah tidak menabrak undang-undang? Berikut ini pendapat wakil rakyat yang membidangi masalah tersebut.

Sukamta, Anggota MPR Fraksi PKS

Akan Rancu Menjadikan TNI-Polri Penjabat Kepala Daerah

MENURUT saya wacana dan rencana tersebut bisa rancu nantinya. Penjabat Kepala Daerah dari unsur TNI/Polri itu masih berstatus aktif sebagai prajurit. Masa TNI dan Polri jadi di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri? Apalagi sistem komando TNI bersifat terpusat, komando ada di tangan Panglima secara vertikal. Kan rancu jadinya kalau TNI jadi penjabat kepala daerah.

Pemerintah harus mampu menjelaskan apa latar belakang wacana tersebut. Apakah misalnya ada kondisi darurat perang? Pemerintah juga harus bisa merespon keinginan batin masyarakat secara tepat. Masyarakat ingin TNI/Polri jangan menjadi penjabat kepala daerah, meskipun sifatnya hanya sementara, sebagai pelaksana tugas (Plt). Mereka ingin supremasi sipil dan tidak ingin dwifungsi hidup kembali. Masyarakat ingin berperan serta dalam pesta demokrasi dalam Pemilu serentak. Yang namanya pesta ya senang dan bergembira, bukan dibayangkan ketakutan.

Memang TNI memiliki fungsi operasi militer selain perang (OMSP), tapi itu sifatnya membantu masyarakat dan aparaturnya yang ada, sesuai kebutuhan. Bukan dengan cara memberi jabatan kekuasaan yang nota bene adalah jabatan politik.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Saya tegaskan, wacana dan rencana tersebut tidak sejalan dengan UU TNI, UU Polri dan UU Pilkada. UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 47 (1) mengatur prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Polri pasal 27 (3) mengatur anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pasal 201 mengatur untuk mengisi ke-

kosongan jabatan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 2023, diangkat penjabat kepala daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah pada tahun 2024. Penjabat kepala daerah tersebut diambil dari jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama yang berlaku di jenjang karier aparatur sipil negara (ASN).

Karena itulah saya mendorong wacana pemerintah melibatkan TNI-Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah dibatalkan, kecuali jika mundur terlebih dahulu dari status TNI/Polri. Demi masa depan demokrasi kita. □

AWG

Arya Wedakarna, Anggota MPR Dari Kelompok DPD

Jangan Melabrak Aturan

TERKAIT dengan aturan Plt. Kepala Daerah telah diatur dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU Pilkada), yang pada pokoknya menentukan untuk Gubernur akan diisi oleh pejabat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, sedangkan untuk Bupati/Walikota akan diisi oleh pejabat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Oleh karena itu, sepanjang ketentuan UU Pilkada tidak dilanggar maka pengisian Plt. Kepala Daerah dari unsur TNI/Polri dapat dipertimbangkan, mengingat dalam UU Pilkada memberikan peluang untuk itu, terlebih dalam UU Pilkada tidak ditentukan secara khusus bahwa Plt. Kepala Daerah berasal dari ASN atau TNI/Polri tidak diperbolehkan menduduki jabatan tersebut.

Terkait dengan rencana melibatkan TNI/Polri dalam mengisi kekosongan Plt. Kepala Daerah haruslah dipikirkan secara matang, mengingat pengalaman Dwifungsi pada masa Orde Baru, yang mana terdapat pola kepemimpinan yang berbeda antara sipil dan TNI/Polri. Sehingga hal ini patut dipertimbangkan, karena Pj. untuk waktu yang lama bisa berbahaya bagi stabilitas dan kualitas pelayanan publik. Seperti yang kita ketahui bersama, pola kepemimpinan/komando yang melekat pada TNI/Polri berbeda dengan pola pelayanan



pada birokrat.

Kami percaya kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri akan memberikan arahan dan perintah tegas kepada Plt. Kepala Daerah agar bersikap netral dan tidak memihak pada salah satu pasangan calon Kepala Daerah. Sehingga pada saat penunjukan Plt tersebut harus transparan dan disampaikan ke publik, agar terciptanya keterbukaan dan demokrasi di masyarakat.

Pemerintah ingin mendudukkan TNI-Polri sebagai Plt Kepala Daerah, apakah karena kepentingan politis? Saya tidak masuk ke wilayah itu, yang penting DPD RI ingatkan jangan sampai melabrak aturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada telah ditentukan bahwa pada pokoknya untuk

Gubernur akan diisi oleh pejabat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, sedangkan untuk Bupati/Walikota akan diisi oleh pejabat dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Dengan demikian, pengisian pejabat Plt. Kepala Daerah baik dari unsur TNI/Polri atau ASN harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Pilkada.

Dalam hal ini unsur TNI/Polri dapat dipertimbangkan mengisi jabatan Plt. Kepala Daerah, khusus pada daerah-daerah rawan konflik, sedangkan untuk daerah lainnya pengisian jabatan Plt. Kepala Daerah dapat menunjuk Sekretaris Daerah (SEKDA), mengingat SEKDA memiliki peran penting dan mengetahui persis kondisi birokrasi di daerahnya. □

AWG

Universitas Mahendradatta

Di Bali, MPR Gelar Sarasehan Kehumasan

Civitas academica Universitas Mahendradatta, Denpasar, Bali, disapa MPR sebagai sahabat kebangsaan. Didorong bijak bermedia sosial untuk menangkal dan mencegah menyebarkan berita hoax.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

RATUSAN mahasiswa dari berbagai jurusan dan fakultas, dengan menggunakan baju batik, terlihat antri untuk membubuhkan tanda tangan kehadiran. Kehadiran mereka di Auditorium, Gedung Conefo, Universitas Mahendradatta, Kota Denpasar, Bali, 1 November 2021, untuk mengikuti 'Sarasehan Kehumasan MPR Tahun 2021, Menyapa Sahabat Kebangsaan'.

Hadir dalam kegiatan itu anggota MPR dari Kelompok DPD, Dr. SHRI I Gusti Arya Wedakarna, MWS III SE., (M.Tru)., MSi.; Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR, Siti Fauziah SE., MM.; Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Setjen MPR, Budi Muliawan SH., MH.; Rektor Universitas Mahendradatta, Dr. Puteri Anggeri, SE., MPd.; serta jajaran dekan dan dosen lainnya.

Di awal sambutan, Arya Wedakarna mengatakan, kehadiran MPR di Pulau

Dewata membawa banyak berkah dan harapan. "Ini merupakan kedua kalinya MPR hadir di Universitas Mahendradatta", tuturnya. Beberapa waktu lalu, Perpustakaan MPR hadir di kampus ini untuk menggelar Pustaka Akademik.

Kehadiran MPR di Universitas Mahendradatta, menurut Arya Wedakarna, merupakan bukti realisasi MoU dan MoA yang telah disepakati bersama. Dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh MPR akan memberi pengaruh positif bagi civitas akademika Uni-



I Gusti Arya Wedakarna

versitas Mahendradatta. “Untuk menjadi orang besar maka harus berkumpul dengan orang besar”, ujarnya.

Kehadiran MPR di Universitas Mahendradatta, menurut Arya Wedakarna, sangat istimewa sebab jarang ada perguruan tinggi di Bali yang kerap didatangi oleh lembaga negara ini. “Kegiatan-kegiatan yang dilakukan MPR memperkaya wawasan dan pengetahuan bagi civitas akademika,” ungkapnya.

Acara ‘Menyapa Sahabat Kebangsaan’ disebut oleh Arya Wedakarna sangat penting, sebab saat ini rasa persatuan dan kesatuan masyarakat mulai pudar sehingga perlu disentuh dengan nilai-nilai itu. Maraknya berita hoax disebut sebagai salah satu factor terjadinya disintegrasi bangsa. Untuk itu, dia mendukung ajakan MPR untuk bijak dalam

acara ‘Menyapa Sahabat Kebangsaan,’ menurut Arya Wedakarna sesuai dan selaras dengan nilai-nilai masyarakat Bali. Masyarakat Bali adalah masyarakat yang terbuka, bijak, gotong-royong menjadi keseharian, dan harmoni dengan alam. “Nilai-nilai itu perlu dirawat, dijaga, dan dilestarikan”, tuturnya. Untuk merawat nilai-nilai tersebut, acara seperti yang digelar oleh MPR inilah yang perlu dilakukan secara keberlanjutan. “Kita harap kegiatan yang dilakukan di Universitas Mahendradatta ini terus berlanjut”, ujarnya.

Rektor Universitas Mahendradatta, Dr. Putri Anggeri SE., MPd., mengatakan, kegiatan ini untuk mengingatkan generasi muda akan nilai-nilai kebangsaan, apalagi setelah bangsa ini memperingati Hari

Tidak hanya dalam bentuk elektrik dan digital dalam melayani masyarakat. MPR juga memiliki perpustakaan yang banyak koleksi buku dan dokumen penting. “Silahkan berkunjung ke Perpustakaan MPR setelah pandemi usai”, ucapnya.

Banyaknya layanan yang disampaikan dalam bentuk elektrik dan digital, menurut Siti Fauziah, merupakan bukti MPR mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi diakui mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. “Zaman sekarang semua informasi dan komunikasi serba cepat”, ujarnya. “Sekarang semua informasi bisa diakses lewat handphone”, tambahnya. Dari sinilah MPR menggunakan kemajuan teknologi informasi agar tidak ketinggalan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

bermedia sosial.

Berbagai media sosial dan elektronik yang dikelola oleh MPR, baik itu facebook, twitter, instagram, youtube, web, serta Buku Digital MPR diharap mampu menjadi sarana untuk membangun karakter bangsa. “Masyarakat saat ini tidak bisa lepas dari media sosial dan digital”, paparnya.

Untuk itu, ia merasa senang kegiatan ini digelar di perguruan tinggi yang pernah dipimpinnya. “Untuk mengingatkan kembali nilai-nilai kebangsaan”, tuturnya. Agar generasi muda terus meng-up date masalah-masalah kebangsaan. “Untuk itu saya mendukung apa yang dilakukan oleh MPR. Ini sangat penting,” paparnya.

Muatan-muatan yang disampaikan di

Sumpah Pemuda 28 Oktober. Dia berharap, kelak mahasiswa lulusan perguruan tinggi ini mengambil peran sesuai dengan keahlian masing-masing.

Dalam sambutannya, Siti Fauziah mengatakan, Biro Humas dan Sistem Informasi mempunyai media elektronik untuk menginformasikan berbagai kegiatan di MPR. MPR mempunyai web www.mpr.go.id. Tak hanya itu, Setjen MPR juga mengelola berbagai macam media sosial, seperti facebook, instagram, youtube, dan twitter. Lebih lanjut, belum lama ini diluncurkan aplikasi Buku Digital MPR. Aplikasi ini bisa diunduh. Dari unduhan tersebut, masyarakat bisa membaca segala berita dan kegiatan pimpinan dan anggota MPR.

aktualisasi.

Terkait kegiatan yang digelar pada siang menjelang sore itu, Siti Fauziah mengajak mahasiswa untuk menjadi sahabat. Sebab sebagai sahabat maka di antara keduanya ada saling terbuka untuk saling curhat atau menyampaikan aspirasi. “Di media-media sosial tadilah mahasiswa atau pemuda bisa menyampaikan aspirasinya”, ujarnya.

Budi Muliawan, SH., MH., menceritakan, 93 tahun yang lalu, para pemuda yang memiliki berbagai latar belakang suku dan agama berkumpul di Jakarta untuk menggelar Kongres II Pemuda tahun 1928. Apa yang dihasilkan dari kongres itu, menurut Budi Muliawan, adalah lahirnya gagasan yang monumental dan besar. “Sumpah Pemuda



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

yang dideklarasikan menjadi benih lahirnya bangsa Indonesia,” ujarnya. “Sebagai peristiswa yang monumental maka hari dideklarasikannya sumpah itu, setiap tahunnya kita peringati,” tambahnya.

Budi Muliawan menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara dalam diskusi yang bertema ‘Peran Pemuda Dalam Pembangunan’. Diskusi tersebut merupakan rangkaian acara ‘Sarasehan Kehumasan MPR Tahun 2021, Menyapa Sahabat Kebangsaan’.

Lebih lanjut, Budi Muliawan mengatakan, pada Kongres Pemuda II, peserta tidak hanya melakukan sumpah setia, namun meng-

umandangkan lagu gubahan WR Supratman yang berjudul Indonesia Raya. “Lagu Indonesia Raya sudah dikumandangkan pada kongres, padahal saat itu kita belum merdeka,” paparnya.

Sebelum para pemuda berkongres, lanjut Budi Muliawan, pada 1908 juga tumbuh organisasi kepemudaan, Budi Utomo. Organisasi itu mempunyai cita-cita untuk Indonesia merdeka. Dari semua yang dilakukan oleh para pemuda, sejak 1908, menunjukkan bahwa kaum ini merupakan agen perubahan. “Sehingga kita merdeka karena hasil perjuangan, bukan pemberian,” tuturnya.

Meski kita sudah merdeka, namun Budi Muliawan mengingatkan bahwa tantangan masa lalu dan masa sekarang ada persamaannya. Sejak dulu hingga sekarang tantangannya adalah kesejahteraan dan pendidikan yang belum merata. “Ini tugas bersama untuk mengatasinya,” ujarnya.

Tantangan yang dihadapi oleh bangsa, menurut alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, ini tak hanya soal tidak meratanya pendidikan dan kesejahteraan, namun juga sisi negatif dari kemajuan teknologi informasi. Dulu penyebaran informasi lewat media yang sifatnya cetakan, seperti koran dan majalah, sedangkan saat ini penyebaran informasi lewat media digital atau elektronik sehingga penyebarannya menjadi lebih cepat. “Apa yang terjadi di Jakarta saat ini bisa langsung diketahui di Bali,” tuturnya.

Nah, sisi negatif dari kemajuan teknologi yang disebarkan lewat media sosial adalah adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyebar berita hoax atau berita bohong. “Dulu disebut dengan kabar burung,” ujarnya. Agar berita hoax tidak masif, MPR mengajak mahasiswa Universitas Mahendradatta untuk menjadi sahabat kebangsaan untuk menangkal berita bohong atau hoax itu. “Kalau kita diam terhadap hoax maka berita bohong itu seolah-olah menjadi berita yang benar,” ungkapnya. Dengan mengajak mahasiswa menjadi sahabat kebangsaan maka ruang-ruang yang ada di media sosial akan diisi dengan sesuatu yang optimis dan benar.

I Made Mulyawan Subawa, SH., MKn., dosen Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta yang saat itu juga menjadi pembicara diskusi mengatakan, sejak tahun 1908, pemuda, mahasiswa, merupakan ujung tombak pergerakan. Pergerakan yang dilakukan oleh pemuda, kata Made Mulyawan, mampu membawa motor perubahan terjadi pada gerakan tahun 1908, 1928, 1945, 1966, dan 1998. Tantangan yang dihadapi oleh pemuda saat ini, menurut Made, ada tiga, yakni korupsi, ancaman perpecahan bangsa, dan berita hoax. □

AWG



Sejarah PON Indonesia



Ditolak Ikut Olimpiade Indonesia Gelar PON I di Solo

Sebagai bangsa yang baru merdeka, insan-insan olahraga di Indonesia menunjukkan kiprahnya. Lewat organisasi olahraga yang dibentuk mereka tak hanya memperjuangkan nama Indonesia, namun juga membina dan melatih atlet. Ditolak ikut Olimpiade London tak membuat insan olahraga padam semangatnya. Justru karena ditolak mengikuti Olimpiade 1948, dunia olahraga Indonesia menjadi bangkit. Selepas Olimpiade, Indonesia menggelar Pekan Olahraga Nasional (PON) untuk pertama kali, disebut PON I. Solo dipilih sebagai tuan rumah, sebab pada masa itu, kota batik ini memiliki fasilitas olahraga yang canggih. Stadion Sriwedari sebagai center lomba dan pertandingan berdiri berkat kepedulian Sri Susuhunan Pakubuwana X, Kasunanan Keraton Surakarta, pada olahraga.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PADA 27 Oktober 1928, di Batavia, berkumpul mahasiswa yang mewakili atau mengatasnamakan asal-usul dan latar belakang mereka. Ada yang mewakili Jawa, Sulawesi, Ambon, Betawi, Sumatera, Islam, dan perwakilan daerah lainnya. Mereka berkumpul untuk menggelar Kongres II Pemuda. Pertemuan itu merupakan lanjutan dari perkumpulan yang telah mereka gelar sebelumnya pada Kongres I pada tahun 1926.

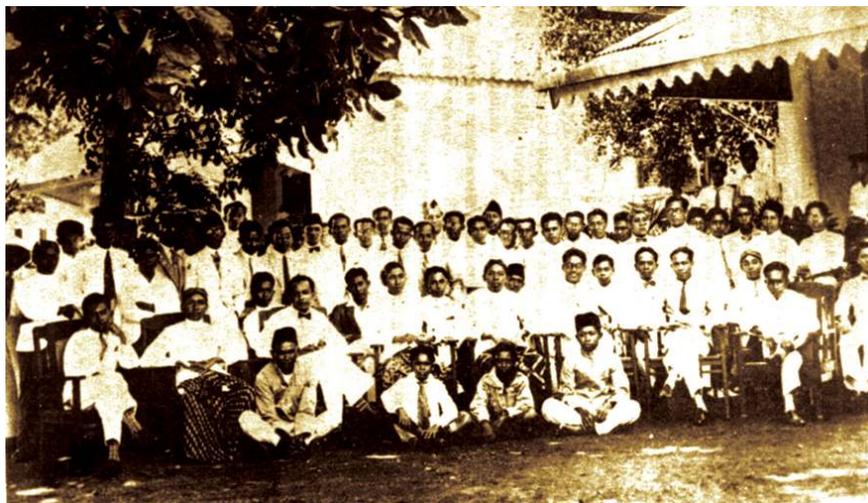
Dalam Kongres II, kegiatan yang diadakan bisa dikatakan lebih 'seru,' sebab untuk menggelar rapat mereka harus berpindah tempat sampai tiga kali. Pindah lokasi pertemuan itu dengan alasan untuk menghindari pantauan intel-intel polisi Belanda.

Sikap pantang menyerah para pemuda berakhir dengan keputusan yang monumental, di mana keputusan yang disepakati saat itu, 28 Oktober, hasilnya masih dijaga hingga saat ini. Keputusan itu adalah *Sumpah Setia*, *Sumpah Pemuda*, yang mengaku bertumpah darah, berbangsa yang satu, dan menjunjung bahasa persatuan, Indonesia.

Apa yang dilakukan oleh para pemuda yang mayoritas kuliah di fakultas kedokteran dan hukum itu menjadi inspirasi bagi seluruh rakyat dan kelompok yang ada untuk ikut membangun pondasi-pondasi bangsa Indonesia.

Pada 15 Oktober 1938, sepuluh tahun setelah Kongres II Pemuda, berkumpul berbagai kelompok yang mempunyai latar belakang berbeda. Kelompok yang berbeda ini bukan mewakili latar belakang atau asal-usul, tetapi datang dari berbagai macam cabang olahraga (cabor). Ada yang datang dari cabor sepakbola (PSSI), tenis lapangan (Pelti), dan bola keranjang (basket).

Mereka pada tanggal, bulan, dan tahun itu mendirikan perhimpunan yang dinamakan *Ikatan Sport Indonesia* (ISI). Organisasi yang diinisiasi oleh seorang anggota *Volkraad*, parlemen bentukan Belanda, dengan anggota orang-orang asli Indonesia itu didirikan dengan tujuan menghimpun kekuatan organisasi berbagai cabor dari



Kongres Pemuda II, 1928

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

kalangan bangsa Indonesia. Mereka ingin menunjukkan keberadaan bangsa Indonesia lewat cabor.

Untuk menunjukkan kiprah organisasi cabor, ISI menggelar *Sport Week* (Pekan Olahraga). Lewat kegiatan inilah terjalin rasa persatuan, senasib, dan sepenanggungan, sebagai bangsa Indonesia. Dengan terselenggaranya olahraga menunjukkan Indonesia ada.

Ketika peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang tidak ada kegiatan olahraga yang berarti selama tahun 1942-1945. Pada masa itu kebanyakan bangsa di dunia tengah sibuk menghadapi Perang Dunia II. Semua dana dan tenaga yang ada dikerahkan untuk perang. Meski ada badan olahraga yang bernama *GELORA* (Gerakan Latihan Olahraga), namun tidak ada aktivitas kegiatan olahraga

pada masa itu.

Selepas Perang Dunia II, Indonesia merdeka. Sebagai bangsa yang baru, Indonesia setapak demi setapak menunjukkan keberadaannya dalam berbagai bidang. Insan-insan olahraga yang ada, terutama yang pernah menjadi penggerak ISI dan organisasi-organisasi cabor lainnya tak mau ketinggalan untuk mengisi kemerdekaan. Mereka pada masa itu, Januari 1946, berkumpul di Solo, Surakarta, untuk membahas masa depan olahraga. Pertemuan itu disebutnya dengan Kongres I Olahraga. Pada masa itu meski sudah merdeka namun urusan dengan Belanda dan Jepang belum selesai. Masih banyak tentara dan polisi Belanda dan Jepang yang berkeliaran dan bermarkas di kota-kota besar dan pulau-pulau strategis di Indonesia.





Akibatnya, tokoh-tokoh yang hadir hanya dari Pulau Jawa.

Meski demikian, para insan olahraga dari cabang sepakbola, basket, tenis, menembak, atletik, bulutangkis, renang, silat, panahan, anggar, dan cabang olahraga lainnya tidak takut dari sisa-sisa kekuatan penjajah.

Di Solo mereka membahas berbagai macam tentang keolahragaan. Dari berbagai paparan, diskusi, sumbang saran, maka pada tahun itu disepakatilah dibentuknya *Peratuan Olahraga Republik Indonesia* (PORI). Biasa ketika organisasi dibentuk, susunan pengurusnya juga dibentuk. Mereka

Tak lama setelah terbentuknya PORI, munculah organisasi olahraga lainnya yang bernama Komite Olimpiade Republik Indonesia (KORI), 1947. Organisasi ini diketuai oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Kedua badan olahraga itu dibentuk oleh pemerintah guna mengurus keikutsertaan atlet-atlet Indonesia pada Olimpiade 1948 yang digelar di London, Inggris. PORI mempersiapkan atlet-atletnya, sedang KORI melobi IOC dan Inggris.

Nah, di sinilah muncul masalah bagi bangsa Indonesia. IOC dan Inggris menyatakan Indonesia tidak berhak mengikuti

2 sampai 3 Mei.

Dalam sidang darurat diungkapkan kekesalan kepada penyelenggara olimpiade. Masalah teknis pastinya juga disinggung dalam pertemuan. Kekecawaan para atlet yang disiapkan untuk berangkat ke London juga pasti dibahas. Peserta mencari solusi atas apa yang terjadi.

Dari semua masalah yang mengemuka, akhirnya PORI menyatakan perlu digelar Pekan Olahraga Nasional (PON). PON digelar dengan tujuan menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa ini mempunyai aktivitas olahraga. Selain itu, juga untuk menyalurkan



Olimpiade London, 1948



PON I Solo, 1948

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

yang hadir dalam kongres itu di antaranya ditunjuk menjadi pengurus PORI. Susunan pengurus PORI, Ketua Umum Widodo Sastrodiningrat, Wakil Ketua Umum Marto Husodo dan Soemali Prawirosoedirdjo, Sekretaris I Sutardi Hardjolukito, Sekretaris II Sumono, Bendahara I Siswosoedarmo, dan Bendahara II Maladi. Di samping susunan inti, juga ada ketua pada masing-masing cabang.

Menariknya, dari kongres itu ada usulan nama organisasi yang dibentuk mengacu pada masa pendudukan Belanda dan Jepang. ISI pada masa Belanda dan Gelora pada masa Jepang, sempat diusulkan sebagai nama badan olahraga. Usulan tersebut sah-sah saja, namun mayoritas peserta kongres merasa bangsa ini sudah merdeka dan perlu melepas ikatan-ikatan masa lalu yang gelap dan sulit sehingga kedua nama itu ditolak.

kegiatan olahraga antarbangsa itu. Alasan yang dikemukakan, banyak cabang di Indonesia yang belum tergabung dalam federasi-federasi olahraga nasional. Alasan yang lain adalah masalah kedaulatan. IOC dan Inggris bisa jadi mendengar masalah ini dari suara Belanda. Indonesia disebut belum berdaulat sehingga belum memiliki passport yang diakui. Bila Indonesia mau berpartisipasi dalam olimpiade musim panas itu disarankan bergabung dengan kontingen Belanda.

Penolakan ini tentu membuat Indonesia lunglai. Kalaupun mau ikut harus bergabung dengan Kontingen Belanda, pastinya ini bukan pilihan. Pada masa itu PORI memandang dunia keolahragaan bangsa Indonesia dalam masa darurat. Untuk menyikapi penolakan IOC dan Inggris kepada Indonesia membuat PORI mengadakan sidang darurat. Sidang darurat ini digelar di Solo pada 1 Mei 1948, ada yang mengatakan

keterampilan para atlet yang telah dibina dan dilatih. Peserta sidang mengusulkan PON digelar pada Agustus atau September 1948. Akhirnya disepakati PON digelar pada 8 hingga 12 September 1948. Solo pun ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara. PON ini digelar usai penyelenggaraan Olimpiade 1948 yang berlangsung 29 Juli hingga 14 Agustus.

Solo dipilih sebagai tuan rumah PON I karena kota ini pada masa itu merupakan kota yang memiliki fasilitas olahraga yang tercanggih. Di sana pada masa itu memiliki stadion yang *wah* sehingga bisa digelar berbagai macam perlombaan dan pertandingan.

Solo memiliki stadion yang paling mutakhir pada masa itu tak terlepas dari peran Sri Susuhunan Pakubuwana X, Kesultanan Surakarta. Dalam *Wikipedia* diceritakan, pada tahun 1932, Pakubuwana X berinisiatif

membangun stadion untuk kegiatan olahraga kerabat keraton dan kalangan pribumi. Pada masa itu, masyarakat Solo biasa berolahraga di alun-alun kidul. Mereka yang bermain sepakbola di sana pada masanya tidak menggunakan sepatu.

Melihat gairah masyarakat berolahraga, terutama yang bermain sepakbola, membuat kerabat keraton yang bernama Raden Mas Tumenggung Wongsonegoro menyampaikan saran kepada Pakubuwana X agar membangun stadion yang dikhususkan menampung atlet bumiputra. Usulan Tumenggung Wongsonegoro diiyakan oleh Pakubuwana X, yang kemudian langsung memilih kebun suwung (lahan kosong) yang berada di Kelurahan Sriwedari sebagai lokasi pembangunan stadion.

Pakubuwana X dalam membangun stadion bukan main-main. Desain bangunan dipercayakan kepada arsitektur luar yang bernama Zeylman. Desain stadion berbentuk oval dilengkapi dengan trek atletik, dan lampu sorot di setiap sudut. Setelah berjalan selama 8 bulan, stadion itu selesai dibangun pada tahun 1933. Biaya pembangunan 30.000 gulden. Sebagai tanda bisa digunakan maka stadion itu diresmikan oleh G.P.H. Hargopalar atas nama Pakubuwana X.

Ketika stadion bisa digunakan, bangsa Belanda yang menduduki Solo juga meminta jatah untuk bisa memanfaatkan. Agar merata maka penggunaan stadion itu dijadual sebagai berikut: Persatuan Sepak Bola Indonesia Solo (Persis) berlatih pada pagi dan sore. Sedang malam hari digunakan oleh



Pakubuwana X

Voetbal Bond Soerakarta (Klub Sepak bola Belanda).

Dalam *Sejarah Pekan Olahraga Nasional atau PON*, *kompas.com*, 04/08/2021, menulis bahwa penyelenggaraan PON saat itu mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Stadion Sriwedari tak mampu menampung antusiasme masyarakat yang ingin menonton pertandingan dan perlombaan olahraga. Masyarakat yang datang dari berbagai kota, sehari 40.000 orang, mereka ingin menyaksikan atlet-atlet sepakbola, atletik, renang, bulu tangkis, bola basket, bola keranjang, tenis, dan pencak silat, belaga.

Sedangkan kontingen yang berpartisipasi dalam PON I ini datang dari Karesidenan (kabupaten/kota) Banyumas, Bojonegoro,

Jakarta, Yogyakarta, Kediri, Madiun, Magelang, Malang, Pati, Priangan, Semarang, Surabaya, dan tuan rumah Solo. Peserta PON I memang sengaja menghadirkan kontingen dari kota-kota di Jawa, sebab pada masa itu bangsa ini dalam kondisi darurat terkait keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia.

Saat pembukaan PON I, Presiden Soekarno menggelorakan semangat dengan mengumandangkan bahwa pekan olahraga ini bukan hanya bertujuan untuk mengolah jasmani, tetapi juga untuk mengolah rohani.

Sebelum PON dibuka, terlebih dulu di Gedung Agung, istana Presiden di Yogyakarta – karena memang waktu itu Yogyakarta menjadi ibukota Indonesia — digelar penyerahan bendera merah putih dan bendera PON. Selanjutnya kedua bendera itu dibawa oleh rombongan ‘paskibra’ menuju Solo dengan berjalan kaki, sejauh 64 km.

Tiba di Solo, komandan paskibra menyerahkan bendera kepada Ketua Panitia PON I, Pangeran Surjohadimidjojo. Selanjutnya pada 9 September 1948, pukul 8.30 WIB, kedua bendera itu dikibarkan dengan diiringi lagu “Indonesia Raya”.

Setelah sepekan para atlet dari berbagai kota/kabupaten bertanding dan berlomba, akhirnya Solo menduduki ranking pertama, sekaligus juara umum. Sedang Yogyakarta menduduki ranking kedua.

Dalam sidang darurat, PORI mengambil keputusan PON digelar setiap dua tahun sekali. □

AWGI dari berbagai sumber



Stadion Sriwedari



Presiden Soekarno, Saat pembukaan PON I



Dari Gelanggang ke Gelanggang

Sejak PON digelar tahun 1948 hingga 2021 banyak cerita dan fakta mengenai kegiatan olahraga nasional itu. Ada ketimpangan pembinaan dan infrastruktur olahraga antarprovinsi. Kegiatan ini pernah dibatalkan atau diundur karena faktor politik dan wabah. Selepas Soeharto lengser, tuan rumah PON digilir secara merata.



Rank	Kontingen	Emas	Perak	Perunggu	Total
1	JBR	133	105	115	353
2	DKI	110	91	100	301
3	JTM	110	89	88	287
4	PPA	93	66	102	261
5	BAL	28	25	53	106
6	JTG	27	47	64	138
7	KTM	25	33	42	100
8	RIU	21	25	21	67
9	NTB	15	11	12	38
10	LAM	14	10	12	36

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

JUMAT pagi, 15 Oktober 2021, media massa menyajikan daftar perolehan medali dari ajang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang digelar di Papua, 2 - 15 Oktober 2021. Ranking pertama ditempati Jawa Barat dengan perolehan medali: 133 emas, 105 perak, dan 115 perunggu, disusul DKI Jakarta di tempat kedua dengan mengumpulkan 110 emas, 91 perak, dan 100 perunggu. Selanjutnya Jawa Timur, ditempat ketiga, dengan 110 emas, 89 perak, dan 88 perunggu. Lalu tuan rumah, Papua, berada pada posisi keempat dengan 93 emas, 66 perak, dan 102 perunggu.

Selanjutnya, ranking kelima dan seterusnya adalah Bali, Jawa Tengah, dan yang terakhir adalah Sulawesi Barat dengan raihan 2 perunggu. Itu artinya, seluruh provinsi di Indonesia yang mengirim kontingennya dalam PON XX Papua ini memperoleh medali. Menjadi juara umum, tentunya, keinginan dari semua kontingen, dan itu tergantung dari kesiapan dan pembinaan dari masing-masing kontingen.

Kesuksesan Kontingen Jawa Barat tidak hanya membuat pemerintah dan warga menjadi riang gembira, tapi pastinya para

atlet Jawa Barat lebih bergembira lagi. Karena, menjadi pemenang pertandingan dan lomba pada PON akan mempermudah mereka untuk menjadi atlet nasional. Prestasi mereka pastinya akan dilirik dan diperhatikan oleh induk-induk cabang pusat.

Namun, kalau kita lihat dari perjalanan PON yang digelar sejak 1948 hingga 2021, Jakarta merupakan provinsi yang sering menjadi juara umum. Dalam *Wikipedia* disebut, provinsi ini sebanyak 11 kali menjadi juara umum. DKI Jakarta menjadi juara umum tercatat masing-masing: PON 1957, 1969, 1973, 1977, 1981, 1985, 1989, 1993, 1996, 2004, dan 2012. Sedang Jawa Barat baru 5 kali dan terjadi pada 1951, 1953, 1961, 2016, dan 2021. Provinsi lainnya Jawa Timur, pada 2000 dan 2008. Jadi, kalau dilihat dari asal kontingen maka yang mendominasi setiap kali PON diselenggarakan adalah kontingen dari Jawa.

Banyak faktor yang menyebabkan suatu provinsi menjadi juara umum. Faktor itu seperti sumber daya manusia. Kalau kita lihat Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, merupakan provinsi yang jumlah penduduknya melimpah. Jakarta pada 2020

jumlah penduduknya tercatat 10,56 juta, Jawa Barat 49,94 juta, dan Jawa Timur 39,74 juta pada 2019.

Dilihat dari banyaknya penduduk tersebut tentu proses untuk menjadi atlet PON melalui seleksi yang ketat. Seleksi yang ketat tersebut akhirnya mampu memilih atlet-atlet yang benar-benar berkualitas. Selain faktor tersebut, di ketiga provinsi tadi, banyak tinggal atlet-atlet nasional bahkan internasional.

Tak hanya faktor banyaknya sumber daya manusia yang membuat provinsi itu bisa meraih prestasi gemilang dalam PON, namun faktor infrastruktur juga sangat berpengaruh untuk mencetak atlet yang berprestasi. Jangan ditanya fasilitas olahraga di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Fasilitas olahraga di ketiga provinsi itu tidak lagi berstandar nasional, namun sudah berstandar internasional atau dunia. Di tempat-tempat itulah atlet-atlet Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat digembleng dan dilatih.

Di sini tentu ada ketimpangan dalam soal pembangunan infrastruktur olahraga di Indonesia. Bandingkan dengan Provinsi Maluku Utara, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara. Pada PON Papua, Maluku Utara memperoleh 3 perunggu, Kalimantan Utara 1 emas, 2 perak, dan 1 perunggu; sedang Sulawesi Barat hanya 2 perunggu. Mereka pastinya sudah bersyukur dengan raihan medali dengan jumlah seperti itu. Sebagai provinsi yang terbelang baru, mereka pasti sadar dengan kekuatan atlet yang dimiliki. Faktor sumber daya manusia dan fasilitas olahraga tentu menjadi salah satu penyebab mengapa mereka berada di 3 besar dari bawah.

Faktor lain yang membuat suatu provinsi bisa menjadi juara umum, selain faktor di atas adalah faktor tuan rumah. Kalau kita lihat

dari sejarah PON, Jakarta kerap menjadi juara umum sebab ia sering menjadi tuan rumah. Jakarta menjadi tuan rumah pada PON II (1951), VIII (1973), IX (1977), X (1981), XI (1985), XII (1989), XIII (1993), dan XIV (1996). Selama menjadi tuan rumah, tujuh kali, Jakarta menjadi juara umum.

Pun demikian saat Jawa Barat menjadi tuan rumah PON V (1961) dan XIX (2016), Jawa Barat menjadi juara umum. Jawa Timur yang pernah menjadi tuan rumah PON XV (2000) juga menjadi juara umum.

Dari beberapa pelaksanaan PON, ajang kegiatan ini pernah dibatalkan atau ditunda. Pada 8 Oktober hingga 10 November 1965 sebenarnya hendak digelar PON VI di Jakarta, namun menjelang pelaksanaan, pada 30 September terjadi peristiwa yang disebutnya dengan pemberontakan G30S/PKI. Suasana politik yang panas saat itu bisa jadi membuat panitia tidak bisa berkonsentrasi sehingga ajang rutin yang dimulai sejak 1948 itu dibatalkan.

PON XX Papua itu sebenarnya harus digelar pada tahun 2020, namun di awal tahun itu, dunia sedang dilanda pandemi Covid-19. Dari waktu ke waktu, virus jahat yang bertebaran ini sulit terkendali sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa. Untuk memberi rasa aman dan rasa sehat maka pelaksanaan PON Papua diundur pada 2021 yang juga masih berada di bawah bayang-bayang pandemi Covid-19.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

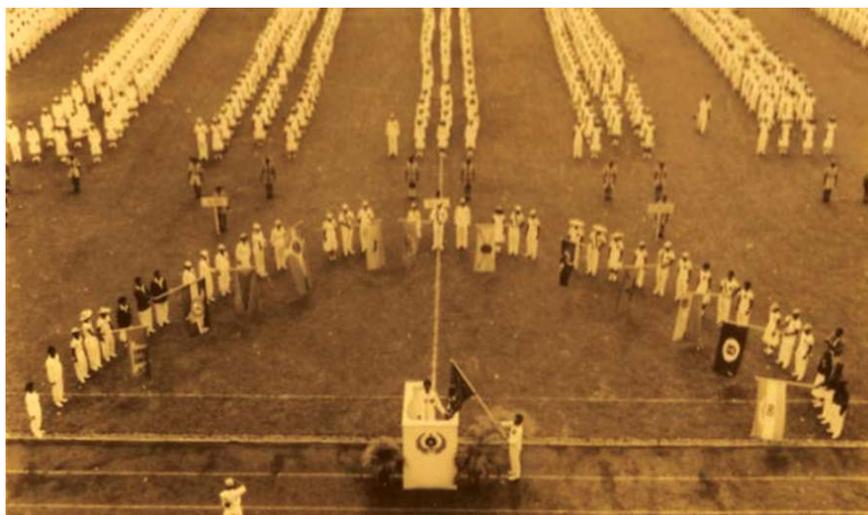
Pada masa pandemi tak hanya ajang PON yang terpaksa dijadwal mundur. Ajang-ajang olahraga dunia lainnya, seperti Piala Eropa Tahun 2020 dan Olimpiade 2020 Tokyo juga mengalami nasib serupa, diundur setahun kemudian.

Sejak digelar PON, masing-masing provinsi, kota, dan kabupaten, digilir menjadi tuan rumah. Sejak kali pertama digelar, sudah ada beberapa provinsi menjadi tuan rumah. Mereka adalah Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Pada masa Orde Baru, entah kenapa PON dari PON VIII hingga XIV, dari tahun 1973 hingga 1996, kegiatan selalu digelar di Jakarta. Kalau dikatakan soal fasilitas Jakarta paling lengkap dan berstandar internasional tentu bukan jawaban yang bijak, sebab sebelumnya PON sudah pernah digelar di Surakarta (PON I 1948), Medan (PON III 1953), Makassar (PON IV 1957), dan Bandung (PON V 1961). Jadi soal fasilitas olahraga bisa dibangun sesuai zamannya seperti pelaksanaan PON di Jawa Timur, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Papua, semua fasilitas dipersiapkan dan dibangun dengan standar internasional.

Bisa jadi PON tujuh kali berturut-turut digelar di Jakarta disebabkan faktor sentralistik kekuasaan pada masa itu. Mungkin PON XV tahun 2000 tetap akan digelar di Jakarta bila Presiden Soeharto masih berkuasa, namun pada tahun 1998, dua tahun selepas PON XIV, dia lengser. Mundurnya Soeharto membuat bangsa ini masuk dalam era reformasi. Era membawa babak baru dalam sendi-sendi kehidupan. Dalam era ini, tuan rumah PON digilir ke seluruh provinsi. Dalam era reformasi, satu persatu provinsi ditunjuk menjadi tuan rumah. Jawa Timur merupakan provinsi pertama dalam era reformasi sebagai tuan rumah PON XV di tahun 2000. □

AWG/dari berbagai sumber



PON III Medan, 1953





Agar Fasilitas Tidak Mangkrak Selepas PON

Kegiatan PON digelar dengan biaya tidak murah. APBN dan APBD diguyurkan untuk membangun fasilitas olahraga yang megah serta berstandar internasional dan nasional. Sayang selepas acara, banyak fasilitas olahraga mangkrak bahkan rusak. Hal demikian bisa jadi disebabkan tidak ada lagi gelaran olahraga usai PON. Ada tekad dan komitmen induk olahraga pusat dan daerah untuk merawat fasilitas yang ada.



PON XX Papua, 2021

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PEMBUKAAN dan penutupan PON XX Papua terlihat sangat meriah, puluhan artis Papua maupun artis-artis yang tinggal di Jakarta memeriahkan kedua acara seremonial itu. Para artis tampil di panggung yang berada di dalam Stadion Lukas Enembe tidak sendiri, di antara mereka ada yang bernyanyi diiringi oleh penari, *dancer*.

Kemeriahan acara dalam pembukaan dan penutupan PON semakin menggelora ketika kembang-kembang api disemprotkan ke langit. Tontonan yang digelar di Bumi Cenderawasih itu menunjukkan cerita kesuksesan Papua dalam menggelar hajatan olahraga nasional sekali dalam empat tahun itu. Sekaligus membuktikan Papua bisa, *Torang Bisa*.

Untuk menyuguhkan hiburan di awal dan akhir penyelenggaraan PON tentu diperlukan biaya yang tak murah. Mendatangkan artis-artis ibu kota dan Papua pastinya lebih dulu ada kesepakatan berapa biaya yang diperlukan untuk membayar mereka. Belum

lagi biaya untuk para penari, kembang api, serta keperluan-keperluan pentas untuk pembukaan dan penutupan.

Demi menghadirkan seremoni pembukaan dan penutupan saja perlu biaya mahal, apalagi untuk membangun fasilitas-fasilitas olahraga di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabuapten

Merauke. Dalam *kompas.com*, 03/10/2021, *Sri Mulyani Beberkan Anggaran Triliunan di Balik Meriahnya PON Papua*. Dia menyebutkan dana APBN yang diguyurkan untuk acara itu adalah, pada tahun 2018 Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp 881,5 miliar, belanja kementerian/lembaga Rp 211,2 miliar. Tahun 2019 DTI Rp 716,5



miliar, dana otonomi khusus (DOtsus) Rp1,44 triliun, dana bagi hasil (DBH) Rp1,708 triliun, dana alokasi khusus fisik (DAKF) Rp18,55 miliar, belanja kementerian/lembaga Rp999,66 miliar. Tahun 2020, DTI Rp140,5 miliar, dana otonomi khusus (DOtsus) Rp1,44 triliun, dana alokasi khusus fisik (DAKF) Rp18,55 miliar, belanja kementerian/lembaga Rp999,66 miliar. Tahun 2021, bantuan pemerintah pusat melalui Kemenpora ke Papua Rp 1,58 triliun, belanja kementerian/lembaga Rp793,73 miliar.

Dari angka-angka tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan PON Papua memerlukan anggaran yang sangat besar. Itu dari APBN, belum dari APBD.

Nah, selepas PON biasanya timbul masalah. Masalah yang terjadi adalah

dari Kota Samarinda membuat klub bola di sana lebih memilih stadion yang berada di dalam kota sebagai markas. Masyarakat di sana menyebut terlalu jauh kalau harus ke Palaran. Minimnya penggunaan stadion itulah yang membuat tak terawat. Akibatnya kondisinya sangat memprihatinkan. Bila tidak cepat tertangani, bisa-bisa stadion itu akan runtuh dengan sendirinya.

Tidak hanya stadion yang mengesankan. Hotel Atlet Stadion Sempaja pun mengalami nasib serupa. Diceritakan dalam *tvone-news.com*, 18 Oktober 2022, awalnya Hotel Atlet dibangun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai sarana menginap atlet kontingen luar daerah saat PON XVII. Usai PON, gedung itu digunakan sebagai

ada dan megah itu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali dalam *jawapos.com*, 11 Oktober 2021, meminta kepada pemerintah daerah Papua untuk memanfaatkan fasilitas dan venue setelah PON berakhir. Tujuannya agar fasilitas tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan talenta muda Papua. "Untuk sehari-hari bisa dimanfaatkan masyarakat atau atlet-atlet atau talenta Papua", ujarnya. Lebih detail dikatakan oleh politisi Partai Golkar itu, apalagi fasilitas dan venue untuk cabang olahraga renang. Ia mendorong organisasi induk cabang renang untuk menggelar even nasional maupun regional di venue tersebut.

Agar fasilitas olahraga tidak mangkrak,



Zainudin Amali



Stadion Palaran, Kalimantan Timur

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

mengenai perawatan fasilitas-fasilitas pertandingan dan perlombaan yang telah dibangun dengan biaya yang tidak murah itu. Belajar dari pengalaman PON XVII di Kalimantan Timur tahun 2008 dan PON XVIII tahun 2021 di Riau adalah banyaknya fasilitas olahraga yang mangkrak dan rusak selepas PON digelar.

Penulis pernah melihat sendiri bagaimana keadaan Stadion Utama Kalimantan Timur yang berada di Palaran, Samarinda. Selepas PON, stadion terbesar di Kalimantan itu kondisinya mengesankan. Banyak retakan yang terjadi di bangunan stadion. Rumput dan pohon tumbuh liar di dalam dan luar stadion. Hal demikian bisa terjadi sebab di stadion itu selepas PON tidak pernah ada lagi kegiatan olahraga atau sepakbola. Dengan alasan jauh

markas atlet Kalimantan Timur dalam persiapan menuju PON 2012 di Riau.

Masuk tahun 2013, di tempat itu sudah tidak ada aktivitas. Selama bertahun-tahun akhirnya bangunan itu mangkrak. Saat siang, bangunan hotel masih menampilkan kemegahan, namun saat malam hari, masyarakat takut mendekati sekitar kawasan hotel hingga bangunan itu disebut *Gedung Berhantu*.

Syukur, menjelang PON Papua, gedung itu dijadikan tempat latihan bagi Kontingen Bola Tangan Kalimantan Timur.

Belajar dari pengalaman pada PON Kalimantan Timur dan PON Riau, pemerintah dan semua insan olahraga mewanti-wanti pemerintah daerah agar memerhatikan dan merawat fasilitas-fasilitas olahraga yang

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI), Luhut Binsar Pandjaitan, akan menjadikan stadion atletik di Kota Timika, Kabupaten Mimika, sebagai lokasi pelatnas atlet Indonesia bagian timur. "Stadion ini kan standar internasional", ujarnya, *Kompas*, 16 Oktober 2021.

Di koran cetak itu juga, Ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Provinsi Papua, Max Oluwa, mengagendakan kejuaraan tingkat daerah di Papua secara rutin setiap tahun di GOR Waringin. Targetnya untuk melahirkan pebulutangkis asli Papua. Kegiatan itu dilakukan, selain untuk membina atlet juga untuk merawat gedung olahraga yang ada. □

AWG/dari berbagai sumber



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Isfandiari

Mastermind MMC Outsiders

Gotong Royong Harus Diimplementasikan Rakyat

KARAKTER bangsa Indonesia sejak dulu sangat baik, hal itu karena nilai-nilai luhur yang menjadi jati diri rakyat Indonesia, yakni gotong-royong. Nilai gotong royong, menurut saya, bukan hanya dipahami tapi mesti direalisasikan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Kami di komunitas motor besar dan motor modifikasi yang anggotanya tersebar di Jawa Barat dan daerah lain sudah tidak asing dalam penerapan nilai luhur bangsa. Dalam segala kegiatan, kami yang beranggota berasal dari berbagai suku bangsa, agama, ras, menempatkan kebersamaan adakah jiwa kami.

Saya berharap, seluruh rakyat Indonesia apalagi di masa sulit di tengah pandemi Covid-19, bergotong royong dan saling membantu apa saja yang bisa kita bantu untuk sesama, apalagi rakyat yang sangat kekurangan. Jika seluruh elemen bangsa menjalani ini maka kesulitan sebesar apapun akan mampu kita hadapi. □

DER

Abah Yusuf

Tetua Kabuyutan Dayeuh Luhur

NKRI Harga mati

SAYA sebagai masyarakat biasa yang kehidupannya sederhana, berusaha agar tradisi nenek moyang bangsa sejak lama dilestarikan dalam kehidupan sekarang. Menjaga budaya bangsa seperti budaya Sunda ini sangat penting, sebab jika tidak dijaga lambat laun akan sirna.

Apalagi generasi muda saat ini dipenuhi oleh modernitas yang luar biasa. Jika anak-anak muda tidak diikuti sertakan dalam menjaga tradisi budaya bangsa, mereka tidak akan lagi mengenal budaya nenek moyangnya.

Untuk itu, Abah sangat berharap kepada pemerintah, baik daerah dan pusat, agar memerhatikan dan melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang sangat memegang teguh budaya nasional.

Satu lagi, walaupun kami hidup sesuai dengan tradisi leluhur, tapi kami menyadari bahwa kami hidup di negara Indonesia. Kami tetap memegang teguh persatuan bangsa, NKRI harga mati, merah putih ada dalam jiwa kami. □

DER



Teladan dari Mbah Tuginem

Mewakafkan Mobil Ambulan untuk *Membantu Sesama*



PANDEMI Covid-19 yang terjadi di Indonesia memasuki tahun kedua. Segala potensi yang dimiliki bangsa Indonesia dikerahkan untuk meminimalisir potensi kerugian yang diakibatkan virus korona. Beruntung, di akhir tahun 2021, keganasan virus Covid-19 makin terkendali. Indikasinya, jumlah pasien terpapar virus ini terus berkurang, atau disebut dengan istilah melandai. Demikian juga hiruk pikuk yang sebelumnya terdengar karena imbas menyebarnya Covid-19, sudah tidak ditemukan lagi.

Rumah sakit sudah bekerja relatif normal, tidak ada lagi kasus kekurangan kamar yang memaksa pasien di rawat di tenda darurat. Kekurangan tabung oksigen yang sebelumnya membuat pos-pos pengisian O2 dipenuhi para pengantri, kini tidak terlihat lagi. Petugas pemulasaran jenazah dan pemakaman juga sudah bertugas secara normal, karena jumlah korban meninggal akibat Covid mengalami penurunan drastis.

Banyak pelajaran bisa diambil dalam penyikapan terhadap penularan Covid-19. Salah satu pelajaran itu datang dari seorang nenek berusia 80 tahun, warga Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dia adalah Mbah Tuginem, seorang petani yang hidup sebatang kara, tanpa anak

dan tanpa suami.

Pada saat pandemi Covid-19 memuncak, nama Tuginem menjadi buah bibir. Nama Mbah Tuginem menjadi viral karena merelakan uang tabungan yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun disedekahkan kepada



Lembaga Zakat, Infaq, dan Sadaqoh Muhammadiyah (Lazizmu) Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, untuk dibelikan ambulan.

“Sempat saya ingatkan, Mbah kenapa

tidak dipakai untuk naik haji, umroh atau amal yang lain. Rupanya beliau tetap bergeming, tidak mau mengubah keputusannya. Beliau memilih menyumbangkan uangnya untuk ambulan, karena tahu pasti banyak orang yang membutuhkan ambulan,” kata Fauzan, SE., pendamping sekaligus keponakan Mbah Tuginem, saat dihubungi Majalah *Majelis* beberapa waktu lalu.

Serah terima ambulan dari Mbah Tuginem kepada Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Sewon Selatan, dilaksanakan Sabtu (4/9/2021) di Kampus SMK Muhammadiyah 1 Bantul. Turut menyaksikan adalah Panewu Sewon Bantul Sri Hartini, Ketua MCCC PDM Bantul, Kapolsek Sewon, Danramil Sewon, dan Kepala KUA Sewon.

Keputusan Mbah Tuginem itu, menurut Fauzan, didasari pada apa yang bulek (bibi) saksikan. Dia setiap hari melihat ambulan milik Lazizmu Sewon Selatan terlalu sibuk. Bahkan, karena masyarakat yang memerlukan ambulan sangat banyak, sering ada pasien yang terpaksa menunggu terlalu lama karena ambulannya belum tersedia.

“Beliau tahu semua itu, karena beliau tinggal tepat di samping kantor Lazizmu Sewon Selatan. Karena itu beliau tahu bagaimana kesibukan ambulan melayani



masyarakat. Bahkan beliau juga selalu melihat, saat supir ambulan kelelahan karena tidak henti-hentinya membantu mengantar pasien ke rumah sakit,” kata Fauzan.

Melihat kondisi tersebut Tuginem merasa prihatin. Ia tidak bisa berdiam diri melihat banyak pasien mengantri untuk mendapatkan pelayanan ambulan. Kemudian muncullah keinginan dalam dirinya untuk membantu menyediakan ambulan menggunakan uang yang selama ini dia simpan. Uang hasil panen sawah selama bertahun-tahun, akhirnya disumbangkan dalam bentuk wakaf ambulan.

Dengan cara tersebut, Tuginem berharap, uang yang disumbangkan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Membantu orang yang kesusahan, meringankan beban orang yang kena musibah, dan tidak memforsir satu orang supir ambulan saja, tetapi bisa bergantian dengan supir yang lain.

Tuginem percaya, meski tidak menggunakan uang tabungannya untuk umroh atau berhaji, namun manfaat wakaf ambulan yang dilakukannya sangat besar. Bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan uang tersebut untuk berhaji dan umroh.

Di mata saudara dan tetangganya, Mbah Tuginem bukanlah sosok yang dikenal kaya raya. Kepedulianya menyumbang ambulan adalah bentuk kesadarannya untuk meringankan beban sesama. Apalagi, sejak masih muda ia harus berusaha mandiri, mencukupi semua kebutuhan secara mandiri pula. Ia adalah sosok yang sangat bersahaja, dan membelanjakan setiap rupiah yang dimiliki secara cermat. Karena itu, ia memiliki tabungan yang digunakan untuk wakaf ambulan.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Di usianya kini, Mbah Tuginem lebih banyak menghabiskan waktunya tinggal di rumah. Ia tidak bisa lagi pergi ke pasar untuk berdagang tempe, seperti yang dulu dia lakukan saban hari. Atau pergi ke sawah

untuk menanam dan memanen hasilnya. Satu-satunya penghasil didapat Mbah Tuginem adalah bagi hasil dari sawah miliknya yang digarap orang lain. □

MBO

Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Basarah

Ajak Mahasiswa Teladani Api Perjuangan Syuhada Bangsa



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Dr. Ahmad Basarah hadir sebagai pemateri dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Sabtu (9/10/2021). Basarah mengajak 600 peserta yang hadir secara fisik dan daring untuk meneladani api perjuangan para syuhada dan pendiri bangsa. Upaya ini penting dilakukan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air.

“Aceh ini daerah istimewa. Aceh dijuluki Serambi Mekah. Bung Karno menyebut Aceh sebagai daerah modal. Di era kemerdekaan, kontribusi Aceh demikian besar, mulai dari sumbangan pesawat Dakota R1-001 Seulawah, sumbangan emas dari saudagar Aceh untuk tugu Monas, hingga peranan penting tokoh Aceh Teuku Muhammad Hasan dalam fase pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang resmi PPKI pada 18 Agustus tahun 1945,” kata Basarah dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bertema “Empat Pilar Kebangsaan dan Motivasi Civitas Akademika untuk Memperkokoh Semangat Persatuan Mewujudkan Pembangunan Nasional Emas tahun 2045”.

Doktor hukum lulusan Universitas Diponegoro itu melanjutkan,

daya juang tinggi, berjiwa patriot, dan cinta tanah air merupakan karakter khas dari masyarakat Aceh. Bukti-bukti sejarah menunjukkan dengan jelas bagaimana perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda begitu sengit. Maka tidak mengherankan jika banyak pahlawan nasional berasal dari Aceh, sebut saja Teuku Umar, Teuku Cik Ditiro, Panglima Polim, Cut Nyak Dien, dan masih banyak lagi.

Periode selanjutnya adalah pada fase pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI. Dalam babakan sejarah ini, tokoh Aceh bernama Teuku Muhammad Hasan memainkan peranan penting. Teuku Muhammad Hasan berhasil meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo, tokoh besar Muhammadiyah agar mau menerima perubahan dalam rumusan Piagam Jakarta yang awalnya berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

“Atas dasar jasa - jasa pentingnya itulah, Teuku Muhammad Hasan diangkat sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 085/TK/Tahun 2006. Hal ini



menunjukkan bahwa sejak awal Aceh berkontribusi besar bagi bangsa Indonesia. Pelajaran moral penting yang bisa kita

warisi bersama adalah, bahwa pada pendiri bangsa mengedepankan persatuan, pendiri bangsa meninggalkan

egoisme. Api persatuan inilah yang harus kita teladani,” tegas Basarah.

Sementara itu, Rektor Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, dalam sambutannya menyatakan, seluruh civitas akademika di kampus yang dipimpinnya berterima kasih atas kehadiran Ahmad Basarah. Dia meyakini materi Sosialisasi Empat Pilar ini akan bermanfaat bagi seluruh civitas akademika Universitas Syiah Kuala, terutama dalam memperkuat kemajemukan yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT.

“Semoga materi sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini memberikan pengaruh signifikan kepada mereka yang masih memiliki egoisme sektoral untuk memahami konsep pluralisme demi tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa” kata Samsul Rizal. □

Kabupaten Indramayu

Mari Jaga Empat Pilar, Jangan Dirusak atau Diganti

WAKIL Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid MA., mengingatkan, pengurus dan anggota partai politik merupakan kelompok masyarakat yang juga patut mendapatkan sosialisasi Empat Pilar MPR. Karena salah satu dari Empat Pilar MPR, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung aturan menyangkut Partai politik. Seperti, pasal 6A Ayat 2 tentang Usulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil presiden. Juga pasal 22 E ayat 3 tentang Peserta Pemilihan Umum.

Karena itu, sudah seharusnya anggota dan pengurus partai politik mengetahui serta memahami Empat Pilar MPR RI. Agar setiap anggota dan pengurus partai tahu peran

Jatibarang No.88, Bangkaloa Ilir, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Ahad (3/10/2021).

Ikut hadir pada acara tersebut, Anggota MPR Fraksi PKS Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si., Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heryawan, serta Ketua DPD PKS Kabupaten Indramayu yang juga Anggota DPRD Indramayu Ustadz H. Ruswa, M.Pd.I.

Sampai kapanpun, kata HNW — sapaan Hidayat Nur Wahid— kegiatan sosialisasi Empat Pilar akan selalu penting. Apalagi saat ini banyak pihak yang ingin mengaburkan Pancasila. Mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Dwisila. Atau mengaburkan sila-silanya.

“Ketuhanan Yang Maha Esa, tapi ajaran

antara tokoh nasionalis, para ulama, dan pemuka agama lainnya. Anggota Panitia Sembilan ini, antara lain Soekarno, Hatta, Moh Yamin, Ahmad Subarjo, AA. Maramis, Wahid Hasyim, juga Kahar Muzakir,” kata Hidayat lagi.

Karena itu, menurut HNW, menjadi tugas seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga dan melestarikan Pancasila dan tiga pilar lainnya agar terhindar dari upaya pengaburan oleh pihak tertentu. Jangan sampai dirusak atau malah diganti.

Pernyataan serupa disampaikan Anggota Fraksi PKS MPR RI, Dr. Hj. Netty Prasetyani Aher, M.Si. Sebagai pembicara pendamping dalam acara tersebut, Netty, antara lain mengatakan, Pancasila, UUD NRI Tahun



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

masing-masing dalam kehidupan berdemokrasi. Juga, mengetahui tata cara mencalonkan diri, untuk ikut serta dalam kontestasi pemilihan umum. Terlebih penting lagi agar mengetahui dasar dan ideologi negara, konstitusi tertinggi, bentuk, dan semboyan negara.

“Presiden dan Wakil Presiden itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol. Tidak seperti kepala daerah yang bisa mencalonkan diri secara independen. Sedangkan untuk menjadi anggota DPR harus mendaftar melalui parpol,” kata Hidayat Nur Wahid.

Pernyataan itu disampaikan Hidayat secara daring, saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR, yang diselenggarakan MPR RI bekerjasama dengan DPD PKS Kabupaten Indramayu. Acara tersebut berlangsung di Aula Sekar Wangi, Jl. Raya Lohbener-

agama malah diketawakan, dan dibuat lucu-lucuan. Sedangkan para ulama disalahkan, kiai dikriminalisasi dan dicelakai. Maraknya penyerangan terhadap ulama yang belakangan sering terjadi sama persis dengan masa-masa sebelum PKI melakukan pemberontakan pada 1965, dan dilakukan oleh Lekra,” kata HNW lagi.

Pelaksanaan sosialisasi, menurut HNW, bisa diartikan melakukan penyegaran terhadap Pancasila. Karena dasar dan ideologin negara hasil kesepakatan para Bapak Bangsa, termasuk kesepahaman para ulama dengan kaum nasionalis dan pemuka agama lain, ini terus menuai ujian. Salah satunya adalah ujian dari faham-faham yang terus berdatangan dari luar.

“Panitia Sembilan yang menghasilkan Pancasila 18 Agustus 1945 adalah kesepakatan

1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika merupakan warisan para pendiri bangsa yang harus terus dipelihara dan dijaga bersama. Jiwa nasionalisme dan solidaritas harus disosialisasikan pada masyarakat agar terwujud dalam keseharian. Jangan sampai nilai-nilai dalam Empat Pilar hanya menjadi simbol yang tidak bermakna. Oleh karena itu, kata Netty, penanaman nilai Empat Pilar harus dilakukan sejak dini pada anak-anak.

“Keluarga menjadi tempat utama dan pertama untuk menanamkan nilai-nilai Empat Pilar, seperti nasionalisme, solidaritas dan persatuan. Jadi, kita perlu memberi dukungan pada keluarga agar mampu menjalankan fungsinya dengan baik terutama di masa pandemi ini,” katanya. □

MBO

Probolinggo, Jawa Timur

Semangat Gotong Royong Kunci Hadapi Pandemi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PANDEMI Covid-19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia, sampai saat ini masih menjadi fokus pemerintah untuk ditanggulangi. Namun, Wakil Ketua MPR Dr. Lestari Moerdijat, SS., MM., mengungkapkan bahwa saat ini rakyat Indonesia bisa bernafas lega, sebab tren positif kasus Covid-19 menunjukkan penurunan atau melandai di semua wilayah Indonesia.

Kunci dari kondisi baik tersebut adalah akibat munculnya semangat gotong-royong yang tinggi, sehingga terbentuk sinergitas kuat antara pemerintah dengan upayanya melaku-

kan berbagai kebijakan untuk menghadapi Covid seperti, PPKM, sosialisasi penerapan protokol kesehatan, serta percepatan dan pemerataan vaksinasi, diikuti masyarakat yang menyambut dan berpartisipasi aktif mengikuti program pemerintah tersebut.

“Kondisi seperti itu mesti dijaga seraya terus berupaya agar kasus positif makin merosot dan pada akhirnya hilang sama sekali,” ujarnya saat hadir secara virtual sebagai narasumber acara ‘Sosialisasi Empat Pilar MPR RI’ Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), di aula Gedung Paseban Sena, Kecamatan Mayangan, Kota

Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (5/10/2021). Hadir dalam acara tersebut anggota MPR Fraksi NasDem Aminurokhman, Ketua Pokdarwis Probolinggo Amin Hasan, dan anggota Pokdarwis serta masyarakat sekitar sebagai peserta.

Pimpinan MPR dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang akrab disapa Rerie ini melihat, berkaca dari bencana Covid-19 yang meluluhlantakkan semua, bangsa ini mesti kembali merenungi, lalu menyadari sepenuhnya bahwa ada ‘senjata’ yang sangat mujarab untuk menghadapi pandemi,



yaitu pemahaman serta penerapan nilai-nilai luhur bangsa, dan gotong-royong adalah salah satu diantaranya.

Luar biasanya, lanjut Rerie, rakyat Indonesia pada dasarnya sudah menyadari betapa pentingnya penerapan nilai luhur bangsa sebagai solusi menghadapi pandemi. Hal itu diketahui saat melakukan jajak pendapat seputar pengetahuan rakyat soal Covid-19 sekitar Juni 2020.

“Setelah jajak pendapat itu dianalisis menggunakan metode Word Cloud Analysis, hasilnya adalah: pertama, publik menyadari bahwa nilai-nilai kebangsaan bisa menjadi tameng yang menjaga bangsa ini dari kehancuran; kedua, gotong royong yang

merupakan nilai dasar ideologi kebangsaan yang kita miliki, saat ini mesti diperkuat untuk menjaga bangsa,” ungkap Rerie.

Kehebatan nilai-nilai luhur bangsa, lanjut Rerie, bahkan tercatat dalam perjalanan sejarah bangsa, karena telah teruji mampu berperan sebagai perekat rakyat dalam menghadapi berbagai macam krisis, serta ancaman baik dari internal maupun eksternal, yang berpotensi besar mengancam keutuhan negara dan memecah belah rakyat.

“Melandainya kasus pandemi saat ini, menunjukkan bahwa nilai luhur masih sangat digdaya sebagai benteng kita semua dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa,” tambahnya.

Untuk itu, Rerie mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari sekarang saling berpegang tangan, saling menjaga satu sama lain, lalu tunjukkan kepada para pahlawan dan pendiri bangsa bahwa generasi ini bisa seperti mereka, menang dengan gemilang menghadapi tantangan.

“Tunjukkan juga kepada generasi penerus bangsa bahwa dengan berpegang teguh pada nilai luhur bangsa kita adalah manusia Indonesia yang mampu melewati krisis berat. Sehingga kita bisa dikenang dan dijadikan teladan oleh mereka dalam menghadapi tantangan bangsa di masa depan,” pungkasnya. □

DER

Netizen Gathering

MPR Semaikan Semangat Kebangsaan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KEPALA Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM., mengajak para blogger se Jawa Tengah untuk bermedia sosial secara bijak. Menggunakan medsos (media sosial) untuk mengajak masyarakat memperkuat kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Juga menyebarkan semangat kerjasama, tolong-menolong dan gotong-royong, sebagai upaya mewujudkan karakter bangsa Indonesia.

Apalagi, karakter bangsa terbukti mampu membuat Indonesia bertahan, termasuk

pada situasi sulit. Bukan hanya pada saat bangsa Indonesia dijajah Belanda, tetapi juga pada saat pandemi Covid-19 melanda bangsa Indonesia.

“Kita adalah bangsa pejuang, selalu berusaha dan pantang menyerah. Selama pandemi kita sering mendengar tolong-menolong, saling bantu, dan gotong-royong dilaksanakan oleh berbagai kelompok masyarakat. Dan, itu membuat kita bisa bertahan dari kesulitan di masa pandemi,” kata Bu Titi, panggilan akrab Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi

Sekretariat Jenderal MPR RI.

Pernyataan itu disampaikan Siti Fauziah saat bertemu dan berbincang dengan para blogger Jawa Tengah pada acara Netizen Gathering di Semarang, Sabtu (9/10/2021). Netizen Gathering mengambil tema: Proud To Be Indonesia, “Bijak Bermedia Sosial dalam Mewujudkan Karakter Bangsa”. Ikut hadir pada acara tersebut Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Sekretariat Jenderal MPR, Budi Muliawan SH., MH.

Bermedia sosial secara bijak, kata Bu



Titi, perlu dibudayakan di kalangan netizen. Bukan malah sebaliknya, menggunakan medsos untuk menebar fitnah, kebencian, dan caci maki. Pasalnya, selain bermanfaat bagi kebaikan, medsos juga berpotensi memecah belah kerukunan hidup berbangsa. Apalagi, saat ini media sosial sudah hadir dalam genggamannya para netizen melalui gadget. Melalui gadgetnya para netizen bisa mewarnai dunia, melalui pesan-pesan yang dikirim lewat media sosial.

“Pertemuan ini diharapkan bisa memperlancar hubungan MPR dengan para netizen, dan juga di antara blogger sendiri. Jangan sampai, hubungan ini merenggang karena tidak pernah bertemu secara langsung,” kata Siti Fauziah.

Bu Titi tak lupa menitip pesan agar para blogger ikut menyampaikan semangat kebangsaan dalam account medsosnya masing-masing. Seperti, sejarah pergerakan bangsa Indonesia, dimulai dari Budi Utomo

pada 1908, sampai puncaknya pada 1928 saat Sumpah Pemuda. Hingga akhirnya tujuan perjuangan tercapai pada 1945 dikumandangkan kemerdekaan Indonesia.

“Setelah itu, kita masih menghadapi banyak gangguan. Seperti berubahnya NKRI menjadi RIS pada 1949, sebelum akhirnya menjadi NKRI kembali pada 1950,” kata Siti Fauziah lagi.

Netizen Gathering bukan sekedar pertemuan dan berbincangan biasa. Pada acara tersebut, MPR mencoba membangkitkan rasa cinta para netizen kepada produk bangsa dan warisan nenek moyang, dengan menjadikan batik sebagai *dresscode* pada acara tersebut.

Pada kesempatan itu, para blogger juga menyampaikan masukan agar medsos MPR bisa lebih efisien dan berdaya dalam menyosialisasikan Empat Pilar MPR RI. Beberapa masukan dari netizen itu, antara lain memperbanyak kuis, giveaway atau sesuatu berupa merchandise. Serta memanfaatkan fitur teknologi dari sosial media yang memberikan kemudahan untuk mengakses informasi. Mulai dari *fitur story, swipe up link, highlight, reels, dan video*. □

MBO



Batam, Kepulauan Riau

Waspada! Kemungkinan Bangkitnya Komunisme

PERAN Umat Islam membela bangsa dan negara meninggalkan jejak yang sangat jelas. Hari ini, 5 Oktober 2021, bertepatan dengan HUT ke-76 TNI misalnya, Bangsa Indonesia mencatat dengan tinta emas jasa Bapak Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Soedirman.

Jenderal Soedirman merupakan seorang muslim yang taat. Dia adalah seorang santri, anggota Pemuda Muhammadiyah, dan juga guru di sekolah Muhammadiyah. Pada saat para pemimpin Indonesia ditangkap Belanda, Soedirman memimpin perang gerilya, untuk melawan claim sepihak dari penjajah yang

pamrih, padahal pahala ikhlas atau ikhsan itu langsung dari Allah,” kata Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA.

Pernyataan itu disampaikan Hidayat Nur Wahid secara daring saat mengisi acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Yayasan Ulil Al-Bab Batam. Acara tersebut berlangsung di Aula Pusat Informasi Haji (PIH) Provinsi Kepri, Jl. Engku Putri, Batam, Selasa (5/10/2021).

Ikut hadir pada acara tersebut, Anggota MPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat, Lc, MA., dan Sigit Sosiantomo; Ketua Yayasan

G 30 S/ PKI tahun 1965. Kedua peristiwa pemberontakan itu bertujuan untuk mendirikan negara komunis dan menggantikan dasar serta ideologi Pancasila dengan komunisme.

“Pada peristiwa pertama (Peristiwa Madiun) banyak ulama, santri, pesantren dan masjid yang menjadi korban kekejaman PKI. Mereka juga memproklamkan berdirinya Negara Republik Soviet Indonesia. Sedangkan pada 1965, PKI melakukan pemberontakan, penculikan, serta pembunuhan yang menyebabkan tewasnya sembilan Pahlawan Revolusi,” kata Hidayat.

Saat ini, menurut Hidayat, pengaburan



menyatakan bahwa mereka sudah menguasai Indonesia, dan Indonesia sudah tidak ada.

Soedirman beserta pasukannya sukses menyulitkan tentara Belanda. Berkali-kali Soedirman — yang kala itu ditandu prajuritnya karena sedang sakit— lolos dari sergapan pasukan Belanda. Sampai suatu hari, Soeparjo Rustam, salah satu ajudan-nya, penasaran dan memberanikan diri mengajukan pertanyaan, rahasia di balik keberhasilan Soedirman meloloskan diri dari sergapan Belanda.

Apa rahasianya? “Pertama, tidak pernah batal dan selalu memiliki wudhu, sehingga selalu terjaga kesuciannya. Allah mencintai hambanya yang bertobat dan selalu mensucikan diri. Kedua, salat tepat waktu. Salat tepat waktu adalah amal paling baik, yang disukai Allah. Ketiga, ikhlas berjuang tanpa

Ulil Albab Syaifuddin Fauzi; dan Anggota MUI Kepri, Ust Bakhtiar, MA. Juga hadir, Ketua IKADI Kepri, Ust Dr. Zenal Satiawan, dan Ketua IKADI Batam, Ust Irwandi Al Busthomy.

Belajar pada sosok Jenderal Soedirman, menurut Hidayat, sepantasnya umat Islam senantiasa turut menjaga dan melestarikan hasil-hasil kesepakatan yang diambil para Bapak Bangsa. Termasuk kesepakatan tentang Pancasila sebagai dasar dan Ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Apalagi, bangsa Indonesia sudah dua kali mengalami pengalaman buruk terkait Partai Komunis Indonesia, yaitu: Peristiwa Madiun pada 18 September 1948 dan pemberontakan

tentang kekejaman PKI sudah mulai bisa dirasakan. Bahkan kerap muncul gerakan-gerakan sebagaimana yang terjadi sebelum pemberontakan PKI pada 1948 dan 1965. Seperti kekerasan terhadap ulama, yang pelakunya kerap divonis gila.

“Peristiwa terakhir bahkan terjadi di Batam. September lalu, Ustad Abu Syahid Chaniago yang tengah berceramah di siang hari, tiba-tiba diserang oleh oknum yang mengaku komunis,” kata HNW panggilan akrab Hidayat Nur Wahid.

Inilah, kata HNW, yang membuat Sosialisasi Empat Pilar MPR sangat penting. Karena masih banyak orang yang mau mengaburkan, merusak, dan mengganti Pancasila dengan ideologi lain, termasuk komunisme. □

MBO

Serang, Banten

Mari Kita Gunakan Medsos dengan Baik

SEMAKIN berkembangnya penggunaan teknologi informasi, khususnya media sosial (medsos) menimbulkan persoalan baru dalam kehidupan masyarakat. Penyebaran berita hoaks (palsu), fitnah dan ujaran kebencian di medsos dalam beberapa tahun belakangan semakin marak.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, di era modern ini, kehidupan masyarakat tidak bisa dilepaskan dengan digitalisasi. "Seluruh kebutuhan kita, apakah untuk berdagang, mengajar, transaksi bahkan apapun jenis aktivitasnya, kini tidak luput dengan dunia digital. Oleh sebab itu, mari kita gunakan medsos dengan baik. Sekarang ini banyak sekali berita hoaks, fitnah banjir di medsos. Kita harus mampu menyaring informasi. Kalau tidak, itu akan menjadi masalah bagi bangsa ini," ujar Gus Jazil saat melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR di SMA Bina Putera, Kopo, Serang, Banten, Jumat (8/10/2021).

Dikatakan Gus Jazil, para guru di sekolah juga harus memberikan pengajaran literasi digital kepada para anak didik soal bagaimana menggunakan teknologi informasi, khususnya medsos dengan baik. "Bagaimana mereka bisa memilah informasi yang palsu, hoaks, dan informasi yang produktif bagi anak-anak, ini perlu ada pengarahan dari para guru," katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan bahwa



medsos ibarat dua sisi mata pisau yang bisa menimbulkan dampak positif di satu sisi, dan dampak negatif disisi lainnya. "Kita harus arahkan agar anak-anak bisa menjadikan medsos ini sesuatu yang positif. Sebab, saat ini anak muda di mana saja semua menggunakan medsos. Kita perlu bimbing penggunaannya, dan konten-konten seperti apa yang layak untuk dibuka," urainya.

Di depan para siswa SMA Bina Putera, Gus Jazil juga mengatakan bahwa Empat

Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 merupakan pilar-pilar penyangga negeri ini. "Kalau Empat Pilar ini roboh atau salah satu roboh maka Indonesia juga roboh. Tugas kita bersama agar Empat Pilar ini diperkuat. Pancasila mengandung nilai-nilai dan menjadi pandangan hidup, tapi belum tentu kita bisa dalam implementasinya," katanya.

Gus Jazil juga mengatakan bahwa perasan dari Pancasila adalah gotong royong. "Gotong royong ini pelan-pelan mulai kita lupakan, sudah kita ganti dengan kata 'demokrasi'. Gotong royong seakan-akan hanya kerja bakti. Padahal gotong-royong adalah kalimat keramat yang dimiliki bangsa ini dan bisa menyatukan pandangan agama, suku bangsa, adat istiadat dalam satu kata yakni gotong-royong. Ini inti kehendak dan cita-cita bangsa," tuturnya.

Dikatakan Gus Jazil, sering kali antara agama dengan negara atau antara Islam dan Pancasila dibentur-benturkan. Padahal ini sesuatu yang sudah menyatu. "Tinggal kita wujudkan dalam gerak hidup kita sehari-hari, dalam aktivitas kita, dalam kita membangun hubungan dan mewujudkan apa yang kita cita-citakan," urainya.

Menurutnya, dengan berkembangnya teknologi informasi, ke depan, perlu ada kreativitas, yakni bagaimana menyebarkan Empat Pilar melalui media digital, game, cerita, atau menggunakan gambar animasi sehingga lebih mengena kepada kalangan generasi muda. "Bagi anak-anak ini penting daripada metode ceramah-ceramah. Dan, yang tidak kalah penting keteladanan. Anak-anak muda ini butuh keteladanan. Contoh, siapa figur yang pancasilais? Pertama, ya gurunya karena anak-anak mencontoh gurunya. Dan, para guru mencontoh pemimpinnya," katanya.

Dirjo, kepala SMA Bina Putera mengatakan, upaya peningkatan literasi digital juga terus dilakukan di sekolahnya agar para siswa bisa memilah informasi yang layak untuk dicerna. "Kita terus melakukan peningkatan literasi digital. Kita selalu tekankan guru-guru agar bisa mendampingi mereka," tuturnya. □



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



Untuk itulah dalam pemilu yang akan datang, PKB akan mempersiapkan pemilu yang tak ada politik identitas dengan berkeinginan terbentuknya 3 poros pasangan capres dan cawapres. Undang-undang yang terkait diharap bisa direvisi supaya bisa melonggarkan pengajuan pasangan capres dan cawapres bisa lebih banyak.

Diakui pendidikan politik bagi masyarakat bisa meredam adanya politik identitas, namun bila pendidikan itu diserahkan kepada partai maka terasa akan memberatkan. "Kami tak sanggup

bila biaya pendidikan politik dibebankan kepada partai," ungkapnya. Sebab partai sebagai pilar persatuan mengharapkan agar anggaran dari pemerintah kepada partai politik ditingkatkan, sehingga pendidikan politik bisa terlaksana. Bila pendidikan politik terselektif, Jazilul Fawaid yakin politik identitas dan transaksional bisa diredam.

Mardani Ali Sera menyebut pendidikan dengan menginternalisasikan diskusi dan dialog yang kritis dianggap sebagai cara untuk meredam politik identitas. Jangankan

di Indonesia, menurut Mardani, di Amerika Serikat di mana tingkat pendidikan sudah sangat tinggi namun politik identitas masih terjadi. Meski demikian, katanya, dengan pendidikan yang merata dan tinggi, politik identitas akan tertolak.

Penyebab munculnya politik identitas, menurut Mardani Ali Sera, adalah adanya ketidakadilan. Untuk itu perlu pemimpin yang mampu mengejawantahkan keadilan bagi semua. Pemimpin harus bisa menjadi contoh bagaimana ia bisa melakukan politik anti identitas. "Presiden dan elit politik harus mampu memberi contoh politik anti identitas", ujarnya.

Bagi Guspari, perlu komitmen bersama untuk merawat persatuan. Untuk itu pemilu harus mampu menguatkan persatuan. Ujang Komarudin, dalam paparannya mengakui ada kelompok yang menggoreng-goreng politik identitas dengan cara membusuk-busukan lawan politik. "Cara ini dikelola sehingga menjadi kekuatan perusak," ungkapnya. Dia mengakui, masyarakat kita adalah masyarakat yang ramah, namun ketika pemilu tiba, ia bisa menjadi masyarakat yang beringas. □

AWG



Kota Ternate, Maluku Utara

Gus Jazil: Jangan Sampai Kita Mati di Lumbung Padi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

INDONESIA dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam melimpah. Baik kekayaan laut dan isinya, kesuburan tanahnya, dan gunung-gunungnya yang di dalamnya memiliki kandungan emas, nikel, dan lainnya. Termasuk melimpahnya kandungan minyak di berbagai wilayah.

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, kekayaan alam yang melimpah harus bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu kunci utamanya, yaitu bagaimana bangsa ini memiliki sumber daya manusia (SDM) unggul yang bisa mengolah dan mengoptimalkan potensi kekayaan alam yang ada di negeri ini.

"Kekayaan alam kita luar biasa. Ketika zaman dulu kita dijajah karena penjajah ingin mendapatkan rempah-rempah, ternyata di bawah bumi kita banyak mineral, nikel, emas, minyak dan lainnya. Tapi semua itu tanpa sumber daya manusia (SDM) yang baik, kekayaan alam kita tidak bermakna. Ibarat pepatah ayam mati di lumbung padi. Bahaya kalau daerah kaya tapi masyarakatnya tidak sejahtera," ujar Gus Jazil - sapaan akrab Jazilul Fawaid - saat melakukan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bekerjasama dengan DKW Garda Bangsa Maluku Utara di Kota Ternate, Sabtu (23/10/2021).

Gus Jazil mengaku, baru pertama kali

singgah di Maluku Utara dan langsung jatuh hati melihat kekayaan alamnya yang luar biasa indah. Mulai dari gunung-gunung, lautan dan isinya. "Ini tantangan bagi Maluku Utara. Saya jatuh cinta dengan Maluku Utara. Pulau-pulaunya indah, kandungannya macam-macam di dalam dan luar bumi. Termasuk ikan dan masakannya," ungkapnya.

Di sisi lain, Maluku Utara yang terdiri dari pulau-pulau juga merupakan daerah yang kaya akan budaya dan tradisi, termasuk bahasa. Keberagaman yang ada harus terus disatukan dalam balutan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.. "Pancasila adalah dasar negara, pandangan hidup bangsa. Yang menyatukan suku-suku, adat, keyakinan, pikiran, itu ada di Pancasila. Kalau dasar ini dicabut, hilang negara," katanya.

Menurutnya, Empat Pilar tersebut tidak hanya cukup dimengerti, tapi harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. "Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini akan kuat jika nasionalisme kita tumbuh. Kecintaan anak-anak kita pada nasionalisme mulai berkurang. Padahal cinta nasionalisme ini sangat penting," tuturnya.

Gus Jazil mengatakan, dulu setelah era Reformasi, dibentuk UU Otonomi Daerah.

Sejumlah daerah dimekarkan. Salah satunya Maluku Utara yang merupakan hasil dari Otonomi Daerah. Di antara tujuannya, yaitu untuk memperpendek pelayanan pemerintahan dan mempercepat kemajuan daerah. "Kenapa sekarang kita belum maju-maju, jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan diri kita sendiri karena belum pintar-pintar," urainya.

Padahal, salah satu mandat atau amanah Reformasi, selain membebaskan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), juga dilakukan amandemen UUD. Di dalamnya selain membatasi masa jabatan presiden menjadi maksimal dua periode, juga ada hal penting bagaimana caranya agar Indonesia maju lebih cepat.

"Pilihannya memasukkan 20% anggaran negara untuk pendidikan agar masyarakat Indonesia menikmati pendidikan dan memiliki daya saing sehingga tidak tertinggal. Sekaya apapun sumber daya kita kalau masyarakat kita belum pintar, SDM kita belum unggul, pasti ada orang lain yang memintari kita," katanya.

Karena itu, kata Gus Jazil, tantangan bangsa kedepan adalah bagaimana bisa mengelola kekayaan alam yang luar biasa ini. "Salah satu solusinya adalah dengan menyiapkan SDM unggul," pungkas Gus Jazil. □

Sosialisasi Empat Pilar MPR di Bengkulu

Parpol Agar Mengenal Empat Pilar MPR

WAKIL Ketua MPR, Dr. Hidayat Nur Wahid, MA., mengharapkan partai politik lebih mengenali dan memahami Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) sehingga kehidupan berpolitik dan berdemokrasi semakin berkualitas.

“Partai politik harus berkualitas melalui pemahaman yang maksimal terhadap Empat Pilar MPR. Dengan pemahaman yang baik maka partai politik akan memberikan kontribusi yang baik dan hasil yang baik pula. Ini menjadi komitmen kita bersama,” kata Hidayat Nur Wahid dalam sosialisasi Empat Pilar MPR bersama Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bengkulu, Sabtu (23/10/2021).

HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, dalam acara sosialisasi Empat Pilar MPR itu hadir secara virtual sebagai narasumber dalam sosialisasi Empat Pilar tersebut. Juga turut berbicara dalam sosialisasi ini, Presiden PKS H. Achmad Syaikh, dan Ketua DPW PKS Bengkulu, Sujono.

Dalam sosialisasi itu, Hidayat mengatakan, sesuai dengan UUD dan UU, partai politik bisa hadir dan eksis supaya demokrasi menjadi lebih berkualitas melalui wakil rakyat yang berkualitas dan presiden yang berkualitas. “Para wakil rakyat di DPR dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, dicalonkan oleh partai politik. Bila partai politik berkualitas maka akan muncul calon yang juga berkualitas. Anggota dewan dan presiden yang berkualitas pada gilirannya membuat negara pun berkualitas,” katanya.

Menurut HNW, partai politik harus berkualitas melalui pemahaman yang maksimal terhadap Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). “Dengan pemahaman yang baik maka partai politik akan memberikan kontribusi yang baik dan hasil yang baik. Dengan mengenali dan memahami Empat Pilar maka parpol akan menyayangi Indonesia,” ujarnya.

HNW mengungkapkan, sosialisasi Empat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pilar MPR menjadi bagian dari kurikulum kaderisasi partai PKS. Dia menyebutkan, semakin memahami UUD NRI Tahun 1945, misalnya, maka kehidupan berpolitik dan berdemokrasi semakin berkualitas. “Dengan pemahaman itu bisa menjadi solusi beragam masalah di Indonesia, seperti radikalisme, terorisme, separatisme, ketidakadilan,” ujarnya.

Pada bagian lain sosialisasi, HNW membahas tentang Pancasila. Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945 menyebutkan, Pancasila bisa diperas menjadi Trisila. Bila dirasakan masih terlalu banyak, Pancasila bisa diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu Gotong Royong. “Tetapi setelah pidato 1 Juni, Bung Karno tidak lagi menyinggung soal Trisila dan Ekasila,” ujarnya.

Panitia Sembilan menyetujui Pancasila, tetapi bukan Pancasila yang disebutkan dalam pidato Bung Karno pada 1 Juni. Bung Karno sebagai Ketua Panitia Sembilan, lanjut HNW, tidak pernah mengatakan Pancasila yang disepakati pada 22 Juni bisa diperas menjadi Trisila, atau diperas menjadi Ekasila.

Begitu pun, Pancasila yang disepakati secara final pada 18 Agustus 1945. “Bung

Karno adalah Ketua PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Ketika menjadi Ketua Panitia Delapan, Ketua Panitia Sembilan, dan Ketua PPKI, Bung Karno tidak pernah mengatakan bahwa Pancasila yang disepakati pada 22 Juni maupun pada 18 Agustus bisa diperas menjadi Trisila. Bung Karno juga tidak pernah mengatakan bisa diperas menjadi Ekasila,” papar HNW.

Karena itu, HNW menegaskan bila kita konsisten dengan Pancasila maka ikuti Pancasila yang sudah disepakati pada 18 Agustus 1945. “Pancasila yang final pada 18 Agustus memang Pancasila yang tidak bisa diperas menjadi Trisila atau Ekasila,” tuturnya. HNW menambahkan, Presiden Soeharto dalam Inpres tahun 1968 yang berisi urutan dan penyebutan Pancasila juga tidak mengenal Pancasila yang diperas menjadi Trisila atau Ekasila.

“Bung Karno setelah tanggal 1 Juni tidak pernah menyinggung Pancasila yang bisa diperas menjadi Trisila dan Eka Sila. Partai politik, terutama partai Islam, sudah sewajarnya berada di garda terdepan membentengi Pancasila dan merealisasikan Pancasila dalam kehidupan berpartai dan berpolitik,” ucapnya. □

Sulawesi Selatan

Di Palopo, dari Sosialisasi Empat Pilar hingga Anugerah Gelar Adat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KEHADIRAN Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, SS., MM., di Bandar Udara I Lagaligo Bua, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, 24 Oktober 2021, disambut meriah dengan tarian adat. Tak hanya itu, ratusan orang dengan naik mobil dan bus mengiringi perjalanan kunjungan kerja politisi dari Partai Nasdem itu. Kehadiran Lestari Moerdijat ke Palopo selain melakukan kunjungan kerja juga untuk Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau Empat Pilar MPR.

Wali Kota Palopo H. Muhammad Judas Amir mengucapkan selamat datang kepada Lestari Moerdijat. “Kita patut berbangga sebab bisa bertemu dengan Wakil Ketua MPR”, tuturnya. Dia berharap, kehadiran Wakil Ketua MPR ini mampu membawa keberkahan bagi masyarakat Palopo. Dalam masa-masa seperti ini, Judas Amir berdoa agar semua diberi kesehatan sehingga dapat menunaikan tugas negara dengan baik dan lancar.

Lestari Moerdijat di hadapan masyarakat yang berkumpul di Aula Rumah Jabatan Walikota Palopo mengatakan, kehadirannya di kota ini adalah untuk kedua kalinya. Kali pertama pada tahun 1998, dan kedua sekaarang ini. Lestari menyatakan, merasa gembira sebab bisa berkunjung kembali ke Palopo. “Senang bisa berada di kota yang indah ini”, ujarnya.

Dalam kesempatan itu, perempuan yang

akrab disapa Kakak Ririe itu, mengatakan, dibanding laki-laki, perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang rentan terhadap kekerasan. Dalam masa pandemi banyak orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Bila PHK ini mengena kaum perempuan, menurut Lestari Moerdijat, akan membuat beban kaum perempuan semakin berat. Perempuan, kaum ibu, merupakan sosok istri bagi suami, dia juga mencari nafkah, serta guru bagi anak-anak di rumahnya. “Bila perempuan kena PHK maka beban kehidupan yang ditanggung akan semakin berat”, ungkapnya. Perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga akan

menanggung hidup suami, anak, dan dirinya sendiri. Bila masalah itu tak tertangani, selanjutnya akan menjadi beban mental bagi perempuan.

Akibat banyaknya perempuan yang mengalami beratnya beban kehidupan, berdasarkan penelitian yang ada, membuat mereka kerap memimpin gerakan-gerakan yang sifatnya melawan. “Hal demikian terjadi akibat tekanan hidup”, ucapnya.

Nasib perempuan tidak hanya itu dalam soal kemalangannya. Dalam pemilu disebut ada gerakan-gerakan yang menghendaki agar tidak memilih kaum perempuan. Perempuan dianggap tidak mampu dalam





dunia politik.

Menanggapi hal yang demikian, Lestari Moedijat mengajak kepada semua untuk memerhatikan kelompok perempuan. Harus ada dorongan agar para politisi memperjuangkan kaum perempuan. “Sebab ke depan pemilih terbesar adalah kaum perempuan dan kaum milenial”, paparnya. “Ini menjadi pekerjaan rumah bagi para wakil rakyat”, tambahnya.

Memerhatikan kaum perempuan, menurut Lestari Moerdijat, bisa dilakukan dengan cara-cara yang sederhana. “Saya mengajak kaum perempuan untuk berdandan”, ujarnya. “Mengajari bagaimana menggunakan jilbab

yang benar”, tambahnya. Hal demikian dilakukan sebagai upaya untuk membangun rasa percaya diri. “Bila percaya diri maka ketika mendapat kepercayaan, perempuan akan berani maju”, tuturnya.

Menerima Gelar Kehormatan Adat

Menjelang sore, di Istana Keadatuan Luwu, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, terlihat kesibukan besar. Datu (Raja) Luwu XL H. Andi Maradang Mackulau beserta para keluarga besar sore hari itu menggelar prosesi besar, yakni ‘Penganugerahan Gelar Kehormatan Adat’. Sebab acara itu diselenggarakan tidak berdasarkan kalender

pada hari dan bulan tertentu maka persiapan yang dilakukan secara besar-besaran.

Di dalam istana dipasang beberapa singgasana, puluhan penari dan penabuh gendang sejak pagi tengah mempersiapkan diri, tenda pun dipasang di halaman istana untuk para undangan. Semua dilakukan agar prosesi adat itu bisa berjalan lancar dan khidmad. Dalam prosesi adat, hadir tidak hanya Datu dan para keluarga Keadatuan, namun juga unsur Muspida dan masyarakat luas.

Pada hari itu Lestari Moerdijat mendapat gelar adat. Berdasarkan keputusan Datu dan Dewan Adat, ia mendapat gelar ‘We Wetueng





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dalam sambutannya, Rektor Abdul Pirol mengucapkan selamat datang kepada Lestari Moerdijat di IAIN Palopo dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR. Rektor berharap, kehadiran Wakil Ketua MPR dapat memberi nilai tambah dan nilai historis kepada IAIN Palopo, serta memberi motivasi kepada kami.

Abdul Pirol selanjutnya menyampaikan bahwa IAIN yang dipimpinnya berdiri sejak tahun 1968. Kampus ini dulunya merupakan cabang dari IAIN Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah berpisah dengan Alauddin, status perguruan tinggi ini menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). "Dari STAIN selanjutnya menjadi IAIN", paparnya. "Dan kami ingin IAIN ini menjadi Universitas Islam Negeri (UIN)," harapnya dengan antusias.

Keinginan berubah menjadi UIN, menurut Abdul Pirol, agar kampus ini dapat menyediakan bangku kuliah kepada 18.000 lulusan SMA, MAN, dan yang sederajat. "Serta mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul", tegasnya.

Apa yang dicita-citakan Abdul Pirol didukung oleh Lestari Moerdijat. Dalam sambutannya, ia mengatakan, cita-cita menjadi UIN mudah-mudahan segera terealisasi. Palopo, menurut Lestari, mempunyai arti penting bagi republik ini sebab dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pejuang-pejuang dari Palopo dan Luwu gigih mengangkat senjata. "Perjuangan rakyat di daerah ini menjadi catatan tinta emas", tuturnya.

Sebagai wilayah yang dulu berdiri Kedatuan Luwu, di mana kedatuan yang

ada bersama dengan kerajaan dan kesultanan yang lain bersepakat mendukung berdirinya NKRI. Datu yang ada ikut menyatakan bergabung dengan Indonesia. "Jadi Palopo dan Luwu memberi kontribusi bagi berdirinya NKRI", paparnya.

Dalam sosialisasinya, Lestari Moerdijat mengatakan, bangsa Indonesia saat ini menghadapi krisis multidimensi dan tantangan dari dalam dan luar. Saat ini dunia tengah mengalami lompatan teknologi yang begitu cepat. Penemuan teknologi silih berganti. Dulu orang hanya berkomunikasi dengan telepon rumah, saat ini handphone yang dipegang oleh setiap orang memiliki teknologi yang sangat luar biasa.

Kemajuan teknologi yang ada patut disyukuri, namun dengan adanya media sosial, salah satu buah dari kemajuan teknologi, membawa dampak tersendiri. Media sosial awalnya digunakan sebatas untuk memperlancar dan mempercepat komunikasi, namun saat ini berubah menjadi

alat penyebar hoax atau berita bohong. Akibat yang demikian banyak kegaduhan terjadi. "Saat teknologi komunikasi masih sederhana, hal demikian tidak ada", paparnya.

Ia merasa bersyukur bangsa ini memiliki Pancasila. Dia menyebut, Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan benteng untuk menjadi tameng dalam menghadapi berbagai macam krisis. Lestari mengingatkan, nilai-nilai yang memang sudah ada di Indonesia sejak dulu kala itu diyakini sebagai pegangan untuk melewati berbagai masalah yang ada.

Menurut Lestari, sosialisasi Empat Pilar tidak boleh berhenti, namun kegiatan ini akan berat tanpa didukung oleh seluruh elemen masyarakat. "Mahasiswa juga perlu menyampaikan Empat Pilar kepada mahasiswa dan masyarakat lainnya", tegasnya. "Mahasiswa merupakan garda terdepan untuk menyampaikan Empat Pilar kepada kawan-kawannya", tambahanya. □

AWG



Jakarta Selatan

Pancasila Hadir Karena Kenegarawanan Para Pendiri Bangsa

PANCASILA sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia hadir karena kenegarawanan pada pendiri bangsa yang sangat kuat. Keinginan mereka untuk menghadirkan Pancasila sebagai bentuk utuh keberagaman Indonesia sudah terlihat sejak awal perumusan Pancasila itu sendiri. Antara lain terlihat pada peristiwa fenomenal dihapusnya 7 kata dalam Piagam Jakarta.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Piagam Jakarta adalah rancangan Pembukaan UUD 1945 yang dirumuskan di Jakarta, pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini mengandung lima sila yang menjadi bagian dari Pancasila. Pada sila pertama, tercantum frasa yang dikenal sebagai ‘tujuh kata’ yakni ‘dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’. Melalui musyawarah tercapailah mufakat bahwa tujuh kata ini kemudian dihapus karena mengundang kontroversi yang berpotensi perpecahan bangsa, diganti menjadi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang biasa disapa HNW, saat hadir secara virtual pada acara Sosialisasi Empat Pilar MPR yang diselenggarakan MPR bekerjasama dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Administrasi Jakarta Selatan, di taman Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa,

Jakarta Selatan, Jumat (8/10/2021).

Hadir dalam acara yang mematuhi protokol kesehatan tersebut, Ketua FKDM Jaksel Abdul Hafid, Ketua FKDM Kecamatan Jagakarsa KH. Hasanudin dan para anggota FKDM, serta masyarakat sekitar sebagai peserta.

Lebih jauh HNW mengungkapkan, selain peristiwa 7 kata itu, pemilihan kata-kata saat perumusan Pancasila sebagai bentuk penghormatan kepada keberagaman bangsa juga mencerminkan betapa tingginya kenegarawanan mereka. “Contohnya, kata ‘Maha’ dan ‘Esa’ berasal dari bahasa Sansekerta, dan kata ‘musyawarah’ berasal dari bahasa Arab, dan masih banyak lagi” ujarnya.

HNW menilai, para tokoh besar pendiri bangsa itu juga memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi. Pertimbangan mereka dalam merumuskan, tidak lagi berpatokan kepada latar belakang suku, agama atau daerah. Namun, berpedoman kepada kemaslahatan

dan kepentingan yang lebih besar untuk seluruh rakyat Indonesia.

Melihat betapa pentingnya memahami nilai kenegarawanan itu, apalagi diimplementasikan di era kini, HNW mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan para pendiri bangsa perumus Pancasila sebagai simbol keteladanan.

Keteladanan yang bisa diambil adalah kewaspadaan, yakni mampu merasakan potensi perpecahan di tengah masyarakat karena suatu kejadian, kebijakan atau perbuatan, sekaligus mampu memberikan solusi yang terbaik dengan menghindari egoisme pribadi atau kelompok, menang-menangan dan adu kuat.

“Sekali lagi, Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mesti mencontoh apa yang mereka lakukan, lalu langsung diterapkan untuk menghadapi berbagai persoalan dan tantangan bangsa saat ini,” pungkasnya. □

DER

Peringatan Hari Santri

Hadirkan Islam Moderat untuk NKRI Bermartabat

Wakil Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., berharap, para santri bisa mengikuti jejak para pendahulunya dengan terus menjaga agar Indonesia juga merdeka dari segala bentuk neokolonialisme.

WAKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., yang juga santri alumni Pondok Gontor, mendukung komunitas santri maju dan melanjutkan peran hadirnya Islam yang moderat dan yang rahmatan lil 'alamin. Dengan kiprah dan amal shalih, santri diharapkan mampu melanjutkan peran memajukan umat. Membangun bangsa dan kemerdekaan Indonesia dengan mengisi posisi-posisi strategis di publik, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, edukatif, bisnis, ormas, maupun orpol.

"Di era Reformasi sekarang ini, tidak ada ruang yang tidak bisa diisi oleh santri. Ada santri yang menjadi Presiden, Wapres, Ketua MPR, Pimpinan DPR, Menteri, Dubes, Anggota TNI dan Polri. Santri juga ada yang jadi pimpinan Ormas dan Orpol maupun Lembaga Charity. Bahkan, tidak sedikit pula santri yang berhasil menjadi pengusaha sukses. Saat ini, kesempatan bagi santri untuk berperan semakin terbuka, tidak ada ketentuan perundangan yang menghambat kiprah santri. Para santri banyak yang mengisi posisi strategis tersebut agar dijaga sebagai amanat, agar bisa dilanjutkan, karena manfaat yang dirasakan oleh masyarakat," ujarnya melalui siaran pers memperingati Hari Santri pada Jumat (22/10/2021).

HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid, mengatakan, sejarah telah mencatat bahwa peran santri untuk menghadirkan dan menjaga kemerdekaan dan dalam proses pembentukan NKRI sangatlah besar. Selain Resolusi Jihad KH. Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober yang jadi dasar penetapan Hari Santri— tidak jadi ditetapkan tanggal 1 Muharram sebagaimana janji awal kampanye Capres Jokowi— HNW mencatat, tidak sedikit para founding fathers Indonesia yang berlatar belakang pesantren. Seperti KH Wahid Hasjim dan KH Masjkur (NU), KH Kahar Muzakkar dan Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah), KH Ahmad Sanusi, serta KH Abdul Halim (PUI), juga santri yang

pimpinan Partai Islam seperti H Agus Salim dan M. Natsir.

"Mereka telah berperan aktif bersama tokoh-tokoh Bangsa, merumuskan dasar dan konstitusi negara. Menyelamatkan Pancasila dan NKRI. Mereka adalah para santri, baik karena pendidikan di pesantren, maupun karena laku dan ilmunya yang mengamalkan ilmu-ilmu ke-Islaman. Maka sudah sewajarnya apabila para santri mempelajari dan meneruskan kiprah para Santri Pahlawan Bangsa, dalam konteks kekinian untuk menyongsong



masa depan," ujar alumnus Pondok Pesantren Modern Gontor Darussalam ini.

Para santri, kata HNW, bisa mengikuti jejak para pendahulunya dengan terus menjaga agar Indonesia juga merdeka dari segala bentuk neokolonialisme. Seperti liberalisme, hedonisme, sekularisme, separatisme, komunisme, dan radikalisme. Selain aliran-aliran itu bertentangan dengan Pancasila, juga tidak sesuai dengan ajaran Islam ahlussunnah wal jamaah yang diikuti oleh mayoritas Muslim penduduk Indonesia.

"Selain paham-paham menyimpang di atas, neokolonialisme itu bisa juga berupa kemiskinan, ketidakadilan dan kebodohan.

Santri harus berperan penting untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman-ancaman nekolonialisme tersebut. Juga menyelamatkan Indonesia dari pemberontakan PKI, sebagaimana dilakukan oleh santri-santri NU dengan GP Anshornya, dan Muhammadiyah dengan KOKAM/Pemuda Muhammadiyahnya," ujar HNW.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar pemerintah juga menaruh perhatian yang serius untuk kemaslahatan santri dan pesantren. Mengingat jasanya sangat besar yang telah dan bisa mereka sumbangkan bagi negara, dan potensi yang sangat besar dalam menjaga dan memajukan bangsa Indonesia. "Misalnya dengan memaksimalkan Perpres Dana Abadi Pesantren agar santri bisa mengakses pendidikan yang lebih berkualitas, agar bisa berperan lebih strategis lagi," ujarnya.

HNW berharap, tidak ada lagi dikotomi terkait santri dan pesantren pasca diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. "Pesantren itu tempat belajar para santri, selain dari yang berorientasi salafiyah/tradisional kitab kuning, tetapi juga ada yang modern/mu'adalah/muallimin/kitab putih. Bahkan juga pesantren terpadu yang integrasikan pendidikan umum dengan agama Islam. Itu semua menurut UU Pesantren masuk dalam kategori pesantren. Namun, selama ini ada kesan bahwa Hari Santri hanya di-peringati oleh santri, pesantren, dan Ormas yang akrab dan menggunakan kitab kuning," ujarnya.

"Saya berharap, ke depannya, santri dan pesantren yang berlatar belakang beragam tersebut dapat terus bekerja sama dan berkolaborasi dalam kehidupan dan memaknai Hari Santri, agar Santri selalu siaga ilmu, jiwa dan raga. Untuk bisa melanjutkan peran mensejarah para ulama, yang sekarang juga banyak yang wafat karena Covid-19, agar eksistensi NKRI tetap terjaga dan bisa jaya raya dalam koridor yang diwariskan para ulama pejuang bangsa," pungkasnya. □

Kabiro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR Terima Perwakilan Demonstrasi Mahasiswa



KEPALA Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI Siti Fauziah, SE., MM., menerima 8 mahasiswa perwakilan beberapa perguruan tinggi, diantaranya Universitas Pakuan Bogor, Universitas Pamulang (Unpam), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang tergabung dalam Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (Komando), pada Kamis (7/10/2021) itu melakukan aksi demonstrasi dengan menurunkan sekitar 300 mahasiswa di depan Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

Didampingi Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Setjen MPR Heri Heriawan dan Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR Budi Muliawan, dengan hangat Siti Fauziah, yang akrab disapa Ibu Titi, menerima delegasi mahasiswa itu di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR guna menampung aspirasi yang ingin mereka sampaikan.

"Memang tugas dan fungsi (Tusi) kami di MPR adalah menyerap aspirasi masyarakat termasuk dari para mahasiswa Indonesia. Kami menyambut hangat kalian semua, kami akan mendengarkan dan menampung aspirasi yang ingin disampaikan, lalu nanti akan kami teruskan kepada Pimpinan MPR," ujarnya.

Kesempatan tersebut langsung disambut pimpinan delegasi, Presidium Komando Jakarta Selatan Misbahul Anwar. Mahasiswa UMJ ini menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan resmi. Pertama, mendesak pembahasan penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kedua, memastikan Pancasila memiliki fungsi hukum yang mengikat dan memaksa. Ketiga, meletakkan Pancasila sebagai hierarki tertinggi, wujud dari kepastian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Salah satu anggota delegasi, Presidium Komando Tangerang Selatan Febriditya Ramdhan atau Adit, mahasiswa Unpam, menjelaskan bahwa tuntutan tersebut lahir tidak secara mendadak. Namun, sudah menjadi pembahasan dan perenungan sejak tahun 2018, saat Komando menyelenggarakan acara Konsolidasi Nasional dengan mengundang 48 kampus dari 21 provinsi.

"Dalam acara tersebut, kami menghimpun berbagai permasalahan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

kebijakan yang ada di daerah masing-masing. Ketika kami telaah dan pahami, lalu kami berpandangan bahwa setiap kebijakan daerah itu harus demi dan untuk kepentingan rakyat. Untuk itu, sebagai mahasiswa atas nama Tridharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, kita meminta Pancasila ditempatkan di hierarki tertinggi sebagai filter dalam perumusan peraturan perundang-undangan yang kemudian menjadi tuntutan kami saat ini," terangnya.

Dalam kesempatan itu, Ibu Titi dengan gaya khasnya yang lembut mencoba mencairkan suasana, karena seluruh delegasi mahasiswa terlihat lelah dan tegang. "Ayo diminum dulu, kalian pasti haus seharian berdemo panas-panasan di luar sana, biar rileks. Kalian berada di gedung rakyat loh," ucapnya, seraya tersenyum dan membuka kedua belah tangannya mempersilahkan mahasiswa mengambil air minum yang telah disediakan.

Menanggapi bunyi tuntutan mahasiswa, Ibu Titi mengatakan bahwa aspirasi telah diterima dengan baik. "Semua aspirasi akan secepatnya kami sampaikan kepada Pimpinan MPR. Kita semua berharap yang terbaik untuk bangsa dan negara," ujarnya.

Di akhir audiensi, Misbahul Anwar menyampaikan apresiasinya atas sambutan dan penerimaan dari Setjen MPR RI melalui Ibu Titi, Bapak Heri Heriawan dan Bapak Budi Muliawan. "Perlu kami sampaikan, aksi dan tuntutan yang kami perjuangkan dan suarakan ini, adalah murni aspirasi kami mahasiswa berdasarkan kepentingan rakyat dan kami pastikan tidak ada yang menunggangi," tandasnya. □

DER

Secara Virtual, MPR Peringati Hari Kesaktian Pancasila 2021

SEKRETARIS Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono beserta para pejabat eselon II dengan khidmat mengikuti upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila secara virtual, Jumat (1/10/2021), dari Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Acara yang dihadiri secara terbatas di kompleks Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta ini dipimpin Presiden Joko

Widodo. Hadir secara virtual para pimpinan dan anggota lembaga negara, para menteri Kabinet Indonesia Maju, para gubernur, bupati dan wali kota, keluarga pahlawan revolusi, dan undangan lainnya.

Dalam upacara peringatan itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, La Nyalla Matalitti, membacakan teks Pancasila. Kemudian, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membacakan naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. □ **DER**



Upacara Serah Terima Pemakaman Almarhum Sabam Sirait

WAKIL Ketua MPR Ahmad Basarah dan Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono menghadiri prosesi upacara serah terima pemakaman almarhum anggota MPR dari Kelompok DPD, Sabam Sirait, di Plaza Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad (3/10/2021).

Sabam Sirait tutup usia pada Rabu malam (29/9/2021) pada usia 85 tahun di RS Siloam Karawaci pada pukul 22.37 WIB. Ketua MPR Bambang Soesatyo menjadi inspektur upacara dalam pemakaman jenazah almarhum Sabam Sirait di TPM Kalibata, Jakarta Selatan. □ **DER**





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Anggota MPR Fraksi PKB

Aturan Wajib PCR Adalah Langkah Mundur

ATURAN wajib tes reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) sebagai syarat naik pesawat menuai kontroversi. Sebagian menilai cara ini ampuh memutus mata rantai penyebaran Covid-19, tetapi yang lainnya menganggap aturan ini memberatkan penumpang pesawat. Peraturan wajib PCR sebagai syarat naik pesawat terbang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, 2, dan 1 Covid-19 di Jawa-Bali. Dalam peraturan disebutkan calon penumpang wajib menyertakan tes PCR yang resmi berlaku pada 24 Oktober 2021.

Hanya selang beberapa hari, setelah mendapat kritik dari masyarakat, pemerintah mengeluarkan aturan baru melalui Inmendagri Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Mendagri Nomor 53 Tahun 2021. Dalam Inmendagri No. 55 Tahun 2021 ini, hasil tes PCR sebagai syarat terbang berlaku selama 3 x 24 jam. Pada peraturan sebelumnya, masa berlaku tes PCR selama 2 x 24 jam.

Anggota Dewan juga menyoroti kontroversi aturan wajib PCR sebagai syarat naik pesawat terbang. Bahkan, Partai Kebangkitan

Bangsa (PKB) secara tegas menolak aturan tersebut. Berkaitan dengan sikap tersebut, Majelis mewawancarai Sekretaris Fraksi PKB MPR, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz. Berikut wawancara dengan Neng Eem yang juga anggota Komisi V DPR yang membidangi masalah perhubungan. Petikannya.

Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang wajib melakukan tes PCR sebagai syarat untuk penerbangan di antar kota di Pulau Jawa dan Bali dan keluar Pulau Jawa-Bali atau masuk ke Pulau Jawa-Bali. Aturan wajib PCR ini mengundang polemik dan kontroversi di tengah masyarakat. Bagaimana pendapat ibu?

Saya melihat bahwa sebelumnya syarat untuk melakukan tes swab antigen untuk penerbangan adalah untuk mengetahui bahwa penumpang itu positif atau negatif Covid-19. Jadi, syaratnya hanya swab antigen. Padahal pada saat diberlakukan swab antigen, jumlah kasus Covid-19 sedang naik. Tetapi, ketika jumlah kasus Covid-19 sedang menurun atau melandai, justru diwajibkan untuk tes PCR sebagai syarat penerbangan.

Karena itu saya melihat kebijakan peme-

rintah ini adalah langkah mundur. Kenapa? Karena pandemi Covid-19 saat ini sudah melandai. Selain itu, masyarakat juga sudah sadar untuk melakukan vaksinasi sebagai satu kebutuhan. Pada waktu lalu, ketika swab antigen sebagai syarat penerbangan, masih banyak masyarakat yang belum atau tidak mau di vaksin. Sekarang, masyarakat sudah sadar untuk disuntik vaksin.

Itulah saya katakan kebijakan wajib PCR untuk syarat penerbangan sebagai langkah mundur. Ketika kasus Covid-19 melandai dan sudah banyak warga masyarakat divaksin, kok tes PCR malah dijadikan syarat untuk melakukan perjalanan penerbangan. Seharusnya, ketika pandemi Covid-19 sudah melandai justru inilah momentum untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.

Apalagi industri penerbangan terpuak akibat pandemi Covid-19. Dalam satu setengah tahun sejak pandemi Covid-19 pada Maret 2020, menurut asosiasi internasional penerbangan, kerugian maskapai penerbangan sekitar Rp 2.867 triliun. Itu bukan angka yang kecil. Industri penerbangan adalah bisnis yang padat modal. Ketika pandemi Covid-19 melandai, pemerintah seharusnya mendorong industri penerbangan.

Vaksinasi sebenarnya sudah bisa menjadi

syarat untuk penerbangan. Apalagi sudah ada aplikasi Peduli-lindungi. Saya juga setuju dengan penerapan protokol kesehatan. Tetapi kalau PCR menjadi persyaratan untuk perjalanan penerbangan maka akan memberatkan masyarakat. Selain harga yang cukup mahal, ekonomi juga belum pulih, sehingga amemberatkan masyarakat.

Belum lagi, banyak penumpang yang belum mengetahui syarat ini mengakibatkan tiket hangus, dan masih harus keluar biaya untuk tes PCR, kemudian mencari tempat untuk menginap karena jauh dari bandara. Misalnya, penumpang dari kota-kota kecil yang tidak ada Bandara, tentu harus mencari penginapan karena gagal terbang akibat belum PCR. Jadi, pengeluaran penumpang bertambah besar.

Jadi syarat PCR untuk penerbangan sangat tidak efektif dan tidak efisien. Tolong pemerintah mempermudah syarat penerbangan, tetapi protokol kesehatan harus ketat. Persyaratan PCR jangan menjadi protokol kesehatan. Kecuali untuk penerbangan luar negeri, saya kira wajib melakukan tes PCR. Tetapi, kalau penerbangan dalam negeri, tidak perlu PCR.

Masyarakat mengeluh sudah divaksin lengkap dua dosis, lalu mengapa harus tes PCR. Selain itu, biaya untuk melakukan tes PCR juga masih tinggi (ketika wawancara berlangsung harga PCR terendah Rp 490.000). Bahkan ada tiket penerbangan yang lebih murah dari biaya tes PCR. Bagaimana menurut pendapat ibu?

Pemerintah mentolerir biaya untuk tes PCR sebesar Rp 490.000. Tetapi pada kenyataannya, di daerah-daerah harga tes PCR tidak sesuai dengan harga maksimal yang ditetapkan pemerintah. Saya kemarin ke NTB selama tiga hari. Kembali ke Jakarta, saya harus melakukan tes PCR. Harga tes PCR di sana Rp 1,2 juta. Ini memberatkan masyarakat.

Selain itu, perlu dipertimbangkan juga masa berlaku PCR. Pada waktu lalu, masa berlaku PCR selama 14 hari. Tetapi, hasil tes PCR pada waktu itu baru keluar setelah empat hari. Biaya tes PCR waktu itu sekitar Rp 900 ribu, tetapi berlaku selama 14 hari. Sekarang, pemerintah menurunkan harga tes PCR menjadi Rp 490 ribu, tetapi masa berlakunya hanya 2 x 24 jam. Kalau dilihat sama saja.



Tetapi, kabar terakhir, pemerintah berencana menurunkan biaya tes PCR menjadi sekitar Rp 300 ribu. Bagaimana pendapat ibu?

Presiden sudah merespon persoalan PCR ini, tentu kita apresiasi. Pemerintah ingin menurunkan harga tes PCR menjadi sekitar Rp 300 ribu. Kita apresiasi kepada pemerintah dan presiden yang bisa memahami situasi dan kesulitan yang dihadapi masyarakat, terutama para penumpang pesawat terbang. Sebab, masyarakat saat ini masih mengalami kesulitan ekonomi.

Apakah ibu melihat adanya keberpihakan pemerintah terhadap para penyedia tes PCR? Tes PCR sudah menjadi ladang bisnis?

Itu adalah asumsi yang berkembang di masyarakat. Jangan sampai masyarakat menganggap asumsi itu benar. Masyarakat berasumsi jangan-jangan ada bisnis di balik wajib tes PCR sebagai syarat penerbangan.



Jangan-jangan pemerintah berpihak kepada pelaku bisnis PCR. Atau jangan-jangan ada pejabat atau elit politik yang memasok PCR itu. Sebab, PCR masih impor. Jadi, ada yang mengambil untung di balik pengadaan PCR ini. Masyarakat akan berasumsi seperti itu dan menganggap kebijakan pemerintah itu untuk melindungi pebisnis PCR ini.

Jangan sampai asumsi masyarakat itu kemudian dianggap benar. Kalau saya menganggap asumsi masyarakat itu tidak benar. Saya berharap itu asumsi yang tidak benar.

Apakah persyaratan tes Antigen atau tes PCR juga bisa mendorong adanya pemalsuan-pemalsuan hasil tes?

Bisa jadi. Pada waktu persyaratan masih tes Antigen, banyak terjadi pemalsuan. Atau, datang ke laboratorium, tanpa melakukan tes, tetapi mendapat hasil tes Antigen atau PCR. Ada juga seperti itu. Memang hal itu rentan. Tetapi saya tidak tahu karena bukan ranah saya. Bisa juga terjadi pemalsuan karena ada orang yang berkepentingan dan mendesak sehingga harus mencari jalan pintas seperti itu.

Bagaimana sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap tes PCR sebagai syarat untuk melakukan perjalanan dengan pesawat terbang?

Sikap PKB tegas menolak adanya tes PCR sebagai syarat untuk melakukan perjalanan penerbangan. Itu adalah sikap PKB.

Bagaimana sikap dewan terhadap kontroversi PCR ini?

Karena saya berada di Komisi V, di bidang perhubungan yang mengatur konektivitas dan mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, kebijakan pemerintah ini akan berdampak pada bidang perhubungan bisa penerbangan, perjalanan darat maupun laut. Karena itu, ketika ada persyaratan tes PCR untuk penerbangan, misalnya, maka ekonomi di bidang perhubungan bakal terkena dampak, termasuk para pelaku bisnis transportasi. Pasti, ini akan menghambat pertumbuhan perekonomian.

Saya setuju dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kita tetap menolak tes PCR sebagai syarat untuk perjalanan penerbangan. Suara masyarakat seperti itu. Kita berpihak kepada rakyat karena suara rakyat banyak yang menolak tes PCR untuk syarat perjalan penerbangan. □

Zikir dan Shalawat untuk Bangsa *dan Negara*

MUBALIGH terkenal **Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf** mengatakan, Indonesia adalah bangsa yang besar. Sebagai bangsa besar pasti besar pula masalahnya. “Tapi jangan berkecil hati, bangsa Indonesia juga bangsa yang beragama, bangsa yang ber-Tuhan,” ujar Habib Syech dalam ceramahnya pada acara Temu Tokoh Nasional MPR RI di Gedung Bustanul Asyikin, Solo, Jawa Tengah, 6 Oktober 2021.

Kalau agama Islam, lanjut Habib Syech, Tuhannya adalah Allah SWT., maka kepada Allah-lah kita berdoa untuk memohon pertolongannya agar masalah bangsa cepat hilang, diganti dengan kebahagiaan.

“Yang penting, dalam menjalani kehidupan, bangsa ini mesti mencari ridho Allah dan ridho Rasulullah. Dari dua hal itu saja maka insya Allah negeri kita akan cepet baik-baik saja, dan akan maju ke depannya,” kata Habib Syech. □

DER



Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf

Di Masa Pandemi *Indonesia Butuh Banyak Gagasan*

JUHANA Sutisna atau populer sebagai Joe Project P, adalah sebuah grup komedi musikal era tahun 90-an, sangat mengapresiasi setiap gagasan cemerlang untuk membantu rakyat di masa sulit, seperti di saat pandemi Covid-19 ini.

Ketika didaulat menjadi MC pada deklarasi Serikat Gotong Royong (SRGR) bentukan Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid, baru-baru ini, Joe menegaskan, SRGR adalah sebagai bagian bentuk gagasan itu. "Makanya begitu saya dapet info soal SRGR ini, wah luar biasa gagasan ini," ungkap Joe.

"Di tengah kondisi serba sulit, pandemi bukan hanya soal ekonomi, tapi juga ide dan kreativitas terhenti. Jika di saat kita kebingungan seperti ini muncul gagasan kerja sosial yang luar biasa, makanya saya terpanggil untuk terlibat," tambahnya. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Joe Project P



Hana Hasanah Shahab

Dukung dan Nikmati Wisata Alam Indonesia

BAKAR ikan di warung kecil tepi laut, hal biasa jika dilakukan nelayan atau ibu-ibu nelayan. Tapi, jika yang melakukan seorang **Hana Hasanah Shahab**, mantan senator asal Gorontalo, istri Pimpinan MPR RI Fadel Muhammad tentu saja luar biasa.

"Kami biasa mampir di warung-warung kecil di tepi laut, selesai wisata. Di warung itu, saya pasti minta gantian bakar ikan, soal asap gak masalah buat saya, paling perih dan mata merah," cerita Hana.

Hana dan keluarga memang kerap memilih liburan wisata ke berbagai destinasi di Indonesia. Lokasi favoritnya wisata alam laut desa Olele, Otje Garden desa Loppo, dan melihat hiu paus di desa Botubarani Gorontalo. "Keren abis ya alamnya. Diving, snorkling atau hanya menikmati keindahan lautnya sangat bagus," ujarnya. □

DER

Kabuyutan Dayeuh Luhur



Tetap Menjaga Tradisi Leluhur di Tengah Kota Bandung

DI SAAT Indonesia mulai memasuki era revolusi industri 4.0, tapi di sebuah kawasan di Indonesia yang justru di daerah perkotaan, masih ada komunitas yang tetap mempertahankan tradisi leluhurnya. Mereka adalah kelompok masyarakat yang belum banyak tersentuh oleh kemajuan teknologi, dan mereka tetap teguh mempertahankan adat kebiasaan peninggalan nenek moyang mereka.

Komunitas masyarakat dimaksud adalah Kabuyutan Dayeuh Luhur. Sebuah komunitas kecil yang tinggal di pemukiman padat penduduk di Kelurahan Geger Kalong, Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kabuyutan Dayeuh Luhur sampai kini tetap setia menjaga identitas dan kearifan lokal peninggalan nenek moyang mereka.

Keberadaan Kabuyutan Dayeuh Luhur di era kemajuan teknologi sekarang terasa unik. Seluruh sisi kehidupan mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Cara berpakaian, salah satu contohnya. Di saat orang berlomba untuk membeli pakaian bermerek, komunitas Kabuyutan Dayeuh Luhur tetap menjaga tradisi leluhurnya, berpakaian dominan warna

hitam, dan memakai ikat kepala khas Sunda.

Jangan berharap di komunitas menemukan rumah atau tempat tinggal terbuat dari tembok, apalagi rumah gedong. Tempat tinggal Komunitas Kabuyutan, sesuai tradisi leluhur mereka, menggunakan bahan dasar dari alam, seperti bambu, rumbai, batang pohon, dan batu alam.

Begitu pula menu makanan semuanya berbahan dasar dari alam, dan tata cara pengolahannya pun secara alami pula. Contohnya, jagung rebus, ubi rebus, kacang tanah rebus, kelapa muda, dan lalapan.

Oleh karena kehidupan Komunitas Kabuyutan Dayeuh Luhur sangat bersahabat dengan alam, sehingga menarik perhatian warga masyarakat dari luar komunitas ini. Tidak sedikit mereka melakukan kunjungan ke sana hanya sekedar ingin melihat dari dekat kehidupan warga masyarakat di sana, atau sekedar memenuhi rasa keingintahuannya. Salah satu di antaranya adalah Wakil Ketua MPR RI, Dr. Jazilul Fawaid, SQ., MA.

Pada akhir September silam, tepatnya Sabtu, 25 September 2021, Wakil Ketua MPR

RI, Jazilul Fawaid, melakukan kunjungan silaturahmi ke komunitas adat Kabuyutan Dayeuh Luhur. Kehadiran Gus Jazil, begitu Jazilul Fawaid biasa disapa, diterima oleh sesepuh dan tokoh kabuyutan, Abah Yusuf. Selanjutnya, Gus Jazil dibawa ke padepokan berbentuk bangunan lantai dua berbahan dasar bambu dan material alam lainnya.

Sebagai tamu, Gus Jazil pun disuguhi berbagai panganan khas, berupa makanan rebusan. Tidak cukup itu saja, Gus Jazil juga berkesempatan menyaksikan pagelaran seni pencak silat yang dibawakan oleh anak-anak muda Kabuyutan yang usia belasan tahun. Dalam peragaan tersebut, para pesilat mendemonstrasikan silat khas Sunda dan demo ketahanan tubuh. Satu orang pesilat dikeroyok oleh 10 sampai 15 orang.

Di komunitas ini, pencak silat tidak untuk gagah-gagahan, apalagi pamer kedigdayaan. Pencak silat hanya untuk olah rasa dan olah raga. Juga untuk menumbuhkembangkan karakter kami, karena dalam setiap gerakan silat banyak pelajaran dan hikmah yang bisa diambil untuk menjalani kehidupan," ujar Abah Dayat, salah satu pesilat.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

NKRI Harga Mati

Gus Jazil mengucapkan syukur berkesempatan sowan ke Kabuyutan Dayeuh Luhur, yang merupakan salah satu sentrum pelestarian nilai-nilai budaya suku Sunda di Jawa Barat. Buktinya, komunitas Kabuyutan Dayeuh Luhur dengan teguhnya berpegang serta berperilaku mengikuti tradisi leluhur.

Karena itu, keberadaan Kabuyutan ini patut diapresiasi. Sebab, di era sekarang, banyak sekali tradisi budaya asli Indonesia yang tergerus perkembangan zaman dan dikhawatirkan akan menghilang. Namun, masyarakat adat ini bisa merawat budaya leluhur terutama kepada generasi muda, sehingga budaya tetap terjaga kelestariannya.

“Yang membuat saya makin kagum adalah pesan dari Abah bahwa bagi seluruh warga Kabuyutan, NKRI dan Merah Putih adalah harga mati, serta kebhinnekaan Indonesia

mesti dijaga. Ternyata, semangat Empat Pilar yang merupakan misi MPR sudah lama diimplementasikan di sini,” kata Gus Jazil.

Pesan lain adalah hidup itu harus manisaput. Walaupun dalam menjalani kehidupan bertemu dengan asam, pahit dan getir, namun manis harus diraih dengan upaya yang baik. Sama seperti kehidupan bangsa Indonesia selama 76 tahun terakhir, ada pahit, getir, susah, sengsara dalam menjalani proses membangun bangsa. Tapi semua, kata Gus Jazil, harus dirasakan manis. Sebab, rasa manis ini akan memberikan semangat.

Bagi Abah Yusuf, pola hidup yang dijalani Kabuyutan Dayeuh Luhur bertujuan untuk menghormati para leluhur tatar Sunda. “Kami mengikuti leluhur kami, dan itu merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang harus kami jaga. Menjaga di sini artinya kami melestarikan budaya bangsa,” katanya.

Menurut Abah, komunitas ini bukan hanya

terdapat di Bandung, namun juga ada di beberapa wilayah lainnya. Meski hidup di tengah kepadatan penduduk, tetapi tidak ada gesekan apapun dengan masyarakat. “Kami saling menjaga dan menghormati satu sama lain, sehingga kerukunan terjaga,” kata Abah.

Dalam kehidupan sehari-hari, Kabuyutan ini juga menjaga hubungan dengan komunitas adat lainnya, terutama di daerah Jawa Barat. Berbagai kegiatan budaya, baik lokal maupun nasional, sebisa mungkin diikuti dengan maksud menjaga hubungan dengan masyarakat adat lainnya, terutama even pencak silat.

“Khusus untuk pencak silat, kami terbatas pada pelestarian budaya. Tapi, kalau untuk serius berkompetisi di ajang bergengsi mudah-mudahan kami akan ikut jika memungkinkan. Kami suah siap untuk itu,” ujar Abah. □

MBO/DER



Anggia Ermarini, MKM

Sumeni di Era Modern



FOTO-FOTO: STIMEWA

PENANGGULANGAN pandemi Covid-19 menunjukkan hasil yang makin menggembirakan. Penularan virus corona semakin melandai dan terkendali. Jumlah pasien yang terpapar virus ini terus berkurang. Daerah-daerah yang sempat masuk kategori zona merah kini berangsur-angsur membaik. bahkan, Banyak di antaranya mulai menerapkan gaya hidup new normal. Praktis, ancaman yang sebelumnya sempat ditimbulkan oleh Covid-19, pelan tapi pasti mulai berkurang secara signifikan.

Namun, kekhawatiran yang pernah ditimbulkan oleh Covid-19 itu belum sepenuhnya terlupakan. Apalagi, imbas pandemi virus ini telah meluluhlantakkan berbagai sektor kehidupan. Praktis, hanya bidang pertanian saja yang berhasil luput dari rongrongan corona. Selama pandemi berlangsung, sektor pertanian tetap berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor ekonomi, karena tetap bertumbuh sebesar 19%.

Sayang, pertumbuhan sektor pertanian ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan nasib dan kesejahteraan petani. Terbukti, di sepanjang luas areal persawahan begitu mudah ditemukan petani miskin. Sebagian di antara mereka bahkan tidak layak disebut petani, karena sudah tidak memiliki lahan sawah lagi. Dan, menggantungkan hidupnya bekerja sebagai buruh tani. Demikian pula nasib pengusaha sektor ternak dan perikanan.

“Waktu harga telur anjlok, peternak tidak meminta banyak. Asal telurnya terjual dan semua sama-sama untung, bagi mereka itu sudah cukup. Kalau harga telur terlalu tinggi, daya beli masyarakat juga tak bisa menjangkau. Pokoknya sama-sama untung, sama-sama senang,” kata Anggota MPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Anggia Ermarini, MKM., (47) kepada Majalah *Majelis* beberapa waktu lalu.

Petani dan peternak, kata Anggia, membutuhkan campur tangan pemerintah secara lebih banyak dan lebih kreatif. Pada kasus jatuhnya harga telur misalnya, pemerintah harus berfikir kreatif, antara lain dengan menyertakan telur menjadi bagian dalam program bantuan sosial. Atau menggunakan telur sebagai bahan setengah jadi, seperti produksi tepung telur.

Pada saat yang sama, menurut pimpinan Komisi IV DPR RI, ini pemerintah perlu bekerja lebih keras lagi dalam membangun dunia pertanian, perikanan dan peternakan. Jangan sampai, proyek-proyek pembangunan yang sudah direncanakan mandek di tempat, atau malah tidak dilaksanakan, sebagaimana mestinya. Seperti penambahan areal sawah di lahan gambut. Juga pembangunan *food estate* yang saat sekarang seolah menguap begitu saja. Serta mekanisasi pertanian yang terdengar melambat.

“Pemerintah harus berbuat seimbang. Jangan melulu memikirkan dan menghabiskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, sementara sektor pertanian dan peternakan terkesan kurang terurus. Padahal, saat pandemi lalu pertanian berkontribusi besar terhadap pertumbuhan sektor ekonomi,” kata perempuan kelahiran Sragen, Jawa Tengah, 25 September 1974, ini.

Jika pemerintah memberikan perhatian lebih kepada sektor pertanian, niscaya kata Anggia, sumbangsihnya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin besar. Terbukti pada saat pandemi Covid-19 pertanian memberi kontribusi yang signifikan, sementara sektor-sektor yang lain mati suri.

“Kalau kebutuhan pangan tidak dipenuhi melalui mekanisme impor, berapa banyak devisa bisa diselamatkan. Petani, peternak, dan pengusaha perikanan bisa meningkatkan kesejahteraannya,” kata Anggia lagi.



Fatayat NU

Di satu sisi, menurut Anggia, pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai persoalan pelik, tetapi di sisi lain, banyak khikmah yang didapatkan. Salah satunya adalah kesempatan berkumpul bersama keluarga menjadi lebih banyak.

Kesempatan itu ia gunakan untuk menggantikan hari-hari lain yang sudah lewat tanpa kebersamaan dengan suami dan anak-anaknya. Dan, mengisinya dengan kebersamaan, termasuk menyediakan sarapan untuk empat orang anaknya, dengan menu-menu yang paling mereka senang.

Pandemi, menurut Anggi, juga menimbulkan kedulian sosial yang sangat tinggi. Itu ia lihat dan rasakan sendiri. Karena selama pandemi, Anggi berusaha selalu menyediakan menu makanan sehat, setiap

hari Jumat. Makanan itu sengaja ia beli dari para pedagang di sekitar rumahnya. Dengan cara ini mereka juga merasakan kebahagiaan, karena dagangannya ludes terjual.

Pengalaman Anggia Ermarini dikancah politik nasional terbilang baru seumur jagung. Ia terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari dapil Jawa Timur VI. Perolehan suara yang dikantongi lumayan mencengangkan, mencapai 113.957 pemilih. Keberhasilan tersebut tak lepas dari pembawaannya yang simpatik dan menyenangkan. Dan, itu membuat Anggia gampang diterima oleh konsituen, juga lawan dan kawan politiknya.

“Saya merasa, kelemahan saya itu tidak bisa marah dan teriak-teriak. Itu saya rasakan sebagai kelemahan. Tetapi saya punya pendirian, bukan berarti saya kalah. Karena pada saat emosi,



ada sesuatu yang out of control, jadi saya benar-benar mencoba menghindari. Apalagi, saat emosi cara berfikir dan bertindak itu tidak akan rapi, itu dalam pikiran saya,” kata anak keempat dari lima bersaudara pasangan Mohamad Tohir dan Mariatul Kiptiyah lagi.

Meski masih tergolong baru, kiprah Anggia di berbagai organisasi yang pernah digelutinya membuat kandidat Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ini tak butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri dengan hiruk pikuk dunia legislatif di Senayan. Ia juga gampang beradaptasi dengan tugas serta kewajibannya. Apalagi, setelah Fraksi PKB DPR RI memberinya kepercayaan menjadi salah satu pimpinan komisi, yaitu Komisi IV membidangi pertanian, lingkungan hidup, perikanan, dan peternakan.

Anggia sendiri merupakan satu dari sedikit politisi Partai Kebangkitan Bangsa yang tak sempat menyelami kehidupan pesantren. Dari kecil hingga sekolah lanjutan atas, ia merampungkan pendidikannya di sekolah umum. Tetapi dia beruntung, di sepanjang pendidikan dasar hingga sekolah menengah atas, Anggia cukup memperoleh pelajaran agama dari pendidikan diniyah yang ada dekat rumahnya. Bahkan, pada bulan Ramadan, pendidikan diniyah itu seolah berubah menjadi pesantren dengan segala aktivitas yang menyerupai pondok pesantren.

Semasa berseolah di Diniyah, baik sore selepas Asyar maupun malam setelah Maghrib, Anggi merasakan kesenangan yang sangat. Karena saat itu, ia bukan hanya bisa belajar agama tetapi juga bertemu teman-teman sebaya. Apalagi jika gurunya berhalangan mengajar.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Pejuang Wanita

Sebelum terjun ke dunia politik praktis, Anggia Ermarini adalah Ketua Umum PP Fatayat NU. Pada saat bersamaan, istri dari Sultonul Huda ini juga dipercaya sebagai Sekretaris PP LKNU. Anggi pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ia dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Korp PMII Putri Cabang Kota Malang, 1996-1997, juga Ketua 1 PB Korp PMII Putri 1997-2000. Sebagai politisi muda, prestasi Anggi tak bisa dipandang sebelah mata, terbukti Partai Kebangkitan Bangsa memberinya amanat menjadi Wasekjen DPP PKB.

“Saya meretas jalan menjadi politisi ini sejak masih kecil. Saya gemar berorganisasi, hingga lulus perguruan tinggi. Segudang pengalaman itu yang membuat saya sadar bahwa perjuangan yang dilakukan di luar parlemen memiliki efek sangat kecil dibanding jika





dilakukan di ranah legislatif,” katanya.

Kesadaran itu membuat Anggi berani bermimpi untuk menjadi politisi. Semata-mata agar apa yang dicitakan lebih mudah dicapai, meski kenyataannya tidak selalu berhasil. Apalagi kasus-kasus yang selama ini ia perjuangkan dan menyita keprihatinannya masih mudah ditemukan di tengah masyarakat. Seperti kasus kematian bayi baru lahir, ibu hamil dan stunting.

Meski berbeda zaman dan tujuan, taktik dan semangat perjuangan Anggia Ermarini ini mengingatkan kita pada sosok Sumeni, pejuang Perempuan asal Sragen. Sumeni adalah seorang mata-mata Republik Indonesia yang ditugaskan mencari tahu info tentang kekuatan Hindia Belanda.

Agar tugasnya bisa berhasil, Sumeni rela dipersunting oleh orang yang bekerja untuk kolonialis Belanda. Itu ia lakukan semata-mata agar bisa berhubungan dengan orang-orang Belanda, ataupun orang yang bekerja kepada kolonialis Belanda. Dengan begitu Sumeni bisa mengetahui seberapa besar kekuatan kolonialis, dan melaporkannya kepada tentara Indonesia. □

MBO



Biodata

Nama : **Anggia Erma Rini M.K.M**
Tempat/Tgl. Lahir : Sragen, 25 September 1974

Pendidikan formal:

1. S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Malang
2. S2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
3. S3 Administrasi Publik Universitas Padjajaran

Jabatan:

1. Ketua Umum PP FATAYAT Nahdlatul Ulama
2. Komite Pengarah Kerangka Kerja Antar Agama Bank Dunia
3. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PKB

Work Shop dan Pengalaman Lainnya:

1. Mewakili DPP PKB pada Annual Assembly Meeting oleh Centrist Democrat International (CDI), Roma, Italia 2019
2. Konferensi Internasional Solidaritas Muslim Azerbaijan, Desember 2017
3. Program Pemimpin Pengunjung Internasional, IVLP, AS, April 2016
4. Konferensi AIDS Internasional, Durban, 2017
5. Pertukaran Pemimpin Muslim Muda ke Jepang, November 1998.
6. Survei untuk 10 pesantren tentang HIV AIDS dan Masalah Kesehatan Reproduksi Remaja 2003 tentang Program Kesehatan Reproduksi Remaja yang didukung oleh UE.
7. Presentasi tentang bekerja dengan Kaum Muda “HIV AIDS dan Kesehatan Reproduksi Pada Sepertiga Asia Pasifik mengenai Kesehatan Reproduksi dan Konferensi Seksual 2005” di Kuala Lumpur.
8. Pelatihan untuk Advokasi dan program berbasis masyarakat (pemberdayaan kaum muda dan perempuan) di Bangkok, Desember 2003.
9. Pelatihan Proses Dokumentasi mengenai program Kesehatan Seksual dan Reproduksi di Vadodara, Ahmadabad India, Agustus 2004
10. Narasumber untuk ICAAP 2007 di Kolombo dan IIPC (konferensi pra -ICAAP untuk Antaragama di Kolombo, dengan topik Peran Komunitas Muslim)
11. Program Koordinator Demonstrasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja - Model Berbasis Pesantren 2002-2005
12. Kursus Singkat tentang Manajemen Pendidikan di Leeds University, Februari UK 2007
13. Narasumber tentang “ISLAM dan HIV & AIDS” - Konsultasi Internasional, Johannesburg, Republik Afrika Selatan, Desember 2007.
14. Sebagai Komite Pengarah Pra Konferensi Antaragama ICAAP ke-9 di Bali, Agustus 2009
15. Sebagai Ketua ICAAP ke-9 (Konferensi Internasional tentang HIV & AIDS ASIA Pasifik) tentang masalah Mobilisasi Komunitas, Bali, Agustus 2009
16. Pemimpin tim Saluran Adaptasi Harapan (WVI dan INERELA+) dari Muslim Afrika ke Muslim Indonesia
17. Publikasi pemimpin tim: Kondom; Bagaimana tanggapan Komunitas Iman terhadap INTERNA dan KPAN
18. Anggota Kelompok Kerja Multi-Faith tentang Penguatan Kepemimpinan Agama dalam Respons terhadap HIV yang berbasis di Jenewa, sampai sekarang.
19. Manajer Proyek Global Fund R9 tentang Indonesia Menanggapi HIV dan AIDS
20. Penasihat USAID-TB CEPAT (Pemberdayaan Masyarakat Menentang TBC)

MPR Jalin Kerjasama dengan Mahendradatta

Kali ini MPR menjalin kerjasama dengan Universitas Mahendradatta terkait perpustakaan. Kerjasama itu diapresiasi oleh anggota MPR dari Kelompok DPD.

RATUSAN mahasiswa dan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat yang memenuhi salah satu aula Gedung Conefo, Universitas Mahendradatta, Denpasar, Bali, menjadi saksi penandatanganan kerjasama Perpustakaan MPR dengan Universitas Mahendradatta. Acara dengan tema 'Pustaka Akademik MPR' yang digelar pada 6 Oktober 2021 itu tidak hanya penandatanganan 'MoU' dan 'MoA,' namun juga digelar diskusi dengan tema 'Penguatan Pengaturan Kelembagaan Badan Pembina Ideologi Pancasila, Perluakah?'

Hadir dalam kegiatan, anggota MPR dari

panjang. "Tak mudah untuk melewati perjalanan waktu hingga kita tetap bisa eksis", tutur Putri Anggreni. "Kita menapaki jalan dengan kepastian", tambahnya. Agar universitas yang berdiri pada 1963 itu bisa beradaptasi dengan zaman, menurut Rektor Putri Anggreni, Mahendradatta akan bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Yusniar dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Universitas Mahendradatta yang telah memfasilitasi 'Pustaka Akademik MPR'. "Perpustakaan MPR telah menjalin kerja sama dengan berbagai

harapnya.

Kehadiran tim dari Setjen MPR disambut dengan ramah oleh Arya Wedakarna. "Selamat datang di Bali," sapaunya. Kehadiran tim MPR di Pulau Dewata disebut ikut menggerakkan perekonomian masyarakat. "Kita mengapresiasi Perpustakaan MPR yang telah menjalin kerja sama dengan Universitas Mahendradatta", tuturnya. Dia berharap, kerjasama yang telah dijalin dapat memberi manfaat bagi civitas akademika pada khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya.

Dalam diskusi yang digelar, Arya Wedakarna



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Kelompok DPD, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III; Kepala Perpustakaan MPR, Yusniar SH; Rektor Universitas Mahendradatta, Dr. Putri Anggreni; serta para dekan dan kepala jurusan di lingkungan perguruan tinggi itu.

Putri Anggreni dalam sambutan mengatakan, civitas akademika dan perwakilan elemen masyarakat pada hari itu bisa berkumpul untuk menghadiri kegiatan 'Pustaka Akademik MPR'. "Perguruan tinggi ini sangat mengapresiasi kerja sama ini," tuturnya. Dia berharap, kegiatan ini bisa berkelanjutan. "Banyak yang bisa kita tindaklanjuti dari kerja sama ini", harapnya. Untuk itu, ia mendukung acara yang digelar pada hari Rabu itu.

Perguruan tinggi swasta pertama di Bali yang awalnya bernama Universitas Marhaen ini, memang telah melewati perjuangan

panjang, terutama perguruan tinggi", ungkapnya. Menurut Yusniar, kerjasama dengan berbagai pihak itu telah dilakukan sejak 2017. "Sebelum dengan Mahendradatta, kita telah melakukan MoU dan MoA dengan Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon", paparnya.

Harapan dari setiap kerjasama yang telah dijalin dengan berbagai pihak, menurut Yusniar, dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan pecinta buku dalam upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Yusniar mempersilahkan para peserta berkunjung ke Perpustakaan MPR. "Perpustakaan MPR terbuka bagi umum," katanya. Bila tidak bisa datang secara langsung, masyarakat dipersilahkan untuk mengunjungi kanal-kanal internet atau media sosial yang dikelola. "Semoga kerjasama ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat",

mengatakan, salah satu tugas MPR adalah menyosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang populer dengan sebutan Empat Pilar MPR. Terkait pemahaman dan pengamalan Empat Pilar, Arya Wedakarna menegaskan, Bali adalah bentengnya. "Masyarakat Bali mempunyai banyak peran dan kontribusi terhadap bangsa Indonesia terkait dengan Pancasila", paparnya.

Untuk menjaga Pancasila, ditegaskan oleh Arya Wedakarna, BPIP harus diperkuat. "Untuk itulah maka lembaga ini perlu diatur dalam undang-undang", tegasnya. Diakui lembaga ini diisi oleh tokoh-tokoh agama dan kaum nasionalis yang tak perlu diragukan kapasitasnya. "Untuk itu BPIP perlu diperkuat", ucapnya. □

AWG

Menjawab Hoaks Amandemen

Lewat satu buku, Ketua MPR Bambang Soesatyo menjawab, membantah, dan meluruskan hoaks yang bersliweran di masyarakat terkait amandemen. Buku ini diberi judul dengan sangat tegas dan langsung kepada permasalahan.

KETIKA disosialisasikan pentingnya menghidupkan kembali haluan negara sebagai arah pembangunan nasional, muncul beragam tanggapan di masyarakat. Banyak yang mendukung perlunya kehadiran kembali haluan, seperti di era Orde Baru dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara, GBHN. Seiring dukungan tersebut, muncul pula dinamika di tengah masyarakat dan partai politik mengenai apa landasan hukum yang tepat untuk haluan negara itu. Haluan negara yang kelak dinamakan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) itu landasan hukumnya cukup dituangkan dalam undang-undang ataukah perlu dimaktubkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Bila disepakati termuat dalam undang-undang dasar maka perlu dilakukan amandemen.

Ketika sosialisasi tentang haluan negara yang kerab dibarengi dengan ungkapan-ungkapan amandemen terbatas, hal demikian membuat lagi-lagi menimbulkan dinamika, perdebatan, bahkan kecurigaan di antara warga masyarakat dan partai politik. Masyarakat tidak khawatir bila amandemen dilakukan hanya untuk kepentingan PPHN, namun banyak yang curiga tentang kemungkinan amandemen bisa digunakan atau diboncengi untuk kepentingan yang lain, seperti perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Isu amandemen yang diboncengi kepentingan lain ini rupanya sangat masif di tengah masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai penolakan. Bila gerakan menolak amandemen menguat dan mampu menjadi kekuatan yang menekan maka rencana MPR untuk memasukkan haluan negara dalam undang-undang dasar bisa gagal.

Agar kecurigaan dari masyarakat tidak semakin membesar dan keinginan melakukan amandemen terbatas hanya untuk haluan negara bisa terlaksana, membuat Ketua MPR Bambang Soesatyo rajin membantah kecurigaan dan meluruskan niat awalnya. Bantahan dan meluruskan apa yang terkait masalah haluan negara dan amandemen itu tidak hanya dilakukan dalam setiap sosialisasi dan webinar Empat Pilar MPR, namun juga dalam bentuk buku. Dalam buku yang berjudul *Negara Butuh Haluan* itulah pria yang akrab disapa Bamsuet itu men-Jawab Hoaks Amandemen.

Buku yang bercover dirinya duduk di atas kereta yang sedang melaju itu sangat istimewa, sebab diberi pengantar oleh Rektor IPB, Prof. Dr. Arif Satria dan Guru Besar Ekonomi Politik IPB, Prof. Didin S. Damanhuri, SE., MS., DEA.

Buku setebal 132 halaman itu terbagi dalam dua bab, bagian. Pada *Bagian 1* itulah Bamsuet mengutarakan berbagai bantahan dan pelurusan terkait haluan negara dan amandemen.

Dalam tulisan yang berjudul *Amandemen Hanya untuk PPHN*

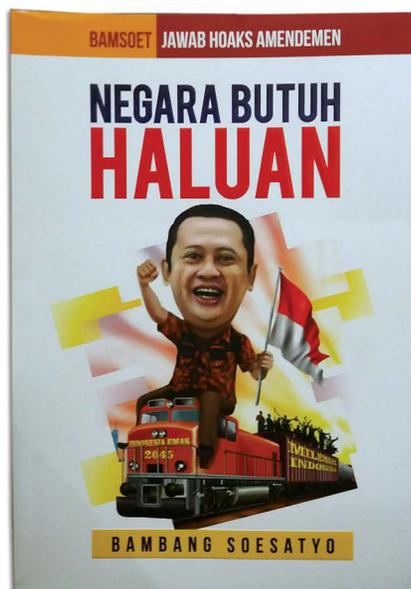
Bukan yang lain, halaman 25, Bamsuet mengatakan, amandemen terbatas UUD tidak akan menjadi bola liar ataupun kotak Pandora, khususnya terkait perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode. Dalam tulisan ini, ia mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa presiden mendukung dilakukan amandemen terbatas hanya untuk menghadirkan PPHN dan tidak melebar ke persoalan lain.

Dari judul dan isi tulisan itu, Bamsuet jelas-jelas membantah adanya boncengan kepentingan bila amandemen dilakukan. Judul-judul yang lain dalam *Bagian 1* juga demikian. Judulnya sangat tegas sehingga bila dibaca dari judulnya saja pembaca sudah tahu isinya. Lihat saja judul *Tidak Ada Rekomendasi Ubah Masa Jabatan Presiden, Wacana 3 Periode Bukan*

Bersumber dari MPR, dan Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Tidak Akan Melebar.

Bamsuet serius bangsa ini mempunyai haluan negara, sebab seperti yang ada dalam *Prakata*, halaman 18, mengatakan pembangunan membutuhkan kesinambungan. Apa yang dikatakan diperjelas dalam kesimpulan poin 3, *memastikan adanya satu pedoman/arah yang jelas dalam perencanaan, penyusunan, keputusan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan nasional di segala bidang kehidupan (ekonomi, sosial, budaya, maupun mental dan spiritual), yang menjamin sinergitas, integrasi, dan keberlanjutan pembangunan pusat dan daerah, yang tidak bergantung pada momen elektoral*, halaman 129. □

AWG





Oleh:
Lestari Moerdijat, SS., MM.
Wakil Ketua MPR RI

Pengendalian Covid-19 Ujian Nilai-Nilai Empat Konsensus Kebangsaan

BERBAGAI upaya pengendalian Covid-19 di Tanah Air hampir dua tahun terakhir ini mulai menunjukkan hasil. Catatan Satgas Covid-19 hingga Ahad (10/10) jumlah penambahan kasus positif virus korona tercatat 894 kasus. Per tanggal tersebut, total kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 4,227 juta sejak pertama terkonfirmasi pada 2 Maret 2020 lalu. Artinya, total penambahan kasus pada Ahad (10/10) itu mencatat rekor terendah sejak 21 Juni 2021 dengan 862 kasus. Capaian tersebut memperlihatkan keberhasilan kolaborasi seluruh elemen bangsa, sekaligus menghadirkan tantangan baru untuk mempertahankannya.

Bagaimana kita mampu mempertahankan agar Covid-19 tetap terkendali di Bumi Pertiwi di tengah sejumlah uji coba berbagai kegiatan publik, menyusul tren berkurangnya jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air? Apalagi, para ilmuwan juga mulai memperkirakan munculnya gelombang ketiga penyebaran Covid-19 di masa datang.

Apakah kita mampu menjawab tantangan dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 di tengah ancaman gelombang ketiga, dan bayang-bayang kegagalan mengatur pergerakan orang? Kita harus mampu. Karena kita pernah dihadapkan pada banyak tantangan di masa lalu, dan kita hadapi dengan berbagai upaya berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar MPR, yaitu: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhinneka Tunggal Ika.

Saat ini kita memerlukan beragam upaya yang berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar MPR itu untuk mempertahankan agar Covid-19 tetap terkendali di Tanah Air. Kita perlu gerakan gotong-royong untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi agar bisa segera bangkit. Meski dari sisi pemerintah juga sudah menyalurkan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat.

Dengan semangat gotong-royong pula pemerintah juga telah

menggulirkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usaha pada masa pandemi Covid-19. Nilai-nilai persatuan dan rela berkorban seharusnya mampu mendorong anak bangsa untuk menyatukan langkah dalam setiap upaya mempertahankan terkendalnya virus korona di nusantara.

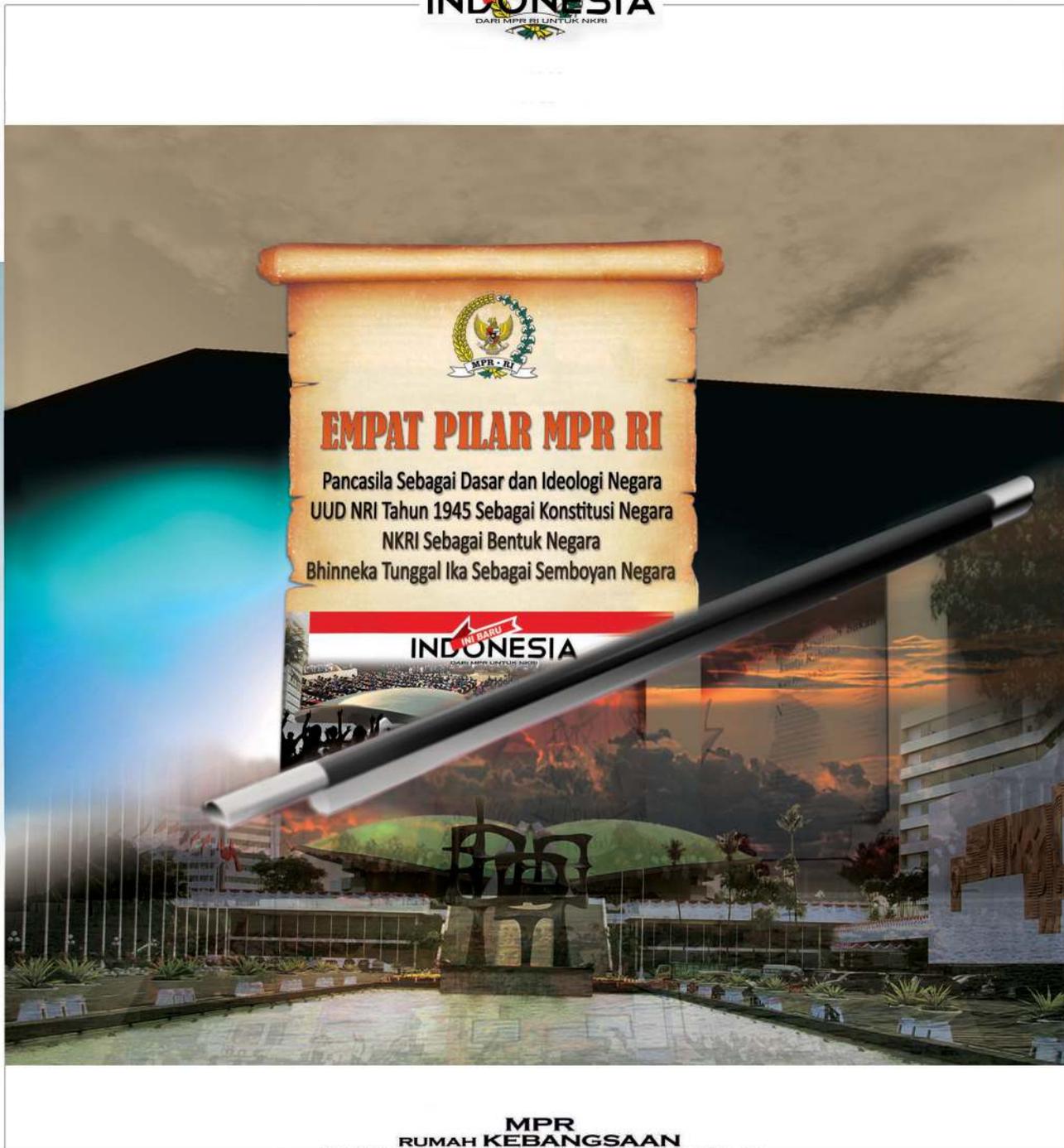
Mengizinkan kembali berbagai kegiatan publik di saat tren penyebaran Covid-19 mulai terkendali bukan berarti kita boleh berperilaku bebas seperti sebelum pandemi. Di era pandemi ini, pada diri kita harus selalu menyertakan sikap tanggung jawab terhadap lingkungannya, dalam berbagai aktivitas.

Sikap abai diri akan berdampak besar bagi orang lain dan sekitarnya. Kita harus rela berkorban dalam menjalankan norma baru dalam berkegiatan. Disiplin memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan harus menjadi keseharian kita.

Vaksinasi Covid-19 seharusnya menjadi kebutuhan seluruh warga negara dalam semangat melindungi bangsa dari serangan virus korona. Di sisi lain para pemangku kepentingan harus konsisten menjalankan testing dan tracing secara masif sebagai bagian dari pelaksanaan amanah yang dititipkan oleh warga negara.

Kombinasi pelaksanaan nilai-nilai Empat Pilar MPR oleh seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19 merupakan kekuatan yang diwarisi para pendiri negeri untuk menjawab tantangan terkini dan masa mendatang.

Sekarang tinggal sikap kita sebagai pewaris negeri, apakah mau memanfaatkan kekuatan nilai-nilai luhur itu untuk membebaskan negeri ini dari ujian pandemi? Mari bulatkan tekad, untuk mewujudkan negeri yang mampu mengendalikan Covid-19 di masa pandemi, menuju Indonesia yang tangguh dan berdaya saing di masa depan. □



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT





MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT